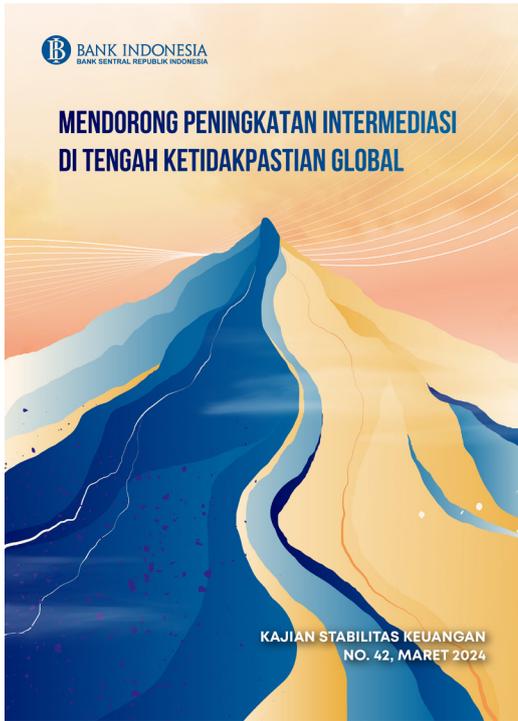
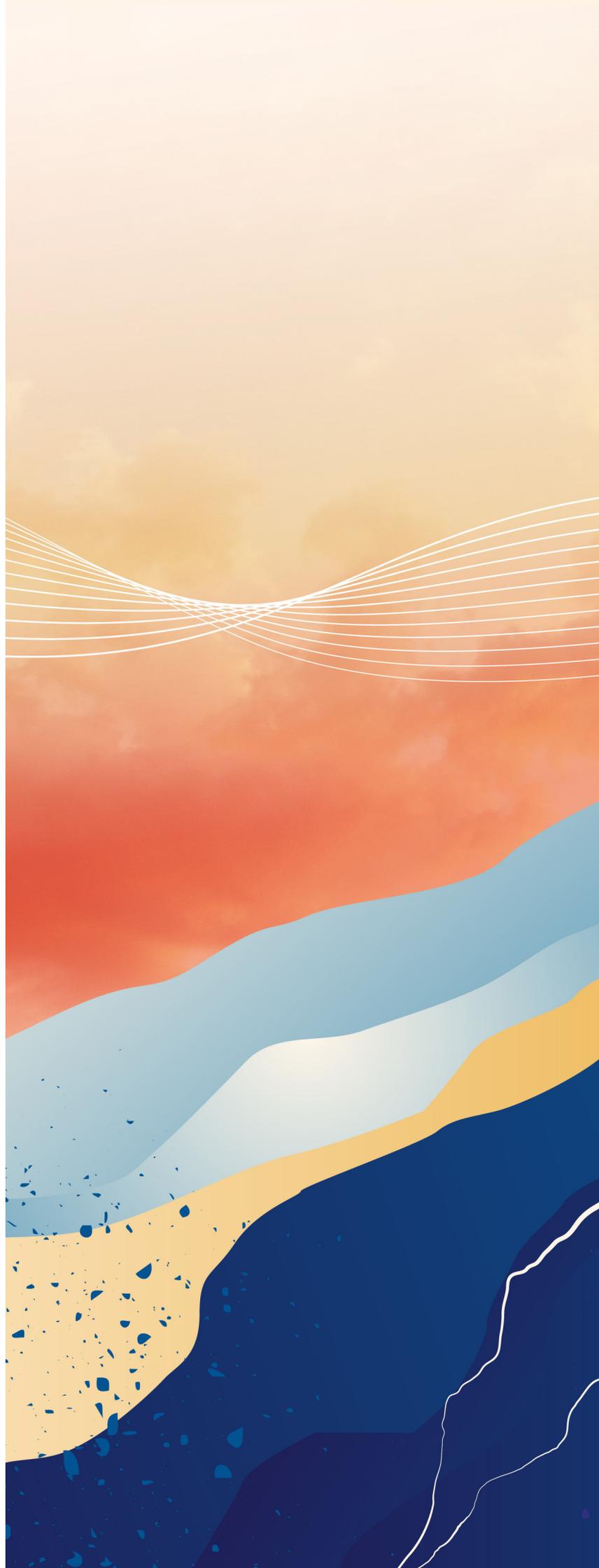


MENDORONG PENINGKATAN INTERMEDIASI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

**KAJIAN STABILITAS KEUANGAN
NO. 42, MARET 2024**



Warna gradasi jingga dan kuning mewakili harapan dan optimisme, sementara warna biru dengan gradasi gelap dan terang menggambarkan kedalaman dan keberagaman sektor keuangan. Interaksi antarwarna menunjukkan usaha Bank Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Garis-garis yang mengalir dan bentuk abstrak yang menyerupai topografi aliran air melambangkan intermediasi, aliran modal, dan arus informasi dalam perekonomian nasional, sekaligus menunjukkan arah kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Secara keseluruhan, desain ini menggambarkan usaha terus-menerus Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan intermediasi di tengah ketidakpastian global dan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).







BANK INDONESIA



ISSN 2620-9241

DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Daftar Isi

Daftar Tabel	iv	Daftar Singkatan	x
Daftar Grafik	v	Prakata	xiv
Daftar Gambar	ix	Ringkasan Eksekutif	2

Bab 1 8

Perkembangan dan Tantangan Makrofinansial Global dan Domestik

1.1	Ekonomi Global Tumbuh Melambat Disertai Divergensi Pertumbuhan	10
1.2	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global	12
Boks 1.1	Transisi Demografi Memicu Dinamika Investasi dan Pembiayaan Rumah Tangga	15

Bab 2 18

Intermediasi Terus Tumbuh

2.1	Pertumbuhan Kredit Terjaga	20
Boks 2.1	Pemetaan Sektor Dengan Daya Ungkit Tinggi yang Berpotensi Didorong Pertumbuhan Kreditnya	24
2.2	Tantangan Kapasitas <i>Lending</i> ke Depan	27
2.3	Kinerja Korporasi dan Rumah Tangga yang Tumbuh Positif, Mendorong Permintaan Kredit dan Pembiayaan	30

Bab 3 34

SSK Terjaga dengan Ketahanan Kuat di Tengah Ketidakpastian

3.1	Ketahanan Sektor Keuangan Terjaga Seiring Risiko yang Terkendali	36
Boks 3.1	Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Penyelenggara Layanan Keuangan yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia	43
3.2	<i>Repayment Capacity</i> Korporasi dan Rumah Tangga Terjaga	45
Boks 3.2	Kinerja Sektor Properti Domestik di Tengah Krisis Sektor Properti Tiongkok	53

Bab 4 **Inklusi Ekonomi dan Keuangan Meningkatkan Potensi Pembiayaan** 58

4.1	Pembiayaan Inklusif	60
4.2	Pembiayaan Inklusif Syariah Tumbuh Positif Melalui Sektor Keuangan Komersial dan Sosial	63
4.3	Pengembangan UMKM Didorong untuk Pertumbuhan yang Inklusif	66
4.4	Pelindungan Konsumen dan Keberdayaan Konsumen	70
Boks 4.1	Dukungan terhadap GBBI/BBWI untuk Onboarding UMKM dan Peningkatan Belanja PDN	73
Boks 4.2	Kinerja Keuangan UMKM Berdasarkan Survei Laporan Keuangan UMKM (SLKU) Tahun 2023	74

Bab 5 **Respons Kebijakan dalam Mendorong Intermediasi** 78

5.1	Kebijakan Makroprudensial Longgar untuk Mendorong Intermediasi	80
5.2	Sinergi Antarotoritas Sektor Keuangan	83
5.3	Penguatan Regulasi Sektor Keuangan Sebagai Tindak Lanjut UU PPSK	85
Boks 5.1	Stimulus Likuiditas Makroprudensial untuk Mendorong Intermediasi	88
Boks 5.2	Kebijakan Makroprudensial untuk Ekonomi dan Keuangan Hijau	92
Boks 5.3	Kontribusi Perbankan dalam Pembiayaan Hijau: Apresiasi untuk Bank Pendukung Keuangan Hijau	94

Bab 6 **Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial** 96

6.1	Lingkungan Strategis Global dan Domestik ke Depan	98
6.2	<i>Outlook</i> Intermediasi: Prospek Pertumbuhan Kredit Ditopang Korporasi dan Konsumsi Rumah Tangga	99
6.3	Arah Kebijakan Makroprudensial <i>Pro-Growth</i>	101
6.4	Sinergi Kebijakan dengan KSSK dan Otoritas Terkait untuk Penguatan Sektor Keuangan	103
Boks 6.1	Pemanfaatan <i>Machine Learning</i> pada Proyeksi Indikator SSK	104

Daftar Tabel

Bab 1

Perkembangan dan Tantangan Makrofinansial Global dan Domestik

Tabel 1.1.1	Pertumbuhan PDB Dunia	10
Tabel 1.2.1	Pertumbuhan Ekonomi	12

Bab 2

Intermediasi Terus Tumbuh

Tabel 2.3.1	Kinerja Penjualan, Profitabilitas, dan Capex Korporasi Tbk. menurut Sektor	30
--------------------	--	-----------

Bab 3

SSK Terjaga dengan Ketahanan Kuat di Tengah Ketidakpastian

Tabel 3.1.1	Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor	37
Tabel 3.2.1	Total Aset, Pertumbuhan Kas, Pertumbuhan Penjualan, dan <i>Debt to Equity</i> (DER) berdasarkan Subsektor	49

Bab 4

Inklusi Ekonomi dan Keuangan Meningkatkan Potensi Pembiayaan

Tabel 4.1.1	Tabel Kredit UMKM per 9 Sektor Ekonomi	58
Tabel B4.2.1	Rasio Keuangan UMKM	72

Bab 5

Respons Kebijakan dalam Mendorong Intermediasi

Tabel B5.1.1	Besaran KLM	88
---------------------	-------------	-----------

Daftar Grafik

Bab 1

Perkembangan dan Tantangan Makrofinansial Global dan Domestik

Grafik 1.1.1	Pergerakan Nilai Tukar Rupiah vs Nilai Tukar Negara Lain selama 2023	11
Grafik 1.2.1	Perkembangan Inflasi IHK, Inti, VF, AP, dan Sasaran Inflasi	13
Grafik 1.2.2	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	13
Grafik 1.2.3	Perkembangan Risiko Kredit dan Rasio Kecukupan Modal Perbankan	14
Grafik B1.1.1	Pangsa Penduduk Indonesia Menurut Generasi	15
Grafik B1.1.2	Pendapatan Individu Menurut Generasi	15
Grafik B1.1.3	Pertumbuhan DPK menurut Generasi	16
Grafik B1.1.4	Pertumbuhan Investasi menurut Generasi	16
Grafik B1.1.5	Pertumbuhan KK menurut Generasi	16
Grafik B1.1.6	NPL Kredit Konsumsi menurut Generasi	17
Grafik B1.1.7	Pertumbuhan KPR menurut Generasi	17

Bab 2

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Grafik 2.1.1	Kredit per Kelompok Bank	20
Grafik 2.1.2	Kredit per Jenis Penggunaan	20
Grafik 2.1.3	Indeks <i>Lending Standard</i>	20
Grafik 2.1.4	Perubahan Aspek Kebijakan Penyaluran Kredit	21

Grafik 2.1.5	Indeks <i>Lending Requirement</i>	21
Grafik 2.1.6	Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK	21
Grafik 2.1.7	Perkembangan AL/DPK	21
Grafik 2.1.8	Komposisi Alat Likuid Perbankan Posisi Desember 2023	22
Grafik 2.1.9	Pembiayaan Perbankan Syariah	22
Grafik 2.1.10	Pembiayaan Perbankan Syariah ke Sektor <i>Halal Value Chain</i> (HVC)	22
Grafik 2.1.11	Perkembangan Pembiayaan PP	23
Grafik 2.1.12	Pembiayaan Pegadaian, LPEI, dan Modal Ventura	23
Grafik 2.1.13	Pertumbuhan Pembiayaan <i>Fintech Lending</i>	23
Grafik B2.1.1	Risiko Kredit Sektor-Sektor yang Memiliki Daya Ungkit Tinggi	24
Grafik B2.1.2	Kinerja Penjualan Sektor-Sektor yang Memiliki Daya Ungkit Tinggi	24
Grafik B2.1.3	PMA Hilirisasi Minerba dan Rencana Investasi 5 Tahun ke Depan	25
Grafik B2.1.4	<i>Backward/Forward Linkage</i> Sektor Nonminerba	25
Grafik B2.1.5	Rasio KPR terhadap PDB	25
Grafik B2.1.6	Jumlah Perjalanan Wisnus Domestik	26
Grafik 2.2.1	Perkembangan DPK, Kredit, dan LDR	27
Grafik 2.2.2	Perkembangan <i>Funding Gap</i>	27
Grafik 2.2.3	Perkembangan Suku Bunga DPK dan Suku Bunga Kebijakan	28

Grafik 2.2.4	Perkembangan Sumber Dana Non-DPK	28
Grafik 2.2.5	Perkembangan Penerbitan EBUS Perbankan	28
Grafik 2.2.6	Perkembangan ULN Perbankan berdasarkan Jenis Instrumen	28
Grafik 2.2.7	Perkembangan ULN berdasarkan tenor (<i>original maturity</i>)	29
Grafik 2.2.8	Perkembangan DPK, SSB, dan Pinjaman Yang Diterima	29
Grafik 2.3.1	Pertumbuhan Capex dan PMTB selama Periode Pemilu	30
Grafik 2.3.2	Fragmentasi Harga per Komoditas	31
Grafik 2.3.3	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal	31
Grafik 2.3.4	Perkembangan Konsumsi RT	31
Grafik 2.3.5	Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen	32
Grafik 2.3.6	Perkembangan KPR Rumah Tangga	32
Grafik 2.3.7	Perkembangan Suku Bunga KPR	32

Bab 3

SSK Terjaga dengan Ketahanan Kuat di Tengah Ketidakpastian

Grafik 3.1.1	Perkembangan NPL Bruto Berdasarkan Segmen	36
Grafik 3.1.2	Perkembangan Komposisi <i>Loan at Risk</i> (LaR) Perbankan	36
Grafik 3.1.3	Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen	37
Grafik 3.1.4	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) Perbankan Syariah	37
Grafik 3.1.5	Perkembangan <i>Coverage</i> CKPN terhadap Risiko Kredit	38
Grafik 3.1.6	Perkembangan Permodalan	38
Grafik 3.1.7	Perkembangan Komposisi Modal	38
Grafik 3.1.8	Perkembangan AL/DPK dan Komponen AL	39

Grafik 3.1.9	Perkembangan LCR dan NSFR	39
Grafik 3.1.10	Perkembangan <i>Funding Gap</i> Perbankan	39
Grafik 3.1.11	<i>Non-Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Gearing Ratio</i> (GR) PP	40
Grafik 3.1.12	NPF dan DER Pegadaian	40
Grafik 3.1.13	NPF dan GR Modal Ventura	40
Grafik 3.1.14	Perkembangan Risiko Kredit oleh <i>Fintech</i>	41
Grafik 3.1.15	Premi dan Klaim Bruto Asuransi	41
Grafik 3.1.16	Iuran dan Manfaat Dana Pensiun	41
Grafik 3.1.17	Aset Dana Pensiun	41
Grafik 3.1.18	Interkoneksi dari Sisi Aset Bank terhadap IKNB	42
Grafik 3.1.19	Interkoneksi dari Sisi Kewajiban Bank terhadap IKNB	42
Grafik B3.1.1	Jumlah Insiden Siber yang Tercatat dalam Pengawasan Bank Indonesia	43
Grafik 3.2.1	Perkembangan <i>Interest Coverage Ratio</i>	45
Grafik 3.2.2	Perkembangan <i>Debt at Risk</i>	45
Grafik 3.2.3	Perkembangan <i>Current Ratio</i>	46
Grafik 3.2.4	Perkembangan <i>Cash Ratio</i>	46
Grafik 3.2.5	Pertumbuhan DPK	46
Grafik 3.2.6	<i>Free Cash Flow</i>	46
Grafik 3.2.7	ICR dan Market Signal serta Fundamental <i>Probability of Default</i> Korporasi	47
Grafik 3.2.8	Perkembangan Indeks Harga Obligasi Korporasi Developer Tiongkok yang dimiliki Indonesia	47

Grafik 3.2.9	Perkembangan Harga Keseluruhan Obligasi Korporasi Developer Tiongkok dan Ekspor Indonesia ke Tiongkok untuk Produk terkait <i>Housing</i>	48
Grafik 3.2.10	<i>Probability of Default</i> Korporasi per Sektor	48
Grafik 3.2.11	Fundamental <i>Probability of Default</i> berdasarkan Klasifikasi ICR	49
Grafik 3.2.12	<i>Market Signal Probability of Default</i> berdasarkan Klasifikasi ICR	49
Grafik 3.2.13	NPL Kredit Rumah Tangga	50
Grafik 3.2.14	LAR Rumah Tangga	50
Grafik 3.2.15	<i>Debt Service Ratio</i> Rumah Tangga	50
Grafik 3.2.16	Rata-Rata Suku Bunga Kredit Rumah Tangga	51
Grafik 3.2.17	Perkembangan Rata-Rata Upah Buruh Nominal Individu berdasarkan Generasi	51
Grafik B3.2.1	Pertumbuhan Penjualan Rumah Baru di Indonesia	53
Grafik B3.2.2	Pertumbuhan Penjualan Rumah Baru di Tiongkok	53
Grafik B3.2.3	Pertumbuhan Harga Properti Pasar Primer Indonesia	53
Grafik B3.2.4	Pertumbuhan Harga Properti Pasar Primer Tiongkok	53
Grafik B3.2.5	Pertumbuhan Kredit Properti Indonesia	54
Grafik B3.2.6	Pertumbuhan Kredit Properti Tiongkok	54
Grafik B3.2.7	Perkembangan KPR RT 2019 s.d. 2023	54
Grafik B3.2.8	Kinerja Indeks Saham Sektoral (IHSG & Hang Seng) pada Periode <i>Default Event</i>	54
Grafik B3.2.9	Perkembangan Penerbitan Saham Sektor yang terkait Kondisi Properti RRT	55

Bab 4

Inklusi Ekonomi dan Keuangan Meningkatkan Potensi Pembiayaan

Grafik 4.1.1	Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM per Segmen	58
Grafik 4.1.2	Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Perusahaan Pembiayaan	59
Grafik 4.1.3	Risiko Pembiayaan UMKM oleh PP	59
Grafik 4.1.4	Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh <i>Fintech Lending</i>	60
Grafik 4.1.5	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro	60
Grafik 4.2.1	Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah	61
Grafik 4.2.2	Perkembangan DPK BAZIS	61
Grafik 4.2.3	Pengumpulan dan Penyaluran Keuangan Sosial Syariah Antarbank	62
Grafik 4.4.1	Total Pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia	69
Grafik 4.4.2	Total Pengaduan Konsumen kepada Penyelenggara	69
Grafik B4.2.1	Kepemilikan Pencatatan Keuangan	73

Grafik B4.2.2	Alasan Tidak Memiliki Pencatatan Keuangan	73
Grafik B4.2.3	Sumber Pendanaan Awal UMKM	73
Grafik B4.2.4	Jumlah Pembiayaan dari Bank	73
Grafik B4.2.5	Rencana Investasi	73
Grafik B4.2.6	Jenis Investasi	74
Grafik B4.2.7	Metode Pembayaran	74
Grafik B4.2.8	Jenis Pembayaran Nontunai	74

Bab 5

Respons Kebijakan dalam Mendorong Intermediasi

Grafik B5.1.1	Realisasi Besaran Insentif Makroprudensial yang Diterima Perbankan	87
Grafik B5.1.2	Besaran Realisasi KLM	88
Grafik B5.1.3	Jumlah Bank penerima KLM	89
Grafik B5.3.1	Perkembangan Penyaluran KPR dan KKB Berwawasan Lingkungan	92
Grafik B5.3.2	Proporsi KPR dan KKB Lingkungan	93
Grafik B5.3.3	Perkembangan <i>Non-Performing Loans</i> untuk KPR dan KKB Berwawasan Lingkungan	93

Bab 6

Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Grafik 6.2.1	Realisasi Capex pada Prapemilu, Pemilu, dan Pascapemilu	97
Grafik 6.3.1	Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia	99

Daftar Gambar

Bab 3

SSK Terjaga dengan Ketahanan Kuat di Tengah Ketidakpastian

Gambar B3.1.1	Cakupan MRSI	44
----------------------	--------------	-----------

Bab 4

Inklusi Ekonomi dan Keuangan Meningkatkan Potensi Pembiayaan

Gambar 4.2.1	Kerangka Pengembangan Pelaku Usaha Syariah untuk Mendukung Ekosistem HVC	63
---------------------	--	-----------

Gambar 4.3.1	Strategi Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen	64
---------------------	---	-----------

Gambar 4.4.1	<i>Framework</i> Strategi Edukasi Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	69
---------------------	---	-----------

Gambar 4.4.2	Tahapan Penanganan Pengaduan Konsumen	70
---------------------	---------------------------------------	-----------

Bab 5

Respons Kebijakan dalam Mendorong Intermediasi

Gambar 5.1.1	Rasio LTV/FTV untuk Kredit/ Pembiayaan Properti dan UM Kredit/ Pembiayaan Kendaraan Bermotor	79
---------------------	--	-----------

Gambar B5.1.1	Tahapan Kebijakan Insentif Makroprudensial	86
----------------------	--	-----------

Bab 6

Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Gambar B6.1.1	Struktur <i>Neural Network</i> dari Model Kredit Industri	103
----------------------	---	------------

Daftar Singkatan

3K	Kapasitas, Kualitas, dan Kontinuitas
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APC	<i>Average Propensity to Consume</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIF	<i>Awqaf Properties Investment Fund</i>
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
Balinusra	Bali-Nusa Tenggara
Bansos	Bantuan Sosial
BAZIS	Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah
BBWI	Bangga Berwisata di Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BIS	Bank for International Settlements
BISAID	<i>Database Profil UMKM Potensial Dibiayai</i>
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BNM	Bank Negara Malaysia
BoT	Bank of Thailand
bps	<i>basis points</i>
BPR	Bank Perkonomian Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BTC	<i>Business to Consumer</i>
BTB	<i>Business to Business</i>

BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CAF	Charities Aid Foundation
Capex	<i>capital expenditure</i>
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CASA	<i>Current Account/Giro dan Saving Account/Tabungan</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CWLS	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i>
DaR	<i>Debt at Risk</i>
DAR	<i>Debt to Asset Ratio</i>
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>
DFS	<i>Digital Financial Services</i>
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DR	Departemen Regional
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
DUPK	Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen
EBITDA	<i>Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization</i>
EBUS	Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMDEs	<i>Emerging Market and Developing Economies</i>

ETPD	Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah	IPO	<i>Initial Public Offering</i>
FCF	<i>Free Cash Flow</i>	ISEF	Indonesia Sharia Economic Festival
FDS	<i>Fraud Detection System</i>	IsDB	Islamic Development Bank
FESyar	Festival Ekonomi Syariah	ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
FFR	<i>Fed Fund Rate</i>	ITS	Institut Teknologi Sepuluh November
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
fintech	<i>financial technology</i>	JPH	Jaminan Produk Halal
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial	K/L	Kementerian/Lembaga
FSB	Financial Stability Board	KBMI	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
FS-IAC	Financial Services Information Sharing and Analysis Center	KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Gernas BBI	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Kemenko Marves	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
GPM	<i>Gross Profit Margin</i>	Kemenkeu	Kementerian Keuangan
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan	Keppres	Keputusan Presiden
GR	<i>Gearing Ratio</i>	KI	Kredit Investasi
GWM	Giro Wajib Minimum	KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional	KKI	Karya Kreatif Indonesia
HVC	<i>Halal Value Chain</i>	KKS	Ketahanan dan Keamanan Siber
ICR	<i>Interest Coverage Ratio</i>	KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
IHK	Indeks Harga Konsumen	KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
IHKEI	Indeks Harga Ekspor Komoditas Indonesia	KMK	Kredit Modal Kerja
IHOB	<i>Indonesia House of Bean</i>	KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
IKK	Indeks Keberdayaan Konsumen	KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
IKNB	Industri Keuangan Nonbank	KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
IKRA	Industri Kreatif Syariah	KUPVA	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
ILR	Indeks <i>Lending Requirement</i>	KUR	Kredit Usaha Rakyat
ILS	Indeks <i>Lending Standard</i>	LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
IMF	International Monetary Fund	LaR	<i>Loan at Risk</i>
IMTI	<i>Indonesia Muslim Friendly Tourism Index</i>	LBUT	Laporan Bank Umum Terintegrasi
IN2MF	<i>Indonesia International Modest Fashion Festival</i>	LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
INFRATANI	<i>Integrated Farming with Technology Information and Society</i>	LGA	Listrik, Gas, dan Air

LNPRT	Lembaga <i>Non-profit</i> yang Melayani Rumah Tangga	Pemda	Pemerintah Daerah
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pemilu	Pemilihan Umum
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan	Permenko	Peraturan Menteri Perekonomian
LTV/FTV	<i>Loan to Value/Financing to Value</i>	PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
LU	Lapangan Usaha	PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
MAS	Monetary Authority of Singapore	PKB	Pembiayaan Kendaraan Bermotor
MATRIC	<i>Massive, Technology-based, Responsive, dan Customer Centric</i>	PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
MCF	<i>Multichannel Financing</i>	PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>	PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
Minerba	mineral dan batubara	PNM	PT Permodalan Nasional Madani
MRSI	Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi	Poltekpar NHI	Politeknik Pariwisata National Hotel Institute
mtm	<i>month to month</i>	PP	Perusahaan Pembiayaan
NARX	<i>Nonlinear Autoregressive Network with exogenous input</i>	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Nataru	Natal dan Tahun Baru	PPN-DTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
NDC	<i>National Determined Contribution</i>	PRM	Pariwisata Ramah Muslim
NIST	<i>National Institute of Standards and Technology</i>	PSPK	Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritis
NPF	<i>Non-performing Financing</i>	PSPS	Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik
NPL	<i>Non-performing Loan</i>	PSPU	Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum
NPM	<i>Net Profit Margin</i>	PSN	Proyek Strategis Nasional
NSFR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>	PTD-BB	Perusahaan Transfer Dana Bukan Bank
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	PYD	Pinjaman yang Diterima
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah	QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
PBI	Peraturan Bank Indonesia	RBC	<i>Risk Based Capital</i>
PBI PKBI	Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
PBI PUVA	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	ROA	<i>Return on Asset</i>
PD	<i>Probability of Default</i>	ROE	<i>Return on Equity</i>
PDB	Produk Domestik Bruto	RPH	Rumah Potongan Hewan
PDN	Produk Dalam Negeri	RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
PeKA	Peduli, Kenali, dan Adukan		

RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
RRT	Republik Rakyat Tiongkok	Sulampua	Sulawesi-Maluku-Papua
RSEOJK	Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
RT	Rumah Tangga	SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit	TI	Teknologi Informasi
SBI	Sertifikat Bank Indonesia	TOBAKU	Toko Bahan Baku
SBN	Surat Berharga Negara	TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
SDA	Sumber Daya Alam	TPIP	Tim Pengendali Inflasi Pusat
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>	TPT	Tekstil dan Produk Tekstil
SDM	Sumber Daya Manusia	TWP90	Tingkat Wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo
SHPR	Survei Harga Properti Residensial	UEA	Uni Emirat Arab
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan	ULN	Utang Luar Negeri
SIKP	Sistem Informasi Kredit Program	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
SJK	Sektor Jasa Keuangan	UU PPKSK	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
SLKU	Survei Laporan Keuangan UMKM	UU PPSK	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
SMART-MFT Hub	<i>Sustainable Muslim Attractive Tourism – Muslim Friendly Tourism Hub</i>	UUS	Unit Usaha Syariah
SML	<i>Supervised Machine Learning</i>	WGI	<i>World Giving Index</i>
SNEKI	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif	yoy	<i>year on year</i>
SNPKBI	Survei Nasional Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	ytd	<i>year to date</i>
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	ZISWAF	Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf
SSB	Surat-Surat Berharga		
SukBI	Sukuk Bank Indonesia		

Prakata



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 42 Edisi Maret 2024 ini dengan tema “Mendorong Peningkatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian Global” dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Kajian Stabilitas Keuangan merupakan kajian yang menyampaikan gambaran kondisi terkini dan prospek sistem keuangan Indonesia berdasarkan hasil asesmen tiga pilar kebijakan makroprudensial, yaitu intermediasi, ketahanan, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Kondisi perekonomian domestik sepanjang 2023 tetap tumbuh solid di tengah gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Masalah geopolitik yang berlarut dan masih tingginya suku bunga kebijakan bank sentral di banyak negara menjadi tantangan utama selama 2023. Namun demikian, kinerja perekonomian domestik terus menunjukkan perbaikan dengan stabilitas Rupiah yang terjaga dan inflasi yang masih dalam kisaran target.

Demikian pula dengan kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga. Intermediasi sistem keuangan menunjukkan kredit yang masih tumbuh dengan tingkat risiko kredit terkendali, didukung ketahanan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai. Peran sektor keuangan dalam pembiayaan ekonomi masih kuat dalam mendukung permintaan kredit dunia usaha serta rumah tangga.

Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan bauran kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Kebijakan makroprudensial *pro-growth* terutama ditempuh melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yaitu peningkatan insentif untuk penyaluran kredit perbankan khususnya pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penguatan kebijakan KLM ini dinilai efektif untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap tinggi. Selain KLM, Bank Indonesia juga melonggarkan kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk menambah likuiditas pendanaan kredit. Guna meningkatkan efektivitas kebijakan, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan dan senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, dan Lembaga lainnya. Penguatan koordinasi kebijakan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan dengan tujuan mitigasi risiko dalam sistem keuangan serta mendukung peran lembaga intermediasi keuangan dalam pembiayaan perekonomian. Bank Indonesia secara kontinu

melakukan sinergi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjaga SSK.

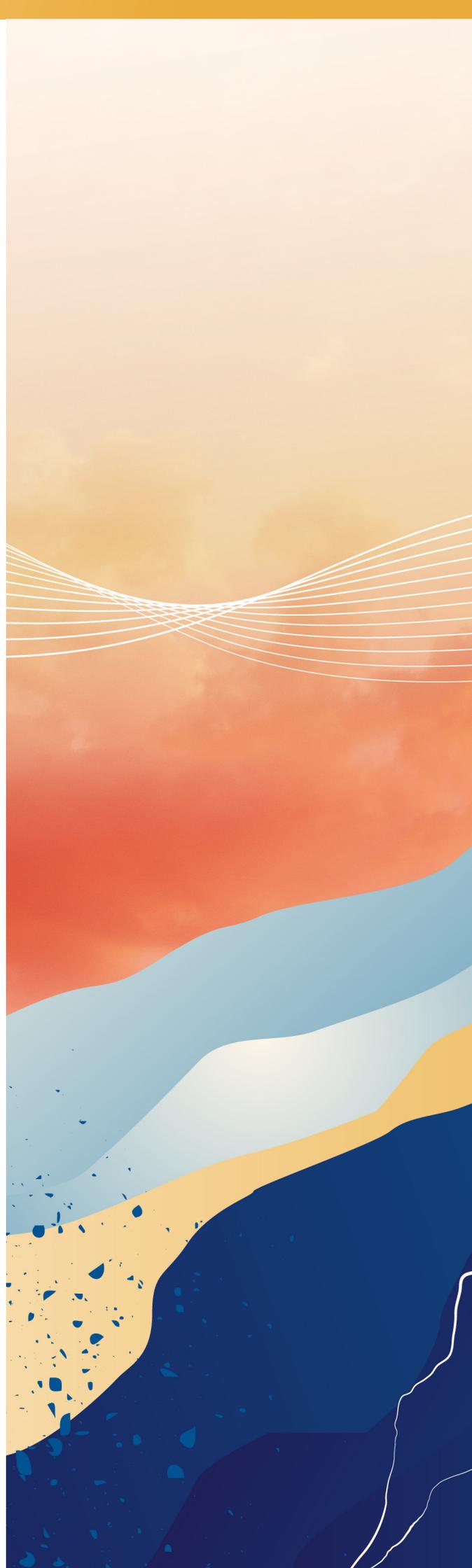
Ke depan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan kebijakan yang efektif, antara lain ketidakpastian global yang masih tinggi dan dampaknya ke perekonomian domestik, serta isu funding gap perbankan sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang belum kuat. Dalam kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia 2024, arah kebijakan makroprudensial akan dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan makroprudensial akomodatif tersebut sejalan dengan siklus ekonomi dan keuangan yang masih dalam fase ekspansi.

Kami berharap Kajian Stabilitas Keuangan No. 42 selain memberikan gambaran kondisi terkini dan prospek sistem keuangan, juga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambilan keputusan sehingga bersama-sama dapat mendorong peningkatan intermediasi di tengah ketidakpastian global.

Jakarta, Maret 2024



Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo



RINGKASAN EKSEKUTIF

**MENDORONG PENINGKATAN
INTERMEDIASI DI TENGAH
KETIDAKPASTIAN GLOBAL**

The background of the page features an abstract graphic design. It consists of several overlapping, wavy, organic shapes in shades of blue (from light to dark) and orange (from light to dark). A prominent white line curves through the composition, starting from the bottom left and moving towards the top right. The overall aesthetic is modern and dynamic.

Stabilitas sistem keuangan (SSK) terjaga pada 2023 di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. Hal ini tercermin dari ketahanan sistem keuangan yang terjaga, diindikasikan oleh Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang berada pada zona normal sepanjang 2023 dengan intermediasi yang meningkat di tengah ketidakpastian global. Pada 2023, Bank Indonesia secara konsisten menetapkan bauran kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui kebijakan makroprudensial. Terjaganya SSK turut didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Bauran kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dengan inovasi, sinergi, dan koordinasi Bank Indonesia baik dengan Pemerintah, otoritas terkait, dan mitra strategis lainnya.

Sistem keuangan domestik masih dihadapkan pada perlambatan ekonomi global dan divergensi pertumbuhan antarnegara. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup sejalan dengan berlanjutnya efek luka memar (*scarring effect*) dan meningkatnya fragmentasi geopolitik-ekonomi. Kinerja ekonomi global pada 2023 juga diwarnai dengan divergensi pertumbuhan yang terjadi antarnegara. Ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India tetap kuat, sementara ekonomi Tiongkok melambat. Penurunan inflasi di negara masih berlanjut, namun masih berada di atas sasaran. Suku bunga kebijakan *Fed Fund Rate* (FFR) AS yang tinggi dikisaran 5,25-5,50% diprakirakan masih akan berlangsung lebih lama (*high for longer*) hingga paruh pertama 2024. Seiring dengan itu, tekanan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang hampir seluruh mata uang dunia. Merespons hal tersebut, Bank Indonesia konsisten mengambil langkah-langkah stabilisasi sehingga nilai tukar Rupiah terapresiasi, lebih baik dibandingkan mata uang sejumlah negara di kawasan dan global. Di sisi lain, perekonomian domestik 2023 tetap kuat dan berdaya tahan di tengah

tantangan terjadinya dampak rambatan dari perlambatan ekonomi dan tekanan kenaikan inflasi global dengan pertumbuhan sebesar 5,05%, terutama didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah pada akhir tahun dan percepatan penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN).

Intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan pada 2023 didukung oleh *risk appetite* yang terjaga dan likuiditas yang memadai. Kredit perbankan pada akhir 2023 tumbuh sebesar 10,38% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,35% (yoy), namun relatif membaik dibandingkan semester sebelumnya sebesar 7,76% (yoy). Perbaikan pertumbuhan kredit perbankan ditopang kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja (KMK) maupun Kredit Investasi (KI), utamanya pada segmen korporasi. Membaiknya kinerja intermediasi terjadi di mayoritas sektor ekonomi, terutama didorong oleh sektor Perdagangan, Pengangkutan, dan Listrik, Gas, dan Air (LGA). Dari sisi permintaan, kinerja penjualan korporasi yang tumbuh positif, mendorong permintaan kredit korporasi terutama KMK. Peningkatan pembiayaan perbankan juga ditopang oleh peningkatan permintaan kredit konsumsi Rumah Tangga (RT) terutama kredit kepemilikan rumah (KPR). Dari sisi penawaran, perbaikan intermediasi didukung *risk appetite* dan likuiditas perbankan yang memadai, tercermin dari Indeks *Lending Standard* (ILS) yang relatif stabil dan Indeks *Lending Requirement* (ILR) yang masih longgar. Sementara itu, kenaikan suku bunga kebijakan pada Semester II 2023 berdampak terbatas pada kenaikan suku bunga kredit Rupiah, sehingga turut berkontribusi pada terjaganya pertumbuhan kredit 2023. Sejalan dengan perbankan, intermediasi IKNB juga menunjukkan perkembangan yang positif terutama pada perusahaan pembiayaan (PP) dan PT Pegadaian. Intermediasi IKNB turut didorong oleh maraknya inovasi pembiayaan berbasis ekosistem *platform* digital seperti *e-commerce* yang disalurkan PP dan *financial technology* (*fintech*).

Peningkatan intermediasi perbankan menghadapi tantangan kondisi *funding gap*, sehingga perlu penguatan pendanaan Non-DPK sebagai alternatif *funding*. Pada akhir 2023, DPK tumbuh sebesar 3,73% (yoy), lebih lambat dibandingkan 2022. Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang lebih lambat dibandingkan kredit, *funding gap* pada akhir 2023 melebar hingga mencapai level tertinggi sejak 2010. Sementara itu, sumber dana non-DPK pada 2023 relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan sumber dana non-DPK pada 2023 terjadi pada Pinjaman Yang Diterima (PYD) dan nilai penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), meskipun *outstanding* Surat-Surat Berharga (SSB) mengalami penurunan, sejalan dengan meningkatnya tingkat pengembalian (*yield*) surat berharga. Di sisi lain, utang luar negeri (ULN) perbankan mengalami kontraksi pertumbuhan yang terjadi di hampir seluruh kelompok bank dipengaruhi kondisi suku bunga global yang lebih tinggi.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan intermediasi perbankan ditopang oleh pertumbuhan kinerja korporasi dan rumah tangga. Di tengah tantangan global yang masih berlanjut, kinerja penjualan korporasi sepanjang 2023 mencatat pertumbuhan positif sehingga mendorong permintaan kredit korporasi terutama KMK. Selain itu, pertumbuhan kredit turut didorong permintaan Kredit Investasi (KI) korporasi sejalan dengan pertumbuhan *capital expenditure* (Capex) yang positif meskipun investasi korporasi menghadapi tantangan dari kondisi *high for longer* dan perilaku *wait-and-see* menyikapi ketidakpastian menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pertumbuhan pembiayaan perbankan juga ditopang oleh peningkatan permintaan kredit konsumsi RT seiring dengan terjaganya kinerja dan optimisme ekspektasi penghasilan RT. Di samping itu, kebijakan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) berdampak terhadap kenaikan pembelian properti residensial, sehingga mendorong meningkatnya permintaan KPR.

Ketahanan sektor keuangan terjaga seiring risiko yang terkendali mendukung pertumbuhan intermediasi. Ketahanan perbankan tecermin dari risiko kredit yang menurun, permodalan yang kuat, serta likuiditas yang *ample*. Risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) secara agregat sebesar 2,19% menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,44%. Meski secara umum risiko kredit menurun, perbankan tetap memperkuat upaya mitigasi risiko ke depan dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang relatif tinggi serta menjaga rasio permodalan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tetap tinggi. Likuiditas perbankan memperlihatkan ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut. Rasio AL/DPK masih tercatat tinggi sebesar 28,73% pada 2023. Dari sisi IKNB, ketahanan Perusahaan Pembiayaan/PP, *Fintech Lending*, Pegadaian dan Modal Ventura tetap terjaga baik, tecermin dari kondisi permodalan yang baik dan risiko pembiayaan yang terkendali. Demikian juga Asuransi dan Dana Pensiun menunjukkan kinerja yang positif. Potensi *spillover* risiko dari IKNB ke perbankan relatif terbatas karena interkoneksi IKNB dengan sektor perbankan yang relatif kecil. Pesatnya perkembangan digitalisasi layanan keuangan baik oleh perbankan dan IKNB berpotensi meningkatkan kerentanan risiko siber. Penguatan ketahanan dan keamanan siber bagi penyelenggara layanan keuangan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia menjadi krusial dalam mengantisipasi kerentanan dimaksud.

Ketahanan korporasi dan rumah tangga terjaga mendukung stabilnya *repayment capacity*. Ketahanan korporasi tecermin dari terjaganya *repayment capacity* dengan memadainya *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi secara agregat yaitu sebesar 2,11 kali, membaiknya *Probability of Default* (PD), serta terjaganya rasio utang berisiko atau *Debt at Risk* (DaR). Namun demikian, penurunan *excess saving* korporasi di beberapa sektor yang dibarengi dengan pertumbuhan utang yang tinggi dan penjualan yang menurun perlu

dicermati. Di sektor rumah tangga, risiko kredit tetap terjaga didukung kebijakan insentif fiskal dan peningkatan pendapatan yang mendorong terjaganya *repayment capacity* tecermin dari *Debt Service Ratio* (DSR) yang stabil.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bank Indonesia konsisten berupaya meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan. Di sisi intermediasi, pembiayaan inklusif menunjukkan perkembangan yang positif. Pada 2023, kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh sebesar 8,03% (%yoy) dengan tingkat risiko yang terjaga, ditopang oleh dukungan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta terjaganya kinerja usaha UMKM. Pembiayaan kepada UMKM turut didukung oleh peran IKNB, terutama PP dan *fintech*, untuk menangkap besarnya potensi pelaku UMKM yang *unbanked*, termasuk segmen Ultra Mikro. Semangat peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan juga didorong melalui pembiayaan inklusif syariah yang tumbuh positif baik melalui sektor keuangan komersil syariah maupun keuangan sosial syariah. Bank Indonesia terus melakukan penguatan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif, melalui empat pilar strategi, yaitu pemberdayaan ekonomi, perluasan akses dan literasi keuangan, peningkatan akses pembiayaan, serta perlindungan konsumen.

Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-growth*) melalui konsistensi dan inovasi kebijakan. Kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Pada 2023, Bank Indonesia menetapkan stimulus kebijakan makroprudensial melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan kepada sektor-sektor yang memberikan daya ungkit pertumbuhan yang besar. Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan melanjutkan pelonggaran *Loan To Value/Financing To Value* (LTV/FTV) serta kebijakan penurunan Rasio Penyangga Likuiditas

Makroprudensial (PLM) untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran pembiayaan. Kebijakan makroprudensial *pro-growth* lainnya dilakukan dengan mempertahankan Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan SSK, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi baik dengan Pemerintah, otoritas terkait, maupun mitra strategis lainnya. Koordinasi kebijakan nasional melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat guna memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu SSK dan mendorong pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dilakukan secara kontinu dalam rangka menjaga SSK.

Bank Indonesia terus melanjutkan dan memperkuat transformasi di area kebijakan sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Di area kebijakan makroprudensial, pada 2023 Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan penerbitan dan implementasi KLM. Penyempurnaan ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS) juga dilakukan dalam kerangka penguatan penanganan permasalahan bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Transformasi kebijakan Bank Indonesia juga mencakup penguatan berbagai ketentuan, seperti ketentuan perlindungan konsumen, ketentuan pasar uang dan pasar valuta asing, serta ketentuan penerbitan instrumen dan transaksi di pasar uang. Penguatan ketentuan akan terus dilakukan Bank Indonesia dengan pembentukan peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam UU PPSK.

Ke depan, stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang membaik di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan masih berlanjut pada 2024. Pengetatan kebijakan moneter negara maju yang berlangsung lebih lama (*high for longer*) serta inflasi yang masih tinggi menjadi tantangan bagi bank sentral secara global. Kondisi tersebut menyebabkan ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,0% pada 2024. Di sisi lain, perekonomian domestik diperkirakan membaik dengan peningkatan pertumbuhan mencapai 4,7-5,5% pada 2024. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terjaga, suku bunga yang kondusif, serta berlanjutnya PSN mendorong optimisme peningkatan pertumbuhan kredit. Intermediasi perbankan ke depan juga didukung oleh ketahanan perbankan yang kuat, yaitu risiko kredit yang rendah dan permodalan yang tetap kuat. Dari sisi permintaan, pembiayaan korporasi diperkirakan meningkat seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang resilien turut meningkatkan permintaan kredit konsumsi. Dari sisi inklusi, kredit UMKM diperkirakan tumbuh

meningkat seiring dengan perbaikan kinerja UMKM dan program KUR yang berlanjut di 2024. Dengan perkembangan tersebut, intermediasi perbankan diperkirakan tumbuh lebih tinggi menjadi sebesar 10-12% pada 2024 dan terus meningkat pada 2025 pada kisaran 11-13%.

Bank Indonesia akan melanjutkan arah kebijakan makroprudensial *pro-growth* didukung penguatan sinergi antarotoritas sistem keuangan, Pemerintah, dan mitra strategis. Arah kebijakan makroprudensial longgar tersebut sejalan dengan siklus ekonomi dan keuangan yang masih dalam fase ekspansi. Seiring arah kebijakan makroprudensial *pro-growth*, Bank Indonesia melakukan pengawasan secara tidak langsung (*surveilans*) dan pengawasan langsung (*pemeriksaan*) secara tematik untuk memantau ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Guna mendukung arah kebijakan *pro-growth*, Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi lintas otoritas sektor keuangan dalam KSSK dan sinergi bilateral antara Bank Indonesia-OJK dan Bank Indonesia-LPS. Sinergi ditujukan sebagai antisipasi potensi rambatan ketidakpastian global dan domestik ke sistem keuangan domestik.



BANK INDONESIA

BAB 01

**PERKEMBANGAN
DAN TANTANGAN
MAKROFINANSIAL
GLOBAL DAN
DOMESTIK**





Pertumbuhan ekonomi global melambat disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang melebar dan depresiasi berbagai mata uang dunia. Kinerja ekonomi global pada 2023 diwarnai dengan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), dengan negara-negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), khususnya Tiongkok. Inflasi 2023 yang masih di atas sasaran diperkirakan membatasi ruang gerak bank sentral untuk menurunkan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tingginya imbal hasil obligasi global tenor panjang mendorong terjadinya *capital outflows* sehingga memberikan tekanan depresiasi terhadap berbagai mata uang dunia. Langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia berhasil membuat nilai tukar Rupiah terapresiasi, lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara di kawasan dan global.

Perekonomian Indonesia tumbuh hampir merata di semua komponen PDB. Pertumbuhan selama 2023 didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sejalan dengan itu, sektor-sektor tertentu seperti Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan minum, serta perdagangan besar dan eceran menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Di sisi lain, inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang pertumbuhan kredit yang kuat. Pencapaian ini didukung oleh kecenderungan perbankan yang masih agresif dalam menyalurkan kredit dan kondisi likuiditas perbankan yang terjaga dengan baik. Seiring dengan itu, ketahanan sektor perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang berada pada zona normal sepanjang 2023.

Ekonomi Global Tumbuh Melambat Disertai Divergensi Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi global melambat disertai dengan divergensi pertumbuhan antarnegara yang melebar. Setelah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 3,5% (yoy) pada 2022, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 diperkirakan turun ke 3,1% (yoy) (Tabel 1.1.1). Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup sejalan dengan berlanjutnya efek luka memar (*scarring effect*) dan meningkatnya fragmentasi geopolitik-ekonomi. Kinerja ekonomi global pada 2023 juga diwarnai dengan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama AS yang tumbuh lebih tinggi dari prakiraan, dengan negara-negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), khususnya Tiongkok, yang melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor Properti.

Inflasi global terus turun meskipun lebih lambat dari prakiraan. Inflasi dunia pada Desember 2023 turun menjadi 6,8% (yoy) dari level tertinggi pada Triwulan II 2022. Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan penurunan harga energi dan pangan, terurainya keketatan pasokan,

serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter bank sentral di banyak negara. Namun demikian, tetap ketatnya pasar tenaga kerja menyebabkan inflasi di berbagai negara masih di atas sasaran yang ingin dicapai.

Suku bunga kebijakan yang tinggi masih akan berlangsung lebih lama (*high for longer*). Di AS, kisaran suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) diperkirakan akan dipertahankan selama paruh pertama 2024. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Eropa dan Inggris. Fenomena suku bunga tinggi di negara maju tersebut membatasi ruang gerak bank-bank sentral di negara EMDEs untuk menurunkan suku bunga kebijakan moneternya guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meski inflasi di beberapa negara telah mencapai sasaran. Namun demikian, bank-bank sentral di Amerika Latin yang telah lebih awal dan agresif melakukan pengetatan moneter, telah mulai menurunkan suku bunga.

Imbal hasil obligasi global tenor panjang meningkat tajam sehingga mendorong *capital outflows*. Kondisi ini dipicu oleh tingginya kebutuhan pembiayaan fiskal dan utang pemerintah AS sehingga mendorong investor

Tabel 1.1.1 Pertumbuhan PDB Dunia

Negara	(% , yoy)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Dunia	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,1	3,0
Negara Maju	1,7	-4,2	5,6	2,6	1,6	1,6
Amerika Serikat	2,3	-2,8	5,9	1,9	2,5	1,9
Kawasan Eropa	1,6	-6,1	5,6	3,4	0,5	0,8
Jepang	-0,4	-4,2	2,2	1,0	1,9	1,1
Negara Berkembang	3,6	-1,8	6,9	4,1	4,1	3,9
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,5
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	6,8	5,9
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,4	4,6
Amerika Latin	0,2	-7,0	7,4	4,2	2,5	2,0
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,6	7,3	1,2	2,7	2,7
Timur Tengah & Asia Tengah	1,6	-2,6	4,3	5,5	2,0	3,0

Sumber: IMF WEO, diolah

*proyeksi Bank Indonesia 2024

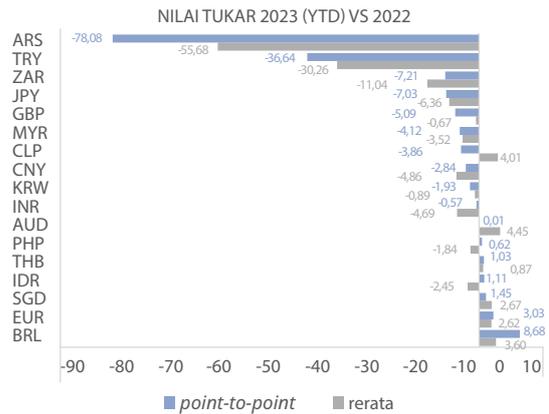
portofolio global memindahkan dananya dari sekuritas yang berisiko ke instrumen yang likuid. Berbagai kondisi tersebut pada gilirannya mendorong *capital outflows* dari EMDEs yang memicu penguatan nilai tukar dolar AS dan memberikan tekanan depresiasi terhadap berbagai mata uang dunia.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah pelemahan mata uang global.

Tingginya suku bunga dan besarnya aliran modal ke AS memberikan tekanan depresiasi mata uang hampir seluruh mata uang dunia, seperti Yen Jepang, Yuan Tiongkok, dan Pound Sterling Inggris yang melemah masing-masing 7,03%, 2,84%, dan 5,09% (ytd), serta depresiasi mata uang kawasan, seperti Ringgit Malaysia dan Rupee India masing-masing 4,12% dan 0,57% (ytd). Namun demikian, langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia berhasil membuat nilai tukar Rupiah terapresiasi 1,11% (ytd), lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara di kawasan dan global yang mengalami depresiasi tersebut (Grafik 1.1.1).

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Hal ini ditujukan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi barang impor (*imported inflation*) dan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di samping intervensi di pasar valuta asing, Bank Indonesia mempercepat upaya pendalaman pasar uang Rupiah dan pasar valuta

Grafik 1.1.1 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah vs Nilai Tukar Negara Lain selama 2023



Keterangan: Data s.d. 29 Des 2023
Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah

asing, termasuk melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Pendalaman pasar uang diharapkan dapat meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha terus ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan efektivitas implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan. Ekonomi Triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi terjadi pada hampir seluruh komponen PDB. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,47% (yoy) seiring dengan kenaikan mobilitas terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang meningkat (Tabel 1.2.1). Sejalan dengan itu, Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 18,11% (yoy) didorong peningkatan aktivitas persiapan pemilu. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 2,81% (yoy) didorong oleh belanja barang dan pegawai. Sementara itu, investasi tumbuh sebesar 5,02% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya

aktivitas penanaman modal. Lebih lanjut, ekspor tumbuh sebesar 1,64% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan, serta membaiknya ekspor jasa seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.

Kinerja Lapangan Usaha (LU) tumbuh di sebagian besar wilayah Indonesia. Seluruh LU pada Triwulan IV 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi tercatat pada sektor terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring kuatnya permintaan domestik dan global. Sejalan dengan itu, pertumbuhan di sebagian besar wilayah Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sumatera.

Tabel 1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Komponen	(% , yoy)										
	2021	2022*				2022*	2023**				2023**
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	2,01	4,35	5,52	5,40	4,50	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82
Konsumsi Pemerintah	4,25	-6,60	-4,61	-2,50	-4,72	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95
Investasi (PMTDB)	3,80	4,08	3,09	4,98	3,33	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40
Ekspor	17,99	14,40	16,32	19,09	14,95	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32
Impor	24,86	16,06	13,06	25,73	6,49	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65
PDB	3,70	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05

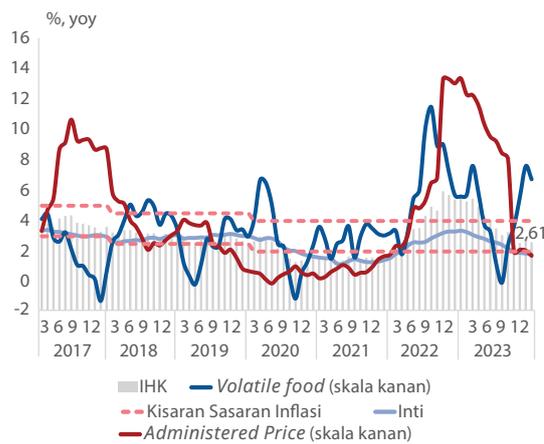
Sumber: BPS, diolah

*Angka sementara
**Angka sangat sementara

Inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2023 tercatat 2,61% (yoy), jauh lebih rendah dari inflasi IHK akhir 2022 sebesar 5,51% (yoy). Kembalinya inflasi ke sasaran 3,0±1% merupakan hasil nyata konsistensi kebijakan moneter *pro-stability* yang ditempuh disertai eratny sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Inflasi inti, *volatile food*, dan *administered price* terkendali. Inflasi inti 2023 terjaga sebesar 1,80% (yoy) dipengaruhi oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi *volatile food* juga terkendali sebesar 6,73% (yoy) berkat eratny sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak eksternal seperti cuaca El Nino. Inflasi kelompok *administered prices* juga menurun menjadi 1,72% (yoy), sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan untuk menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik (Grafik 1.2.1).

Grafik 1.2.1 Perkembangan Inflasi IHK, Inti, VF, AP, dan Sasaran Inflasi

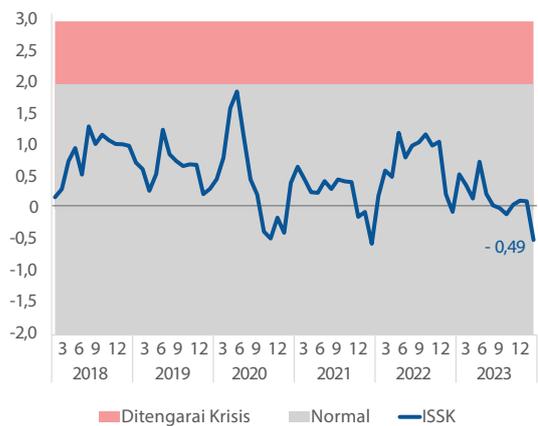


Sumber: BPS, diolah

Kredit perbankan tumbuh relatif tinggi didukung oleh kinerja korporasi dan rumah tangga yang positif dan ketahanan industri perbankan yang tetap kuat. Industri perbankan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 10,38% (yoy), yang berada dalam rentang target 9-11%. Peningkatan kredit ini sejalan dengan kinerja korporasi yang masih positif dan kondisi keuangan rumah tangga yang solid. Pertumbuhan kredit juga ditopang oleh ketahanan industri perbankan yang kuat diindikasikan oleh risiko kredit yang menurun, permodalan yang kuat, serta likuiditas yang *ample*.

Stabilitas sistem keuangan terus terjaga seiring dengan menurunny risiko kredit dan kuatny permodalan bank. Hal ini tecermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang berada pada zona normal sepanjang 2023, dan berada pada kisaran -0,49 pada Desember 2023 (Grafik 1.2.2). ISSK yang terjaga ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan risiko kredit yang menurun. Rasio kecukupan modal bank tercatat sebesar 27,66% pada Desember 2023 (Grafik 1.2.3). Sementara itu, rasio kredit bermasalah terjaga pada level 2,19% (bruto) dan 0,71% (neto). Lebih lanjut, berakhirny restrukturisasi kredit OJK, berdampak

Grafik 1.2.2 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2.3 Perkembangan Risiko Kredit dan Rasio Kecukupan Modal Perbankan



Sumber: Bank Indonesia dan OJK, diolah

terbatas terhadap perbankan. Dari sisi korporasi dan rumah tangga, risiko kredit masih terjaga dengan *probability of default* (PD) korporasi terus membaik dan *interest coverage ratio* (ICR) yang masih tinggi. Meskipun terdapat tantangan global yaitu pelemahan sektor Properti di Tiongkok, namun dampak rambatannya terhadap kinerja korporasi Indonesia masih relatif terbatas. Risiko yang perlu dicermati antara lain adalah *excess saving* korporasi di beberapa sektor yang menurun diikuti oleh masih tingginya pertumbuhan utang dan menurunnya penjualan.

Boks 1.1

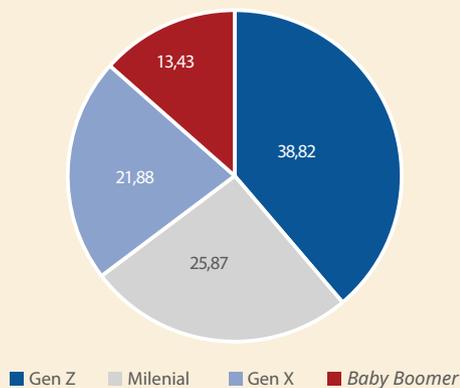
Transisi Demografi Memicu Dinamika Investasi dan Pembiayaan Rumah Tangga

Indonesia telah memasuki fase bonus demografi sejak 2015, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2020-2025. Selama fase ini, rasio ketergantungan¹ (*dependency ratio*) berada di kisaran 45%, mencapai titik terendahnya. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi dalam mencapai tujuan pembangunan yang beragam. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah generasi muda² yang berperan ganda sebagai sektor surplus dan sektor defisit dalam pembiayaan (Grafik B1.1.1). Dilihat dari perilaku konsumsinya, sesuai dengan hipotesis siklus hidup, perilaku konsumsi akan berubah seiring bertambahnya usia. Penduduk cenderung meminjam saat muda, menabung di usia pertengahan, dan mengurangi pengeluaran konsumsi di usia

tua. Oleh karena itu, adanya bonus demografi berpotensi meningkatkan penawaran dan permintaan pembiayaan. Namun, adanya perbedaan perilaku antara generasi muda dan generasi lainnya mengakibatkan fenomena tersebut penting untuk dianalisis lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan dari generasi muda.

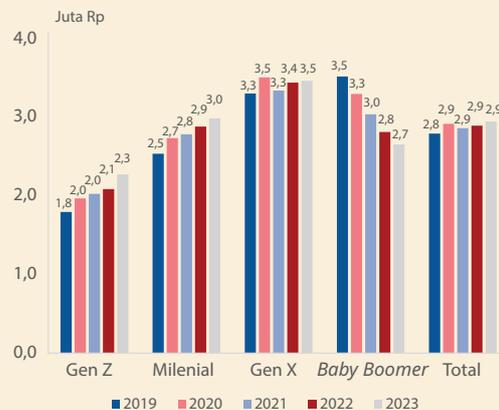
Peningkatan jumlah generasi muda di Indonesia juga mendorong peran dan kontribusi mereka yang semakin besar dalam ekonomi domestik. Dari sisi pendapatan, pendapatan generasi muda masih dalam tren peningkatan, sementara pendapatan Gen X relatif stagnan dan pendapatan generasi *Baby Boomer* menurun (Grafik B1.1.2). Hal ini sejalan dengan profil pekerjaan generasi muda yang sebagian

Grafik B1.1.1 Pangsa Penduduk Indonesia Menurut Generasi



Sumber: Sensus Penduduk 2020, BPS (2021)

Grafik B1.1.2 Pendapatan Individu Menurut Generasi



Sumber: Sakernas, BPS (2023)

1 Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah penduduk yang produktif (yaitu usia kerja).

2 Generasi pada tulisan ini dikelompokkan berdasar tahun lahir: Gen Z (>1996), Milenial (1981-1996), Gen X (1965-1980), dan Baby Boomer (<1965). Generasi muda merupakan istilah yang digunakan untuk Gen Z dan Milenial.

besar sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pendapatan generasi muda yang masih baik mendorong peningkatan konsumsi diindikasikan dari peningkatan *Average Propensity to Consume* (APC) generasi muda sepanjang 2023.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terutama didukung oleh generasi muda dan Gen X, sementara pertumbuhan investasi pada aset keuangan lainnya, seperti obligasi dan saham, didukung oleh generasi *baby boomer*. Pertumbuhan DPK generasi muda dan Gen X (mencakup lebih dari 70% total DPK) mengalami perlambatan sepanjang 2023, yang berdampak pada perlambatan DPK rumah tangga secara keseluruhan (Grafik B1.1.3). Perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan tabungan dan deposito generasi muda. Di saat yang sama, *baby boomer* masih menjadi penopang utama nilai investasi rumah tangga dengan pangsa kepemilikan aset investasi sebesar 65%. Namun, dilihat dari jumlah investor, generasi muda masih mendominasi investasi di pasar modal dengan pangsa sebesar 69%, diikuti oleh gen X sebesar 27% dan *baby boomer* sebesar 5%. Dari sisi nominal, investasi generasi muda tumbuh melambat di 2023, terutama pada instrumen saham, sementara investasi pada obligasi masih cenderung meningkat (Grafik B1.1.4). Selain itu, generasi muda juga menunjukkan minat pada investasi

Grafik B1.1.4 Pertumbuhan Investasi Menurut Generasi



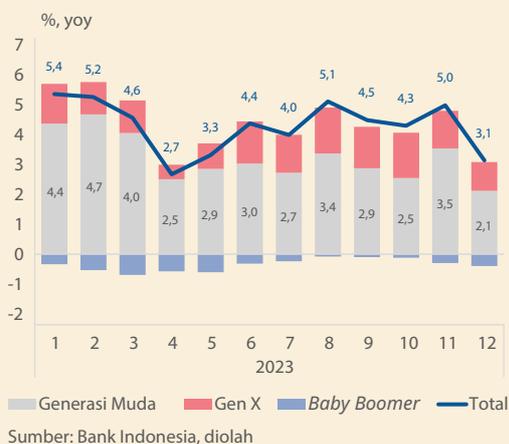
Sumber: Bank Indonesia, diolah

nontradisional seperti kripto, tecermin dari jumlah investor kripto yang lebih dari 80% adalah generasi muda.

Sama seperti DPK, generasi muda menjadi penopang utama pertumbuhan kredit konsumsi dengan risiko yang relatif rendah.

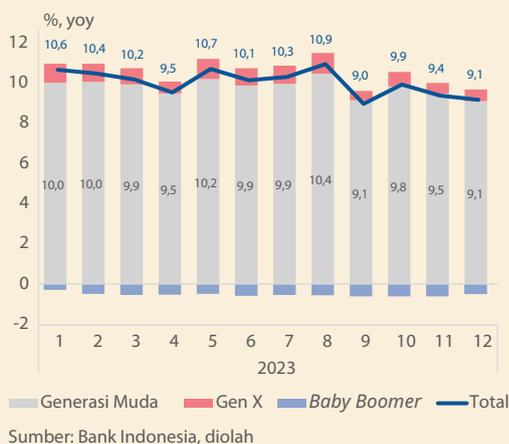
Kredit konsumsi rumah tangga masih tumbuh tinggi sebesar 9,1% (yoy) pada 2023, terutama didukung oleh pertumbuhan kredit konsumsi generasi muda yang masih kuat (Grafik B1.1.5). Kredit konsumsi generasi muda tumbuh sebesar 16,8% (yoy), lebih tinggi dari total pertumbuhan kredit perbankan, terutama berasal dari KPR dan Multiguna yang memiliki pangsa masing-masing sebesar 53% dan 32%. Pertumbuhan kredit konsumsi generasi muda yang tinggi ini diiringi dengan tingkat risiko

Grafik B1.1.3 Pertumbuhan DPK Menurut Generasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B1.1.5. Pertumbuhan KK Menurut Generasi

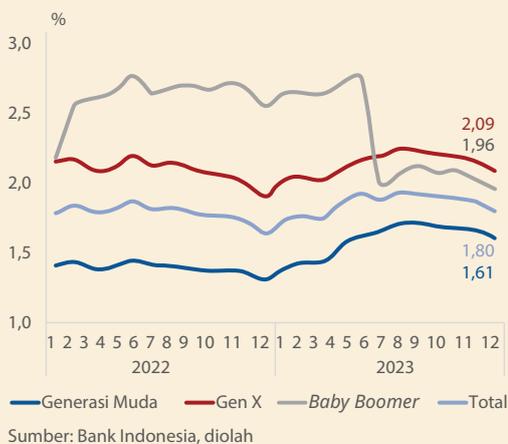


Sumber: Bank Indonesia, diolah

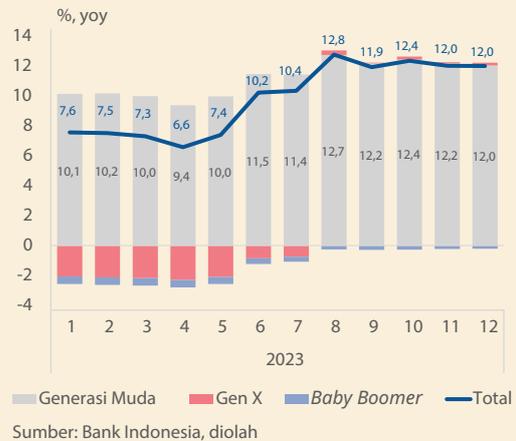
yang paling rendah dibandingkan generasi lainnya, yaitu dengan NPL sebesar 1,61% pada Desember 2023 (Grafik B1.1.6).

Kebutuhan perumahan generasi muda mendorong pertumbuhan KPR yang masih kuat. Hal ini seiring dengan masih besarnya *backlog* perumahan yang dihadapi generasi tersebut terutama akibat adanya *mismatch* pendapatan generasi muda dengan harga rumah yang ditawarkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak generasi muda yang belum memiliki rumah dan menjadi potensi untuk pembiayaan KPR ke depannya. Seiring dengan itu, pada Desember 2023, pertumbuhan KPR mencapai 12% (yoy), peningkatan signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2023 yang hanya sebesar 7,6% (yoy). Mayoritas pertumbuhan ini didukung oleh generasi muda yang berkontribusi sebesar 72% dari total KPR, dengan dominasi tipe rumah adalah rumah tapak, khususnya tipe menengah dan besar (Grafik B1.1.7). Prospek positif KPR juga didukung oleh risiko KPR generasi muda yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi lain. NPL KPR generasi muda pada Desember 2023 tercatat sebesar 1,85%, lebih rendah dibandingkan NPL KPR keseluruhan (2,39%) dan generasi lainnya.

Grafik B1.1.6 NPL Kredit Konsumsi Menurut Generasi



Grafik B1.1.7 Pertumbuhan KPR Menurut Generasi



Bonus demografi berpotensi menjadi katalis untuk pertumbuhan pembiayaan rumah tangga di masa depan. Seiring dengan bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, peran generasi muda dalam ekonomi semakin signifikan. Analisis terkini menunjukkan bahwa perilaku finansial generasi muda mulai mendominasi, baik dalam aspek tabungan maupun pembiayaan konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan respons kebijakan yang efektif untuk memanfaatkan potensi dan memitigasi risiko dari preferensi perilaku finansial dan pembiayaan generasi muda, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan.

BAB 02

INTERMEDIASI TERUS TUMBUH



Kredit pada akhir 2023 tumbuh positif didukung *risk appetite* dan likuiditas perbankan yang memadai. Pertumbuhan kredit perbankan pada 2023 didorong oleh *risk appetite* yang terjaga, tecermin dari Indeks *Lending Standard* (ILS) yang relatif stabil dan Indeks *Lending Requirement* (ILR) yang masih longgar. Pertumbuhan kredit yang positif juga didukung kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, tecermin dari rasio AL/DPK (Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga) yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode 2012-2019. Sejalan dengan perbankan, intermediasi IKNB juga menunjukkan perkembangan yang positif terutama pada perusahaan pembiayaan (PP) dan PT Pegadaian.

Di sisi lain, pertumbuhan DPK relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit. Hal ini berdampak terhadap melebarinya *funding gap* hingga mencapai level tertinggi sejak 2010 dan meningkatnya suku bunga simpanan, yang mengindikasikan kompetisi antar bank yang lebih ketat dalam menarik sumber dana DPK. Meski demikian, di tengah pertumbuhan DPK yang melambat dan kenaikan suku bunga simpanan, sumber dana non-DPK masih relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan likuiditas perbankan yang masih memadai untuk mendukung intermediasi. Ke depan, seiring penyaluran kredit yang terus meningkat dan *excess* likuiditas yang menurun, diperlukan upaya penguatan pendanaan non-DPK sebagai alternatif *funding* untuk menjaga pertumbuhan kredit.

Dari sisi permintaan kredit, kinerja korporasi yang tumbuh positif mendorong permintaan kredit dan pembiayaan. Meski harga komoditas global turut memengaruhi perkembangan transaksi komoditas, kinerja penjualan korporasi masih positif sehingga turut mendorong permintaan kredit korporasi terutama Kredit Modal Kerja. Sementara itu, pertumbuhan kredit investasi masih relatif terjaga seiring investasi korporasi yang masih menunjukkan pertumbuhan positif, meski cenderung tertahan di tengah kondisi *high for longer* dan perilaku *wait-and-see* menyikapi ketidakpastian selama periode menjelang Pemilu 2024.

Terjaganya konsumsi rumah tangga (RT) dan dukungan insentif fiskal mendorong permintaan kredit konsumsi, terutama KPR. Secara agregat, penghasilan RT membaik tecermin dari meningkatnya jumlah penduduk bekerja pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, meski masih didominasi tenaga kerja informal. Peningkatan penghasilan mendorong optimisme konsumsi RT. Terjaganya kinerja RT yang disertai dukungan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) turut berdampak terhadap kenaikan pembelian properti residensial sehingga mendorong meningkatnya permintaan KPR. Tingginya permintaan KPR juga ditopang suku bunga KPR yang masih kondusif di tengah kenaikan suku bunga kebijakan.

2.1 Pertumbuhan Kredit Terjaga

Peran perbankan dalam intermediasi kredit tetap terjaga pada akhir 2023 dengan pertumbuhan kredit yang positif. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 10,38% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,35% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut ditopang kelompok bank BUMN dan BUSN (Grafik 2.1.1), serta jenis penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) yang tumbuh sebesar 10,05% (yoy) (Grafik 2.1.2). Adapun segmen korporasi, yang merupakan segmen dengan pangsa kredit terbesar, tumbuh sebesar 13,52% (yoy) dan menjadi penopang pertumbuhan kredit pada 2023. Sementara berdasarkan sektor ekonomi, hampir seluruh sektor menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif utamanya ditopang oleh sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Lain-lain (Konsumsi).

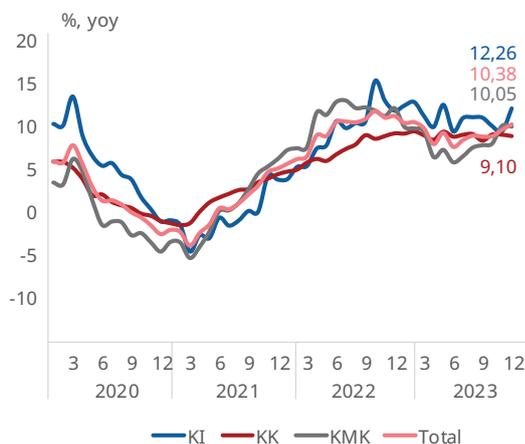
Intermediasi perbankan tumbuh positif sejalan dengan *risk appetite* perbankan yang terjaga. Hal ini tecermin dari Indeks *Lending Standard* (ILS)

Grafik 2.1.1 Kredit per Kelompok Bank



Sumber: Bank Indonesia, diolah

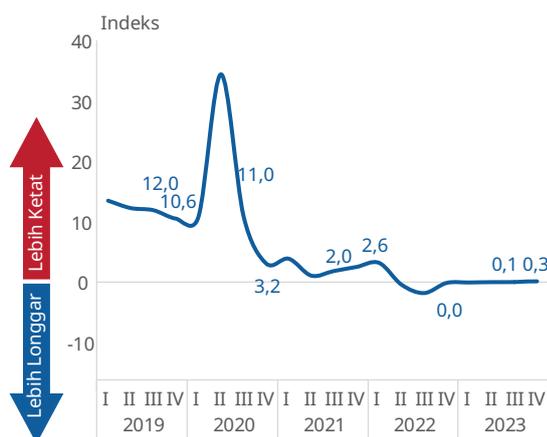
Grafik 2.1.2 Kredit per Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

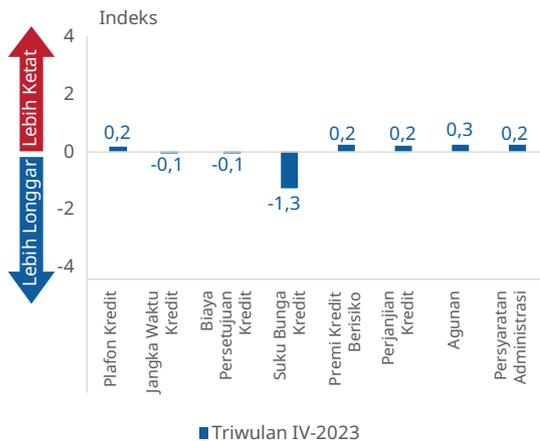
during 2023 relatively stable (Grafik 2.1.3) with credit channeling policy that tends to be more flexible especially on the aspect of credit interest rate, credit term, and credit approval cost (Grafik 2.1.4). In line with

Grafik 2.1.3 Indeks Lending Standard



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.4 Perubahan Aspek Kebijakan Penyaluran Kredit

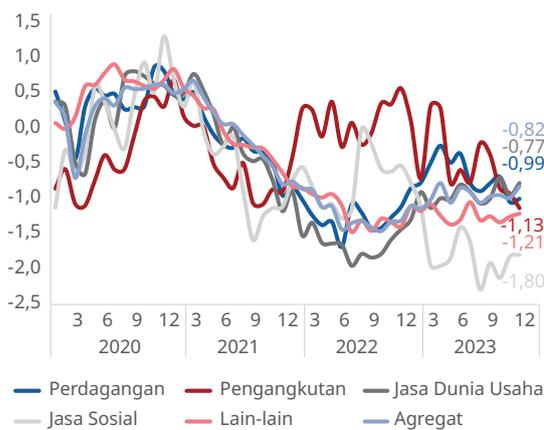


Sumber: Bank Indonesia, diolah

ILS, Indeks *Lending Requirement* (ILR) terindikasi masih tetap longgar di mayoritas sektor ekonomi (Grafik 2.1.5).

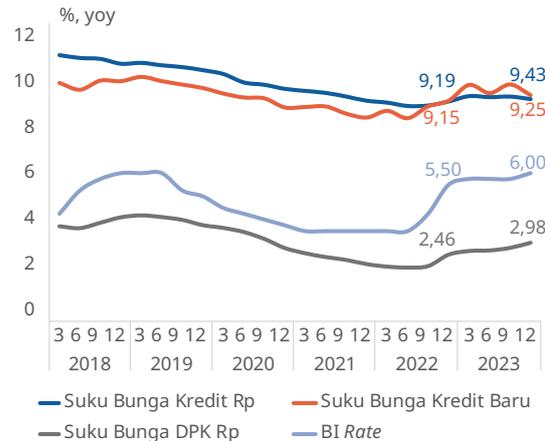
Pertumbuhan kredit yang positif turut didukung suku bunga kredit yang kondusif. Dibandingkan tahun sebelumnya, suku bunga kredit Rupiah dan suku bunga kredit baru Rupiah masing-masing meningkat sebesar 10bps dan 24bps, menjadi sebesar 9,25% dan 9,43% pada akhir 2023 (Grafik 2.1.6). Peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan peningkatan suku bunga kebijakan sebesar 50bps, menjadi 6,0% pada akhir 2023. Sementara itu, suku bunga simpanan Rupiah meningkat sebesar 52bps di

Grafik 2.1.5 Indeks Lending Requirement



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.6 Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK

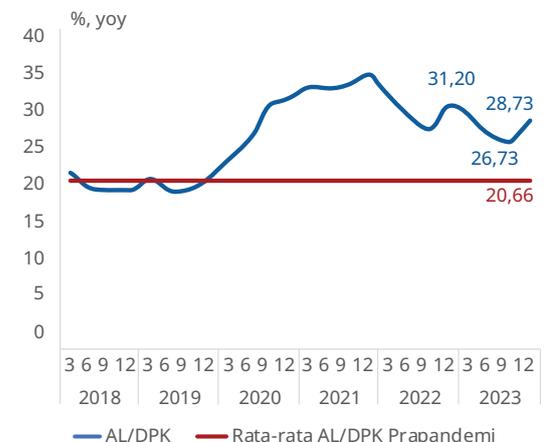


Sumber: Bank Indonesia, diolah

sepanjang tahun 2023 menjadi 2,98% atau lebih responsif terhadap kenaikan suku bunga kebijakan dibandingkan suku bunga kredit.

Likuiditas perbankan masih memadai untuk mendukung intermediasi perbankan. Hal ini tecermin dari rasio AL/DPK pada akhir 2023 yang mencapai 28,73%, jauh di atas ambang batas aman AL/DPK sebesar 10% dan rata-rata periode tahun 2012-2019 sebesar 20,66%, (Grafik 2.1.7). Rasio AL/DPK tersebut sedikit menurun dibanding akhir tahun 2022 didorong oleh penurunan alat likuid dari Rp2.543 triliun menjadi Rp2.429 triliun. Penurunan alat likuid terutama terjadi pada kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) meski

Grafik 2.1.7 Perkembangan AL/DPK



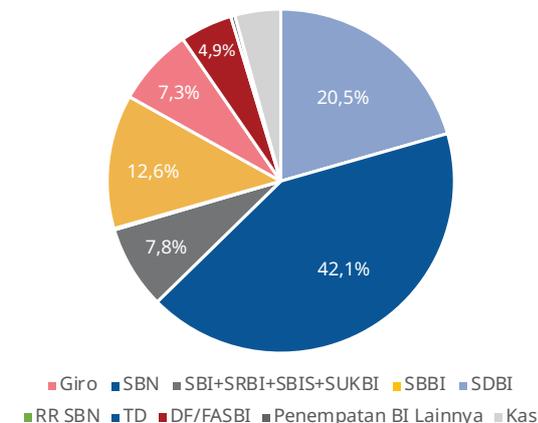
Sumber: Bank Indonesia, diolah

porsinya terhadap total alat likuid perbankan masih dominan yaitu sebesar 42% atau Rp1.331 triliun (Grafik 2.1.8). Hal ini mengindikasikan adanya pemanfaatan SBN oleh bank guna mendukung pertumbuhan kredit.

Dari sisi perbankan syariah, pembiayaan tumbuh kuat dibandingkan kredit konvensional. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2023 tumbuh 15,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit bank umum sebesar 10,38% (yoy) (Grafik 2.1.9). Capaian tersebut disumbang dari meningkatnya pembiayaan modal kerja terutama ke sektor Pengangkutan dan Industri, di tengah tertahannya pembiayaan untuk segmen konsumsi dan investasi, khususnya investasi terkait tambang emas dan tembaga.

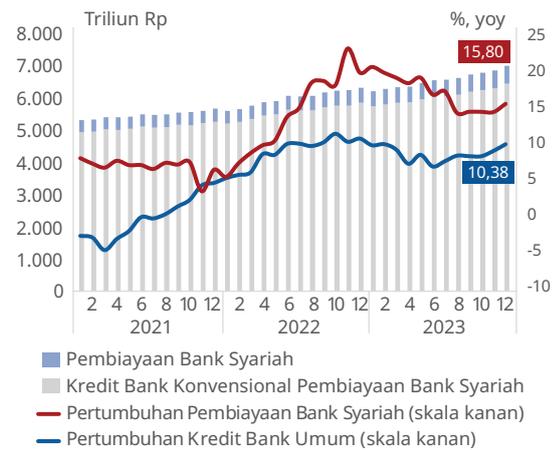
Kinerja intermediasi perbankan syariah turut dikontribusikan oleh pembiayaan sektor unggulan Halal Value Chain (HVC) yang masih tumbuh positif. Sektor unggulan HVC mencakup sektor Pertanian, Makanan-minuman halal, Fesyen muslim (*modest fashion*), dan Pariwisata Ramah Muslim (PRM). Keempat sektor tersebut memiliki peran signifikan dalam pengembangan industri halal nasional dengan pangsa mencapai 22,7% terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan sebesar 3,93% (yoy) pada tahun 2023³. Pembiayaan pada sektor unggulan HVC masih tumbuh

Grafik 2.1.8 Komposisi Alat Likuid Perbankan Posisi Desember 2023



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.9 Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

baik didorong pembiayaan ke sektor fesyen muslim dan PRM, sementara penyaluran ke sektor pertanian dan makanan-minuman halal masih tertahan. Kinerja pertumbuhan pembiayaan tersebut juga diiringi membaiknya risiko dengan menurunnya *non performing financing* (NPF) untuk semua sektor unggulan HVC (Grafik 2.1.10).

Kinerja positif intermediasi juga turut didorong peran IKNB, terutama penyaluran dana Perusahaan Pembiayaan (PP). Meski termoderasi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,18%, pembiayaan PP mampu tumbuh sebesar 13,23% (yoy) pada 2023 atau masih lebih tinggi dibandingkan periode prapandemi pada

Grafik 2.1.10 Pembiayaan Perbankan Syariah ke Sektor Halal Value Chain (HVC)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

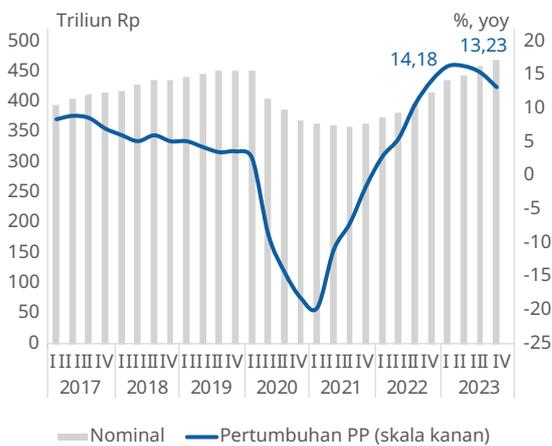
³ Bank Indonesia (2024). Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023, hal. 24 dan 26

2019 (Grafik 2.1.11). Penyaluran pembiayaan PP terutama ditopang oleh kredit kendaraan bermotor yang tumbuh sebesar 15,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pada 2022 sebesar 14,02% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan properti oleh PP turun sebesar 10,95% (yoy) sehingga menahan laju pertumbuhan pembiayaan PP secara agregat.

Sejalan dengan PP, pembiayaan PT Pegadaian dan *fintech lending* mengalami pertumbuhan positif sementara LPEI dan Modal Ventura masih tumbuh negatif. Pembiayaan PT Pegadaian pada 2023 tumbuh sebesar 17,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2022 (Grafik 2.1.12). Demikian juga *fintech lending* menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang masih relatif tinggi sebesar 16,67% (yoy), meski dalam tren perlambatan (Grafik 2.1.13). Pertumbuhan pembiayaan *fintech lending* pada 2023 ditopang oleh pembiayaan konsumtif, terutama dari debitur perorangan, serta didorong oleh masih populernya produk pinjaman tunai (*cash loan*) yang ditawarkan oleh sebagian besar perusahaan *fintech lending*. Di sisi lain, pembiayaan/penyertaan Modal Ventura dan pembiayaan LPEI masih tumbuh negatif masing-

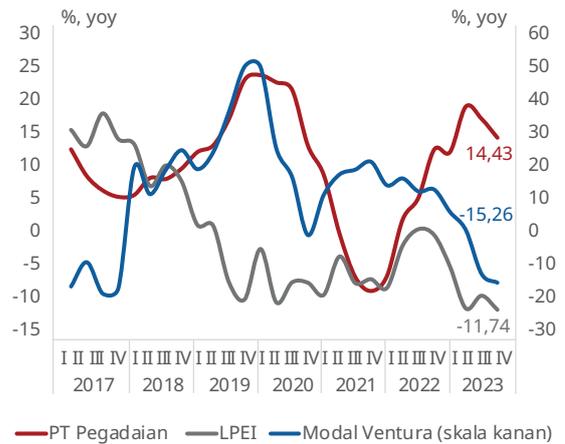
masing sebesar -15,26% (yoy) dan -11,74% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan LPEI terkontraksi seiring dengan penurunan nilai ekspor Desember 2023 sebesar 5,76% dibandingkan dengan Desember 2022. Sementara itu, sebagian Modal Ventura cenderung lebih selektif dalam investasi dan mengutamakan prospek dan sustainability *startup*.

Grafik 2.1.11 Perkembangan Pembiayaan PP



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.1.12 Pembiayaan Pegadaian, LPEI, dan Modal Ventura



Sumber: OJK dan PT Pegadaian, diolah

Grafik 2.1.13 Pertumbuhan Pembiayaan Fintech Lending



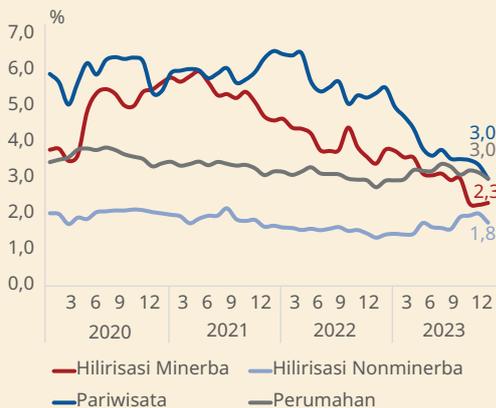
Sumber: OJK, diolah

Boks 2.1

Pemetaan Sektor dengan Daya Ungkit Tinggi yang Berpotensi Didorong Pertumbuhannya Kreditnya

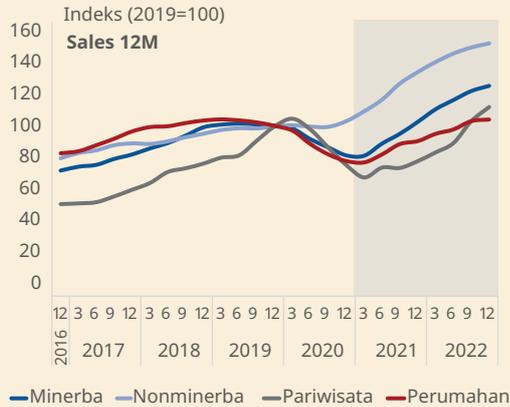
Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan kepada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian. Pada Oktober 2023, Bank Indonesia menerbitkan KLM kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor Hilirisasi Minerba dan Nonminerba, Perumahan, dan Pariwisata sebagai upaya konkrit untuk mendorong sektor berdaya ungkit tinggi serta berpotensi untuk didorong pembiayaannya. Pemetaan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi mengacu pada sinergi prioritas kebijakan dengan Kementerian/Lembaga lain, serta dampak ekonomi yang tinggi. Pertimbangan dampak ekonomi dilakukan dengan melihat besarnya kontribusi terhadap struktur PDB, memiliki *backward* maupun *forward linkage* yang tinggi dengan sektor lainnya, serta memperhatikan kondisi risiko kredit dan kinerja *demand* yang terjaga baik (Grafik B2.1.1 dan B2.1.2).

Grafik B2.1.1 Risiko Kredit Sektor-Sektor yang Memiliki Daya Ungkit Tinggi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.2 Kinerja Penjualan Sektor-Sektor yang Memiliki Daya Ungkit Tinggi



Sumber: Bank Indonesia

Sektor hilirisasi Minerba menjadi sektor yang memiliki potensi besar untuk terus didorong pembiayaannya. Hal tersebut sejalan dengan program hilirisasi pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah industri dan memperkuat struktur ekonomi domestik. Investasi pada sektor Minerba sedang tumbuh pesat, antara lain tecermin dari nilai investasi Industri Logam Dasar, Barang Logam, dan Bukan Mesin dan Peralatannya yang meningkat (177,9%, yoy) dalam kurun waktu empat tahun terakhir (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, 2023). Ke depan, BKPM memprakirakan *demand* investasi pada sektor tersebut masih meningkat, sejalan dengan rencana investasi lima tahun ke depan yang mencapai 153 miliar dolar AS (Grafik B2.1.3). Dari sisi pembiayaan, mayoritas sektor minerba masih ditopang oleh pembiayaan eksternal luar atau Utang Luar Negeri (ULN), sementara pembiayaan dalam negeri masih relatif terbatas. Hal ini terbukti dari pangsa pembiayaan luar negeri dan dalam negeri pada sektor tersebut masing-masing sebesar 86% dan 14% (SULNI, 2023).

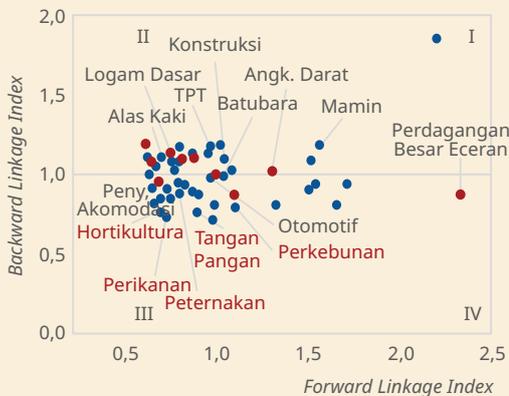
Grafik B2.1.3 PMA Hilirisasi Minerba dan Rencana Investasi 5 Tahun ke Depan



Sumber: BKPM

Sektor hilirisasi nonminerba yang mencakup Pertanian, Peternakan, dan Perikanan juga perlu didorong guna mengoptimalkan backward/forward linkage yang masih terbatas (Grafik B2.1.4). Pembiayaan perbankan untuk sektor hilirisasi nonminerba saat ini masih dapat terus ditingkatkan mengingat nilai pertumbuhan kredit hilirisasi nonminerba pada 2023 (9,09%, yoy) masih lebih rendah dari pertumbuhan kredit industri perbankan (10,38%, yoy). Perlunya dorongan pada sektor tersebut didasari oleh program hilirisasi nonminerba yang saat ini menyasar pada komoditas-komoditas pangan strategis guna mendukung upaya ketahanan pangan

Grafik B2.1.4 Backward/Forward Linkage Sektor Nonminerba



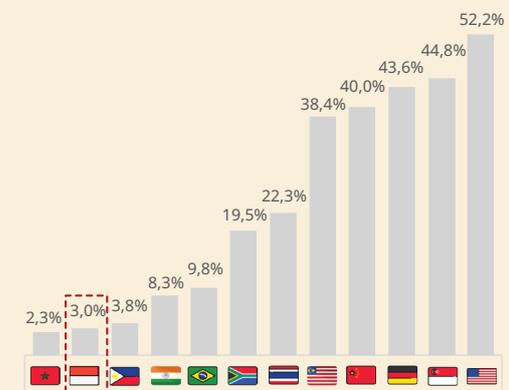
Sumber: IO BPS 2016, diolah

dan pengendalian inflasi. Selain itu, sektor nonminerba juga masih didominasi korporasi kecil yang belum banyak melakukan proses hilirisasi sehingga memerlukan dukungan pembiayaan.

Sektor perumahan merupakan sektor padat modal dan padat karya sehingga dapat mendorong investasi dan menyerap lapangan pekerjaan. Pada 2020, KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat rendah dengan nilai sekitar 3%, jauh dibandingkan negara *peers* lainnya seperti Thailand dan Malaysia yang masing-masing sebesar 22,3% dan 38,4% (Grafik B2.1.5). Hal tersebut mengindikasikan pembiayaan perbankan terhadap sektor perumahan masih dapat terus ditingkatkan. Ke depan, potensi permintaan pembiayaan perumahan diperkirakan masih tinggi seiring dengan kinerja penjualan properti yang tetap positif dan didukung juga dengan terus meningkatnya populasi rumah tangga (RT).

Selanjutnya, sektor pariwisata memiliki keterkaitan yang besar dengan sektor lainnya, misalnya sektor transportasi dan perdagangan. Saat ini, sektor pariwisata yang terindikasi *scarring* yaitu sektor penyedia akomodasi makan dan minum telah mulai

Grafik B2.1.5 Rasio KPR terhadap PDB



Sumber: CEIC, diolah

pulih. Pemulihan tecermin dari jumlah wisatawan yang meningkat (Grafik B2.1.6) sehingga *occupation rate* hotel juga meningkat. Ke depan, pemulihan sektor Pariwisata dapat terus didorong sejalan dengan kebijakan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh Pemerintah.

Grafik B2.1.6 Jumlah Perjalanan Wisnus Domestik



Sumber: BPS, diolah

Bank Indonesia akan terus memperkuat dorongan pembiayaan kepada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi melalui evaluasi berkala efektivitas kebijakan KLM. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui evaluasi sektor berdasarkan asesmen dari sisi *supply* dan *demand*, serta besaran insentif likuiditas yang diberikan pada masing-masing sektor tersebut. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait melalui harmonisasi kebijakan, penguatan koordinasi stimulus makroprudensial-fiskal, serta penguatan koordinasi dengan Pemda untuk mendorong penguatan *demand* dan *supply*.

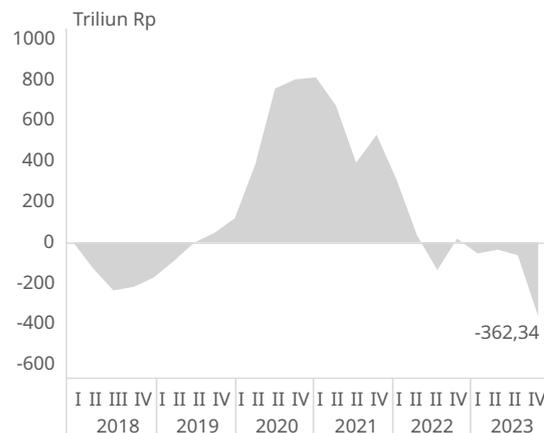
2.2

Tantangan Kapasitas *Lending* ke Depan

DPK tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit. Pada 2023, DPK tumbuh sebesar 3,73% (yoy), lebih lambat dibandingkan pada 2022 sebesar 9,01% (yoy) maupun pertumbuhan kredit tahun 2023. Pertumbuhan DPK yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit menyebabkan jarak antara volume penyaluran kredit dan volume penghimpunan DPK melebar. Hal tersebut tercermin pada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang meningkat dari sebesar 78,78% pada 2022 menjadi sebesar 83,83% pada 2023 (Grafik 2.2.1). Dengan perkembangan tersebut, *funding gap*⁴ pada akhir 2023 melebar hingga mencapai level tertinggi sejak 2010 yaitu sebesar Rp362 triliun (Grafik 2.2.2).

Fenomena perlambatan pertumbuhan DPK mendorong peningkatan suku bunga simpanan. Secara umum, suku bunga CASA, yakni *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan), dan deposito mengalami kenaikan yang mengindikasikan peningkatan kompetisi

Grafik 2.2.2 Perkembangan *Funding Gap*



Sumber: Bank Indonesia, diolah

antar bank dalam menarik sumber dana DPK. Peningkatan suku bunga CASA 15bps menjadi 1,44% (2023) utamanya terefleksi pada suku bunga giro yang meningkat 29bps menjadi 2,20% (2023). Di sisi lain, suku bunga deposito meningkat lebih tajam sebesar 99bps menjadi 5,13% (2023). Meski masih di bawah level prapandemi, suku bunga deposito telah melampaui suku bunga penjaminan LPS untuk bank umum yaitu 4,25% (Grafik 2.2.3).

Grafik 2.2.1 Perkembangan DPK, Kredit, dan LDR

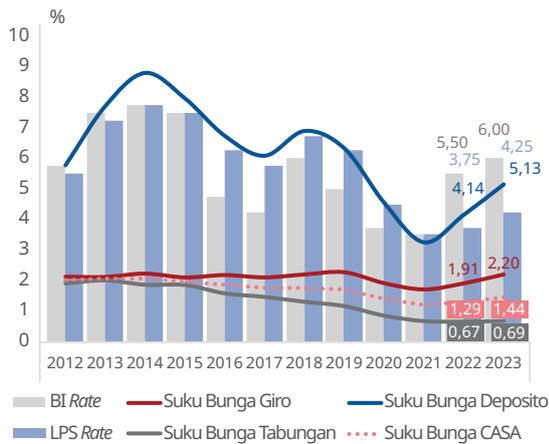


Sumber: Bank Indonesia, diolah

⁴ *Funding surplus/gap* dihitung dari delta DPK yang dikumpulkan oleh bank dikurangi dengan delta kredit yang disalurkan bank pada tahun berjalan. *Funding gap* mencerminkan jumlah dana yang dibutuhkan bank untuk menutup keperluan intermediasinya, sementara *funding surplus* mencerminkan jumlah kelebihan dana yang dimiliki bank relatif terhadap penyaluran kreditnya.

Di tengah pertumbuhan DPK yang melambat, sumber dana non-DPK masih relatif stabil. Sumber dana non-DPK, yang terdiri dari PYD dan SSB, mencapai sebesar Rp407 triliun pada tahun 2023 atau relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp408 triliun. Dari sisi komposisi, PYD meningkat sebesar 5,13% (yoy) dari Rp293 triliun pada 2022 menjadi Rp308 triliun pada 2023. Nilai *outstanding* SSB mengalami penurunan dari Rp115 triliun menjadi Rp99 triliun (Grafik 2.2.4), sejalan dengan nilai SSB jatuh tempo yang lebih besar dibandingkan nilai penerbitan

Grafik 2.2.3 Perkembangan Suku Bunga DPK dan Suku Bunga Kebijakan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

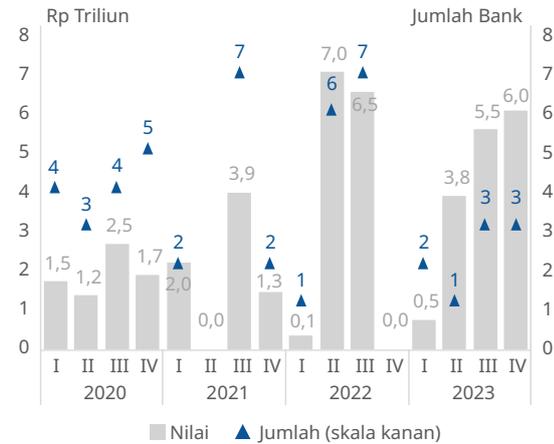
Grafik 2.2.4 Perkembangan Sumber Dana Non-DPK



Sumber: Bank Indonesia, diolah

EBUS (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk). Meski lebih rendah dibandingkan nilai SSB jatuh tempo, nilai penerbitan EBUS meningkat 15,8% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai penghimpunan dana sebesar Rp15,7 triliun (Grafik 2.2.5). Penerbitan EBUS terutama dilakukan pada Semester II 2023 sejalan dengan peningkatan

Grafik 2.2.5 Perkembangan Penerbitan EBUS Perbankan

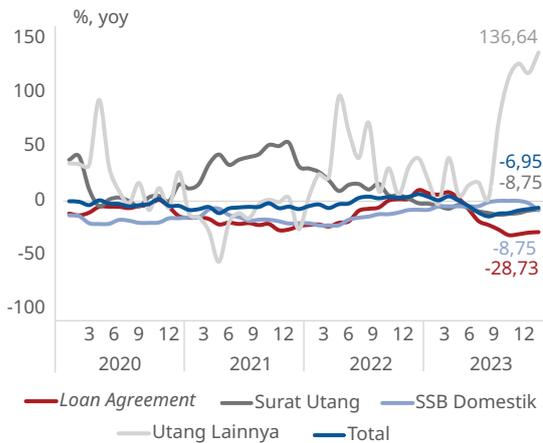


Sumber: KSEI, diolah

kebutuhan pendanaan. Nilai penerbitan yang lebih tinggi juga didorong oleh penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) oleh bank di pasar global.

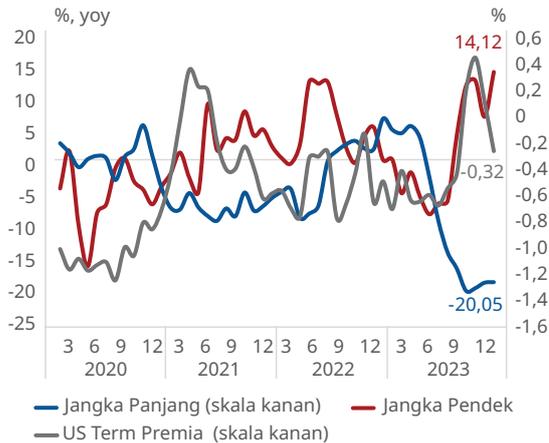
Dari sisi ULN perbankan, terdapat pergeseran dari tenor panjang ke pendek pada akhir 2023. Pertumbuhan ULN perbankan pada 2023 melambat dan terjadi di hampir seluruh kelompok bank. Hal tersebut dipengaruhi kondisi suku bunga global yang lebih tinggi seiring kenaikan FFR. Meski demikian, kontraksi ULN bank relatif melambat pada akhir 2023 didorong peningkatan penarikan ULN jangka pendek. Berdasarkan jenis instrumen, peningkatan tersebut terutama didorong oleh utang lainnya dengan pertumbuhan sebesar 136,64% (yoy) pada tahun 2023 dengan pangsa terhadap total ULN bank sebesar 21,27% (Grafik 2.2.6). Tren pergeseran ke ULN jangka pendek dari ULN jangka panjang pada 2023 turut didorong oleh premi risiko jangka panjang yang tinggi seiring kondisi ketidakpastian pasar keuangan dunia (Grafik 2.2.7).

Grafik 2.2.6 Perkembangan ULN Perbankan berdasarkan Jenis Instrumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

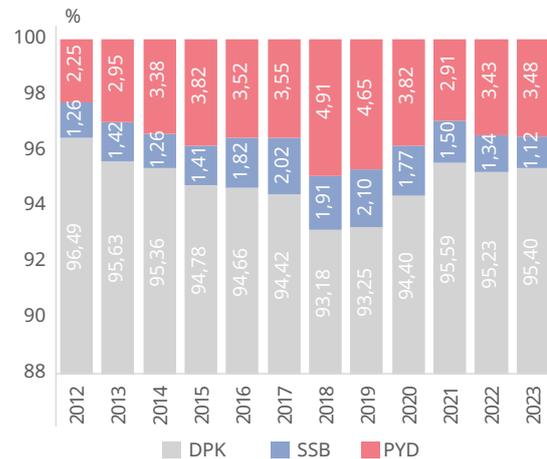
Grafik 2.2.7 Perkembangan ULN berdasarkan Tenor (original maturity)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ke depan, sumber dana non-DPK perbankan perlu diperkuat seiring kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat. Pada akhir 2023, DPK mencapai 95% dari total pendanaan bank atau sebesar Rp8.458 triliun. Sementara di sisi non-DPK, sumber pendanaan SSB yang diterbitkan dan PYD masing-masing pangasanya hanya mencapai 1,12% (Rp99 triliun) dan 3,48% (Rp308 triliun) dari total pendanaan bank (Grafik 2.2.8). Sejalan dengan excess likuiditas perbankan yang menurun serta masih rendahnya porsi sumber dana non-DPK sebagai alternatif *funding*, maka diperlukan penguatan pendanaan non-DPK guna mendukung pertumbuhan kredit ke depan.

Grafik 2.2.8 Perkembangan DPK, SSB, dan Pinjaman Yang Diterima



Sumber: Bank Indonesia, diolah

2.3

Kinerja Korporasi dan Rumah Tangga yang Tumbuh Positif, Mendorong Permintaan Kredit dan Pembiayaan

Pada 2023, kinerja korporasi masih tumbuh positif meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara agregat, kinerja korporasi mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 1,74% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut salah satunya dikontribusikan oleh sektor pertanian dan pertambangan yang mengalami kontraksi pertumbuhan penjualan yaitu masing-masing sebesar 2,41% (yoy) dan 9,52% (yoy) akibat tren perlambatan harga komoditas global (Tabel 2.3.1). Perlambatan penjualan juga turut menahan tingkat *Return on Equity* (ROE) korporasi yaitu sebesar 10,65% pada 2023, lebih rendah dibandingkan pada 2022 sebesar 15,61%. Sementara itu, investasi korporasi tumbuh positif

meski cenderung tertahan seiring kondisi *high for longer* dan perilaku *wait-and-see* menyikapi ketidakpastian selama periode menjelang Pemilu 2024, sejalan dengan pola historisnya pada 2014 dan 2019 (Grafik 2.3.1).

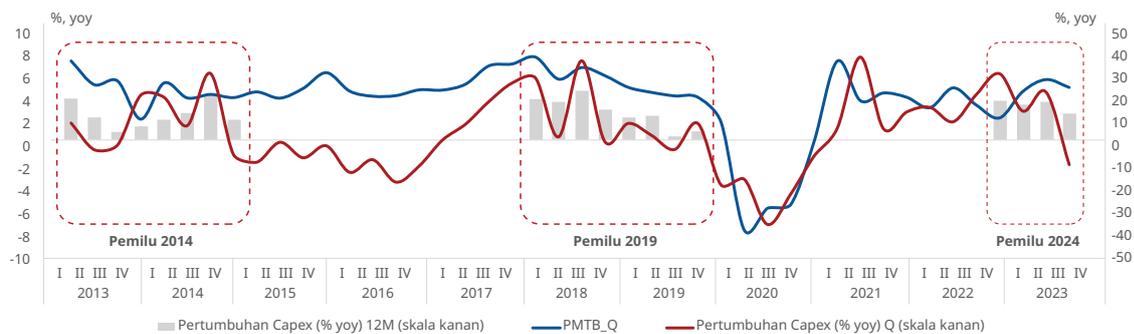
Kinerja korporasi yang tetap terjaga berdampak positif terhadap pembiayaan korporasi. Harga komoditas yang terfragmentasi pada berbagai negara tujuan perdagangan memengaruhi perkembangan transaksi komoditas, terutama sektor pertanian dan energi (Grafik 2.3.2). Namun demikian, dampak pada sisi pembiayaan korporasi masih relatif terbatas. Hal tersebut tecermin dari permintaan pembiayaan korporasi yang menunjukkan perbaikan, terutama pada KMK,

Tabel 2.3.1 Kinerja Penjualan, Profitabilitas, dan Capex Korporasi Tbk. menurut Sektor

Sektor	Pertumbuhan Penjualan (%yoy)					Tren 2020 - 2023	Kontribusi Penjualan (%)	Return on Equity (%)					Tren 2020 - 2023	Pertumbuhan Capex (%yoy)					Tren 2020 - 2023			
	2020		2021		2022			2023	2020		2021			2022	2023	2020		2021		2022	2023	
	Des	Des	Des	Jun	Des			Des	Des	Des	Jun	Des		Des	Des	Des	Des	Des		Jun	Des	
Pertanian	11,03	37,87	14,59	-2,87	-2,41		-0,11	4,80	11,18	14,52	8,29	4,75	-19,66	-9,08	32,15	21,54	2,20					
Pertambangan	-17,55	44,96	67,33	32,24	-9,52		-1,59	3,71	22,67	36,93	29,87	19,24	-39,89	30,27	61,93	47,47	9,91					
Industri	-10,85	18,31	12,09	4,52	3,39		1,41	8,51	8,65	9,45	9,31	10,20	-35,59	2,80	13,71	18,28	15,60					
LGA	-22,54	4,47	19,32	16,42	12,76		0,25	-3,54	9,40	9,49	8,49	8,08	18,76	7,23	-39,54	-27,20	10,39					
Konstruksi	-31,33	8,94	14,73	11,24	4,98		0,27	-4,94	1,97	1,98	2,15	2,00	-21,89	59,19	-29,19	-20,59	14,08					
Perdagangan	-18,98	17,71	26,56	16,33	5,35		0,88	1,29	10,89	18,69	18,73	15,81	-31,63	-11,19	57,00	71,78	53,26					
Pengangkutan	-15,66	5,25	19,98	16,80	9,81		0,93	-9,09	-14,93	37,76	13,32	16,51	-17,21	-3,95	-2,02	5,13	-6,20					
Jasa Dunia Usaha	-16,32	19,67	17,84	5,18	-0,04		0,00	-3,91	0,87	6,75	-6,18	3,89	-33,72	35,31	-9,65	-20,25	16,36					
Jasa Sosial	-4,06	19,31	1,16	0,05	-4,16		-0,09	4,62	9,14	6,11	3,71	2,24	-14,35	-12,22	13,60	8,01	5,45					
Agregat	-14,47	20,00	22,72	11,94	1,74		1,74	2,42	7,81	15,61	11,93	10,65	-26,82	6,04	9,36	15,95	9,24					

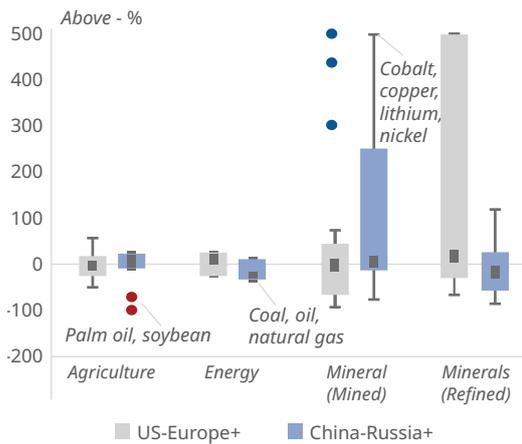
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 2.3.1 Pertumbuhan Capex dan PMTB selama Periode Pemilu



Sumber: Bloomberg dan BPS, diolah

Grafik 2.3.2 Fragmentasi Harga per Komoditas



Sumber: IMF WEO

sejalan dengan penjualan korporasi yang masih tumbuh positif. Secara sektoral, permintaan KMK sebagian besar dikontribusikan oleh sektor pertambangan, perdagangan dan jasa dunia usaha. Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan Capex yang masih positif, pertumbuhan Kredit Investasi tetap terjaga dengan kontribusi sektoral didominasi oleh sektor Pertambangan, Industri Makanan dan minuman, serta Perdagangan.

Kinerja korporasi yang positif turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan terjaganya konsumsi rumah tangga. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari 135,5 juta pada 2022 menjadi 139,9 juta pada 2023. Jumlah tenaga kerja masih didominasi oleh tenaga kerja informal, meskipun secara pangsa sedikit menurun (Grafik 2.3.3). Kontribusi peningkatan

Grafik 2.3.3 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal



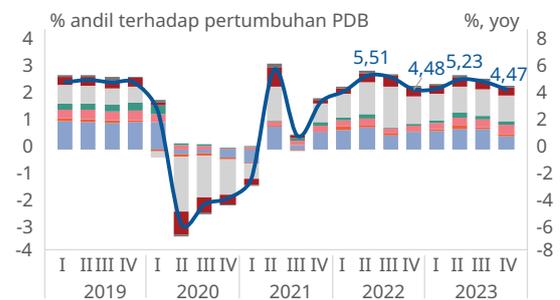
Sumber: BPS, diolah

jumlah tenaga kerja pada 2023 terutama didorong oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seiring dengan normalisasi mobilitas masyarakat, serta sektor Konstruksi, dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kondisi tersebut berbeda dari 2022, dengan penyerapan tenaga kerja utamanya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan.

Konsumsi rumah tangga (RT) masih terjaga seiring optimisme masyarakat yang meningkat.

Meski sedikit melambat dibandingkan 2022 yang tumbuh sebesar 4,94% (yoy), konsumsi RT pada 2023 relatif terjaga sebesar 4,82% (yoy). Konsumsi RT masih dikontribusikan oleh kelompok pengeluaran Transportasi dan Komunikasi; Makanan dan Minuman; serta Restoran dan Hotel (Grafik 2.3.4). Pertumbuhan konsumsi RT yang terjaga sejalan dengan meredanya tekanan inflasi pada 2023 dan optimisme masyarakat yang masih meningkat, tecermin dari tren positif berbagai Indeks, yaitu Ekspektasi Penghasilan, Ekspektasi

Grafik 2.3.4 Perkembangan Konsumsi RT



Perawatannya Makanan Minuman, selain Restoran; Perumahan dan Perlengkapan RT; Transportasi dan Komunikasi; Pakaian, Alas Kaki dan Jasa; Kesehatan dan Pendidikan; Konsumsi RT (skala kanan); Restoran dan Hotel; Lainnya

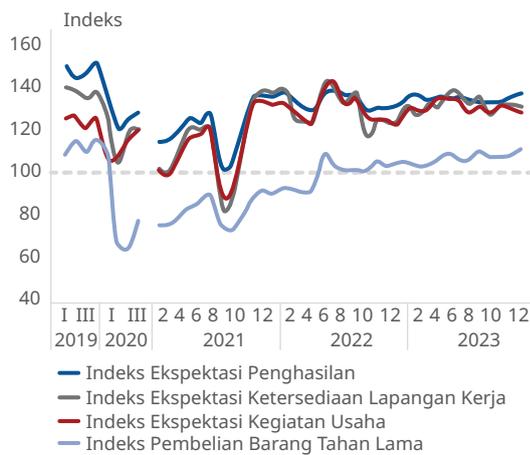
Sumber: BPS, diolah

Ketersediaan Lapangan Kerja, Ekspektasi Kegiatan Usaha, dan Pembelian Barang Tahan Lama termasuk properti (Grafik 2.3.5). Kondisi masih kuatnya konsumsi dan penghasilan RT tersebut mendorong tingginya permintaan kredit konsumsi RT, terutama KPR.

Terjaganya kinerja RT yang disertai dukungan kebijakan PPN ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) turut berdampak terhadap kenaikan pembelian properti residensial. Penjualan rumah di pasar primer terus menunjukkan perbaikan dan telah tumbuh positif sebesar 3,37% (yoy) pada Triwulan IV 2023. Perbaikan penjualan rumah terutama didorong oleh penjualan tipe rumah menengah dan rumah besar masing-masing sebesar 6,29% (yoy) dan 19,93% (yoy). Pertumbuhan penjualan tersebut berdampak terhadap berlanjutnya kenaikan harga rumah pada Triwulan IV 2023 sebesar 1,74% (yoy). Membaiknya penjualan rumah di pasar primer juga didukung oleh kebijakan insentif fiskal PPN-DTP yang berlaku sejak November 2023 hingga Desember 2024. Insentif ini membebaskan pembeli dari pembayaran PPN untuk rumah dan apartemen baru dengan harga maksimal Rp5 miliar, dengan pengenaan PPN-DTP diperhitungkan untuk harga hingga Rp2 miliar. Insentif PPN DTP tersebut diharapkan dapat menjadi katalis bagi kinerja developer dan korporasi di sektor properti, termasuk sebagai stimulus dalam memperoleh pembiayaan perbankan.

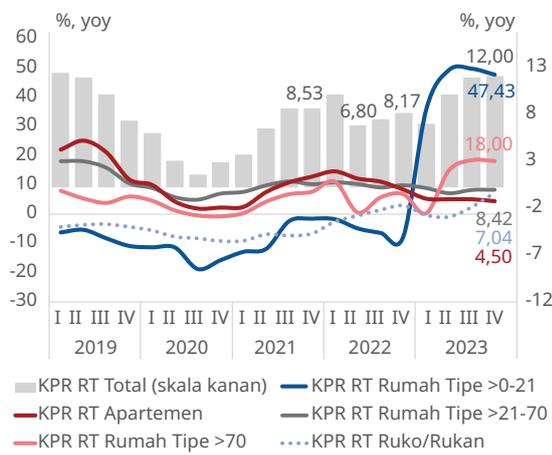
Sejalan dengan penjualan rumah yang meningkat, permintaan terhadap pembiayaan properti juga meningkat sepanjang 2023. Pembelian melalui KPR mendominasi minat konsumen pembeli properti, yaitu sekitar 76%⁵. Selama 2023, KPR tumbuh cukup kuat sebesar 12,00% (yoy), tertinggi sejak 2019 (Grafik 2.3.6). Pertumbuhan KPR terutama didorong oleh KPR rumah tapak tipe menengah (21<tipe≤70), diikuti oleh rumah tapak tipe besar (tipe>70). Permintaan KPR yang masih tinggi juga ditopang oleh masih stabilnya suku bunga KPR di tengah suku bunga kebijakan yang meningkat (Grafik 2.3.7).

Grafik 2.3.5 Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen



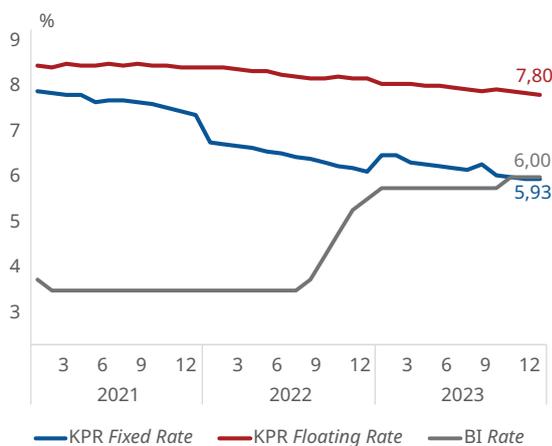
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.6 Perkembangan KPR Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.7 Perkembangan Suku Bunga KPR



Sumber: Bank Indonesia, diolah

⁵ Bank Indonesia. (2024). *Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer - Triwulan IV 2023* [Data set].

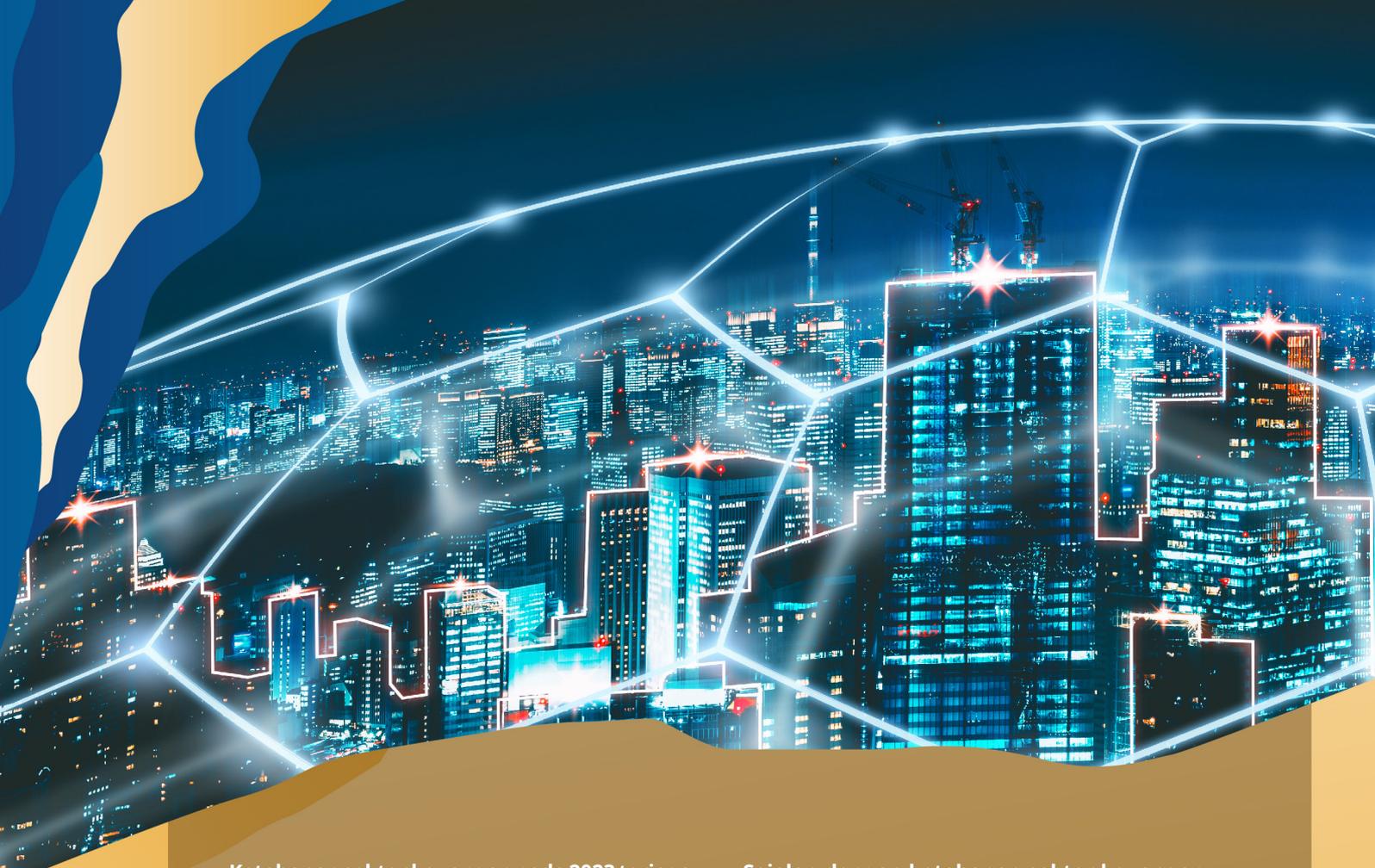


BANK INDONESIA

BAB 03

**SSK TERJAGA
DENGAN KETAHANAN
KUAT DI TENGAH
KETIDAKPASTIAN**





Ketahanan sektor keuangan pada 2023 terjaga, sejalan dengan risiko kredit yang menurun, permodalan yang kuat, dan likuiditas yang *ample*. Risiko kredit perbankan menurun dipengaruhi membaiknya kemampuan bayar debitur dan terbatasnya dampak berakhirnya program relaksasi kredit restrukturisasi. Perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian guna mengantisipasi potensi risiko ke depan dan menjaga tingkat permodalan yang tinggi. Ketahanan perbankan juga didukung kondisi likuiditas yang tetap terjaga di tengah meningkatnya intermediasi. Dari sisi Industri Keuangan NonBank (IKNB), ketahanan tecermin dari risiko pembiayaan yang terjaga, permodalan yang memadai, serta kinerja yang positif. Tingkat interkoneksi antara bank dan IKNB masih rendah, sehingga potensi rambatan risiko antara keduanya diperkirakan relatif terbatas. Di sisi lain, risiko terhadap sektor keuangan semakin berkembang seiring dengan pesatnya digitalisasi layanan keuangan dan kerentanannya terhadap risiko siber. Penguatan ketahanan dan keamanan siber bagi penyelenggara layanan keuangan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia menjadi krusial dalam mengantisipasi risiko sektor keuangan digital.

Sejalan dengan ketahanan sektor keuangan, *repayment capacity* (kemampuan bayar) korporasi, dan rumah tangga pada 2023 terjaga baik. Kondisi suku bunga tinggi dan penurunan harga komoditas memengaruhi kinerja korporasi secara terbatas. Kemampuan bayar korporasi masih terjaga, ditopang kondisi likuiditas yang memadai. Ketahanan korporasi juga tecermin dari ICR yang memadai, PD korporasi yang masih relatif lebih baik dari rata-rata historis, serta terjaganya rasio utang berisiko (DAR). *Excess saving* korporasi yang menurun pada beberapa sektor berpotensi membuka ruang permintaan kredit. Ketahanan korporasi yang masih kuat diperkirakan mampu menahan *external spillover* dari dinamika global dari perlambatan ekonomi dan krisis properti Tiongkok. Sama halnya dengan masih kuatnya ketahanan korporasi, ketahanan rumah tangga juga masih terjaga didukung kemampuan bayar yang stabil dengan tingkat DSR yang relatif baik, serta peningkatan pendapatan.

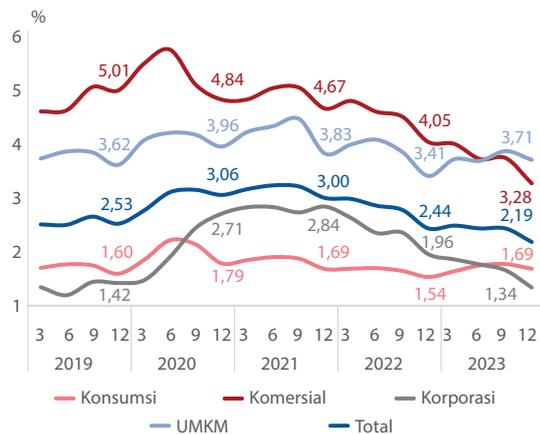
3.1

Ketahanan Sektor Keuangan Terjaga seiring Risiko yang Terkendali

Berlanjutnya pemulihan perekonomian nasional dan terus membaiknya sektor riil berdampak pada menurunnya risiko kredit perbankan. Risiko kredit terjaga rendah pada semua segmen debitur, baik korporasi, komersial, konsumsi, dan UMKM, tecermin dari rasio NPL bruto pada 2023 yang berada di bawah 5%. Rasio NPL bruto secara agregat tercatat sebesar 2,19% pada 2023, menurun dari 2022 dan terendah dalam lima tahun terakhir. (Grafik 3.1.1).

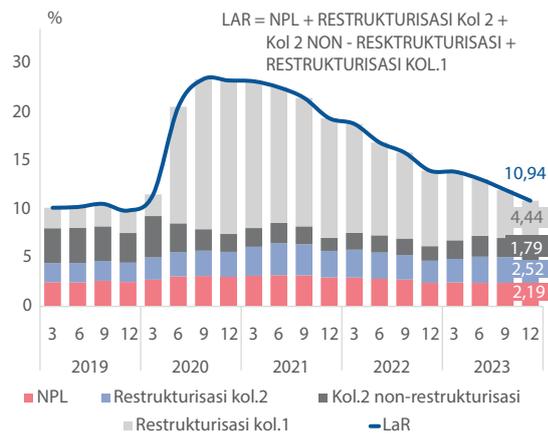
Risiko kredit yang terkendali juga tecermin dari penurunan rasio *Loan at Risk* (LaR). Rasio LaR tercatat sebesar 10,94% pada 2023. Rasio tersebut terendah dalam tiga tahun terakhir dan telah mendekati level sebelum pandemi, yaitu sebesar 9,93% pada 2019 (Grafik 3.1.2). Tren penurunan LaR didorong penurunan kredit restrukturisasi yang terjadi pada semua segmen (Grafik 3.1.3), sejalan

Grafik 3.1.1 Perkembangan NPL Bruto Berdasarkan Segmen



Keterangan:
 Kredit Korporasi : kredit dengan plafon > Rp 100 M, tidak termasuk kredit UMKM dan Konsumsi.
 Kredit Komersial : kredit dengan plafon < Rp 100 M, tidak termasuk kredit UMKM dan Konsumsi.
 Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.2 Perkembangan Komposisi Loan at Risk (LaR) Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

dengan membaiknya kemampuan bayar debitur yang mengikuti program kredit restrukturisasi⁶.

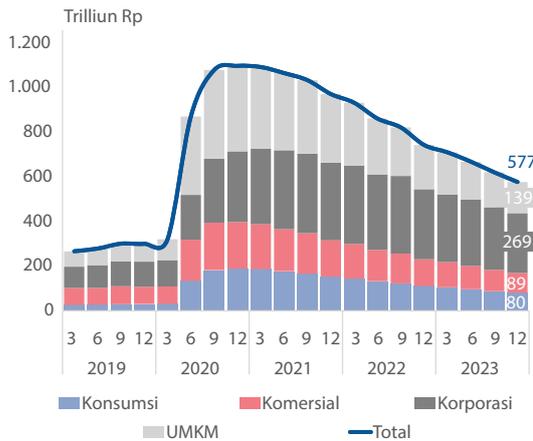
Berakhirnya program relaksasi kredit restrukturisasi⁷ berdampak terbatas. Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan secara *targeted* dan sektoral⁸ yang berlaku hingga 31

6 Melalui POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

7 Melalui POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

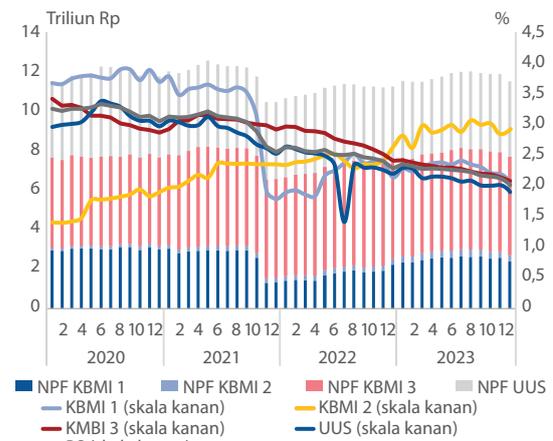
8 Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2022 Tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank

Grafik 3.1.3 Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.4 Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Maret 2024 menyebabkan penurunan kualitas kredit pada debitur terdampak Covid-19, khususnya debitur yang tidak memenuhi syarat fasilitas perpanjangan sesuai kebijakan tersebut. Penurunan kualitas tersebut terindikasi dari peningkatan nominal NPL di beberapa sektor ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sektor Pertanian, Konstruksi, Jasa Sosial, dan Lain-lain⁹. Meski demikian, rasio NPL untuk semua sektor ekonomi masih terjaga di bawah 5% (Tabel 3.1.1).

Sejalan dengan tren industri, risiko kredit perbankan syariah juga mengalami penurunan. Rasio NPF perbankan syariah turun menjadi 2,03% pada 2023 dari 2,30% pada bulan Desember 2022 (Grafik 3.1.4). Penurunan NPF terutama terjadi

pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 serta Unit Usaha Syariah (UUS). Perbaikan kualitas pembiayaan tersebut didukung oleh kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan yang diperpanjang hingga Maret 2024. Tren menurunnya NPF sejak 2021 juga menunjukkan kinerja perbankan syariah yang semakin resilien terutama pasca berakhirnya pandemi Covid-19.

Perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian guna mengantisipasi potensi risiko ke depan. Meski risiko kredit menurun, bank tetap membentuk CKPN yang relatif tinggi dan menjaga tingkat permodalannya. Rasio CKPN terhadap NPL dan LaR pada 2023 masing-masing sebesar 214,66% dan 42,89% (Grafik 3.1.5). Rasio permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*)

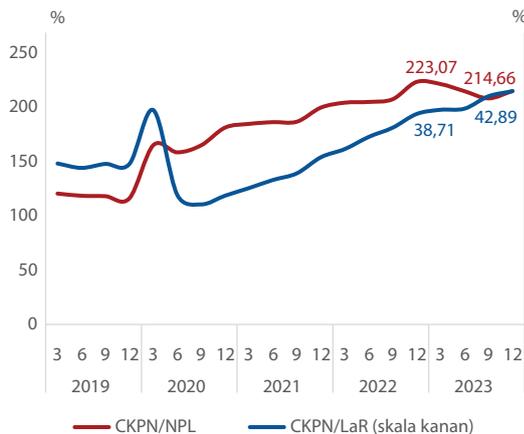
Tabel 3.1.1 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor

Sektor Ekonomi	NPL (bruto) (%)				Nominal NPL				
	2019	2020	2021	2022	2023		Δ YOY (Rp T)		Pangsa (%)
					Jun	Des	2022	2023	
1. Pertanian	1,66	2,08	1,74	1,60	2,03	2,00	0,06	2,74	6,69
2. Pertambangan	3,58	7,26	4,42	2,42	2,41	1,23	-1,04	-2,19	2,30
3. Industri	3,88	4,58	5,18	3,77	3,67	3,26	-9,06	-3,80	23,48
4. Listrik, gas, air	0,89	1,24	1,04	0,47	0,45	0,36	-0,91	-0,10	0,43
5. Konstruksi	3,55	3,45	3,62	3,55	3,64	3,62	0,32	0,20	9,22
6. Perdagangan	3,66	4,54	4,33	3,79	3,58	3,24	-3,08	-3,20	26,52
7. Pengangkutan	1,64	2,16	2,07	1,63	1,10	1,01	-1,23	-1,34	2,43
8. Jasa Dunia Usaha	1,43	1,92	2,11	1,38	1,38	1,13	-1,81	-0,31	5,31
9. Jasa Sosial	1,50	2,17	1,54	1,43	1,50	1,39	0,27	0,94	2,54
10. Lain-lain	1,60	1,80	1,69	1,54	1,75	1,69	-0,21	5,45	21,09
Total	2,53	3,06	3,00	2,44	2,44	2,19	-16,69	-1,60	100

Sumber: Bank Indonesia, diolah

9 Sektor lain-lain didominasi kredit konsumsi

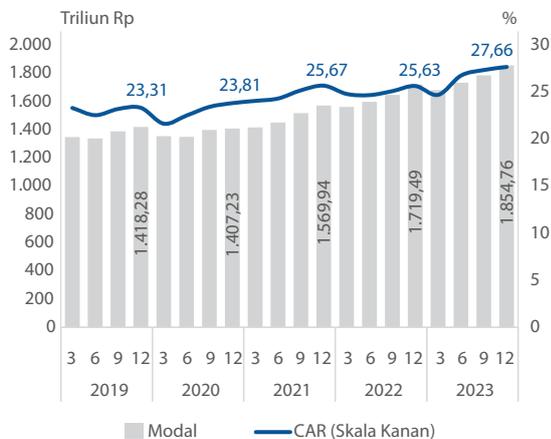
Grafik 3.1.5 Perkembangan Coverage CKPN terhadap Risiko Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

perbankan pada 2023 sebesar 27,66%, lebih tinggi dibandingkan dengan 2022 (Grafik 3.1.6). Selain itu, persentase modal inti terhadap total modal perbankan juga tercatat tinggi, yakni 94,09% (Grafik 3.1.7). Uji ketahanan (*stress test*) perbankan dengan menggunakan skenario makroekonomi *adverse*¹⁰ menunjukkan NPL masih di bawah 5%

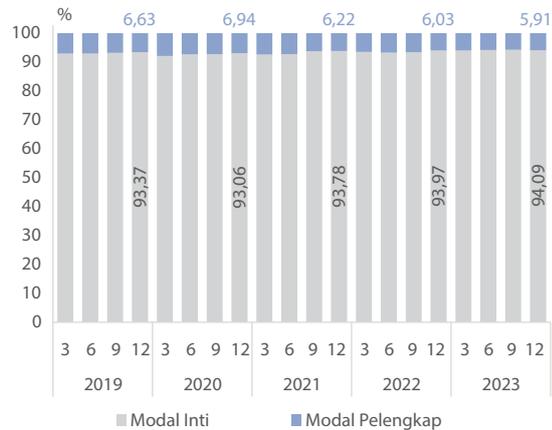
Grafik 3.1.6 Perkembangan Permodalan



Sumber: OJK, diolah

10 Mempertimbangkan berakhirnya perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan secara targeted dan sektoral pada Maret 2024 sebagaimana Siaran Pers OJK (SP 85/DHMS/OJK/XI/2022) tentang OJK Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Secara Targeted dan Sektoral Atasi Dampak Lanjutan Pandemi COVID hingga 31 Maret 2024

Grafik 3.1.7 Perkembangan Komposisi Modal



Sumber: OJK, diolah

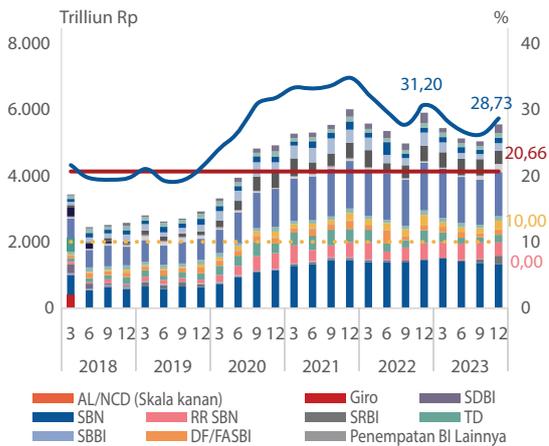
dengan CAR industri diproyeksikan masih di atas 20%. Hasil tersebut mengindikasikan perbankan memiliki tingkat kecukupan CKPN dan modal yang memadai untuk meredam potensi kerugian jika terjadi pemburukan kondisi makroekonomi.

Ketahanan perbankan juga didukung kondisi likuiditas yang tetap terjaga di tengah meningkatnya intermediasi. Pada 2023, rasio alat likuid¹¹ terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi sebesar 28,73%, serta berada di atas nilai rata-rata AL/DPK pada periode prapandemi¹² sebesar 20,66% (Grafik 3.1.8). *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) perbankan juga tercatat tinggi dan berada di atas nilai ambang batas 100%, yaitu masing-masing tercatat sebesar 220,18% dan 134,04% pada 2023 (Grafik 3.1.9). Berbagai indikator likuiditas dimaksud mencerminkan kemampuan pengelolaan likuiditas perbankan dalam menjaga pemenuhan kewajiban likuiditas jangka pendek dan jangka panjang secara memadai, serta mendukung

11 Alat Likuid (AL) adalah (Kas + Penempatan pada BI + Surat Berharga Pemerintah) – (Kewajiban GWM + Kewajiban PLM + Kewajiban RIM), dengan nilai ambang batas AL/DPK sebesar 10%.

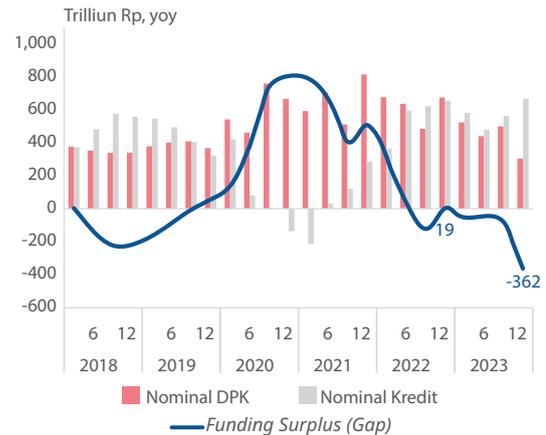
12 Rata-rata AL/DPK perbankan periode sebelum pandemi (tahun 2012 – 2019) mencerminkan tingkat likuiditas yang dijaga perbankan pada periode normal.

Grafik 3.1.8 Perkembangan AL/DPK dan Komponen AL



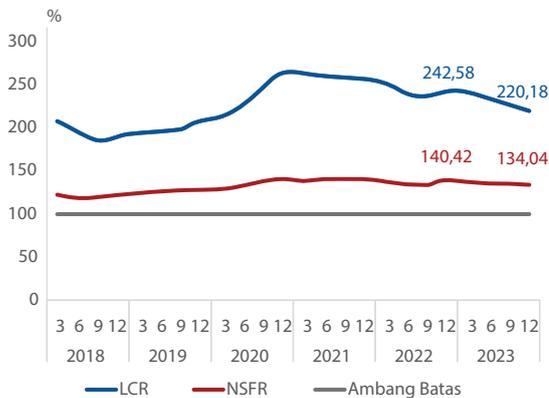
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.10 Perkembangan Funding Gap Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.9 Perkembangan LCR dan NSFR



Keterangan: Sebelum 2023, cakupan pelaporan hanya pada Bank Umum KBMI 3, 4 dan Bank Asing.
Sumber: OJK, diolah

ekspansi kredit di tengah pelebaran *funding gap*. Perbankan menormalisasi tingkat alat likuiditas untuk pemenuhan *funding gap* (Grafik 3.1.10) sehingga rasio likuiditas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Bank juga melakukan pengelolaan komposisi alat likuid dengan meningkatkan porsi instrumen yang dapat digunakan dalam transaksi *repo*, terutama SBN dan SRBI.

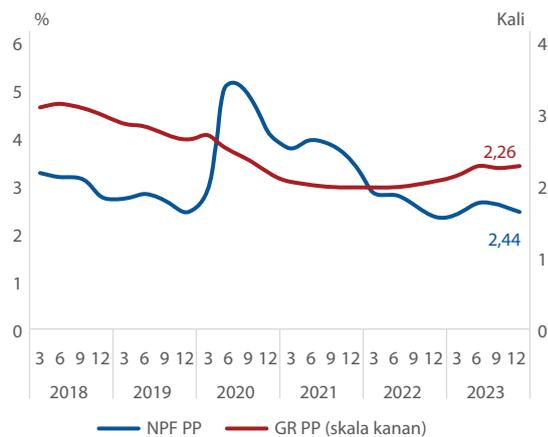
Sejalan dengan ketahanan perbankan yang baik, ketahanan industri keuangan nonbank (IKNB) dalam mendukung fungsi intermediasi juga tetap terjaga. Risiko kredit IKNB yang masih relatif rendah terutama ditopang oleh PP yang mendominasi pembiayaan IKNB¹³. Rasio NPF PP pada 2023, sebesar 2,44%, sudah kembali ke level sebelum pandemi setelah sempat melewati 5% pada 2020 terdampak pandemi Covid-19. Ketahanan PP juga didukung permodalan yang memadai. *Gearing ratio* (GR) PP tercatat sebesar 2,26 kali pada 2023, lebih tinggi dibandingkan pada 2022 sebesar 2,07 kali dan berada di bawah ambang batas sebesar 10 kali¹⁴ (Grafik 3.1.11).

Sejalan dengan ketahanan PP yang baik, ketahanan PT Pegadaian dan Modal Ventura juga terjaga. PT Pegadaian dan Modal Ventura masih mencatatkan nilai NPF di bawah 5%, masing-masing sebesar 0,85% dan 4,04%. Dari sisi permodalan, PT Pegadaian dan Modal Ventura memiliki ketahanan yang kuat, tecermin dari rasio DER Pegadaian yang relatif rendah sebesar 1,53 kali, serta GR Modal Ventura sebesar 0,62 kali.

13 Pangsa pembiayaan IKNB didominasi pembiayaan PP yang mencapai 54,40% dari total pembiayaan IKNB

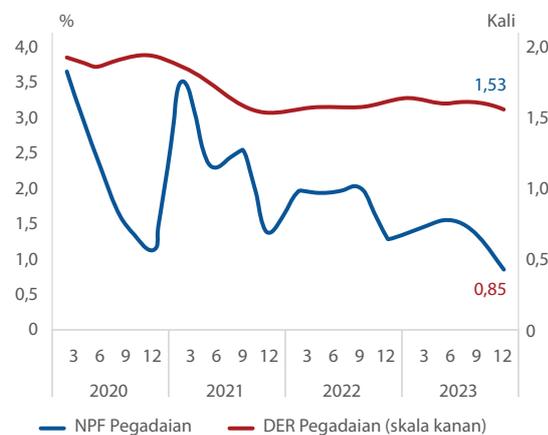
14 *Gearing ratio* merupakan rasio total pinjaman terhadap total modal sendiri dan pinjaman subordinasi setelah dikurangi penyertaan modal yang ada. Sesuai POJK Nomor 35/POJK.05/2018, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali.

Grafik 3.1.11 Non-Performing Financing (NPF) dan Gearing Ratio (GR) PP



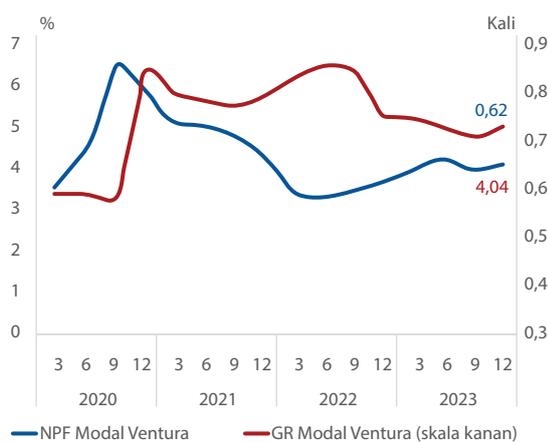
Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.1.12 NPF dan DER Pegadaian



Sumber: OJK dan PT Pegadaian, diolah

Grafik 3.1.13 NPF dan GR Modal Ventura



Sumber: OJK dan PT Pegadaian, diolah

Risiko pembiayaan *fintech lending* secara umum juga masih terjaga. Pada 2023, tingkat risiko pembiayaan *fintech lending* (TWP90¹⁵) secara agregat terjaga di bawah 5%, yaitu sebesar 2,93%. Rasio TWP90 tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan 2022 sebesar 2,78%. Perlu dicermati peningkatan risiko pembiayaan *fintech lending* pada debitur badan usaha yang mencapai 7,60% pada Desember 2023, meski kontribusinya terhadap industri cenderung terbatas di tengah pangsa pembiayaannya yang relatif rendah (Grafik 3.1.14).

Dari sisi IKNB lainnya, asuransi dan dana pensiun menunjukkan ketahanan dan kinerja positif. Ketahanan permodalan asuransi yang terjaga tecermin dari *Risk-Based Capital* (RBC) asuransi umum dan asuransi jiwa yang tercatat tinggi, masing-masing sebesar 363,1% dan 457,9%, jauh di atas ambang batas 120%¹⁶. Secara agregat, rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim bruto asuransi juga masih terjaga di atas 100%, yakni sebesar 122,34% pada 2023 (Grafik 3.1.15). Kecukupan tersebut ditopang peningkatan premi bruto industri asuransi pada 2023 yang mencapai Rp535 triliun¹⁷ atau tumbuh sebesar 3,53%¹⁸ (yoy) dan peningkatan total aset industri asuransi menjadi Rp1.843 triliun pada 2023 atau tumbuh sebesar 6,03%¹⁹ (yoy). Sejalan dengan tren industri asuransi, dana pensiun juga mencatatkan ketahanan dan kinerja positif. Besarnya iuran dana pensiun yang terakumulasi pada 2023 masih lebih

15 TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo

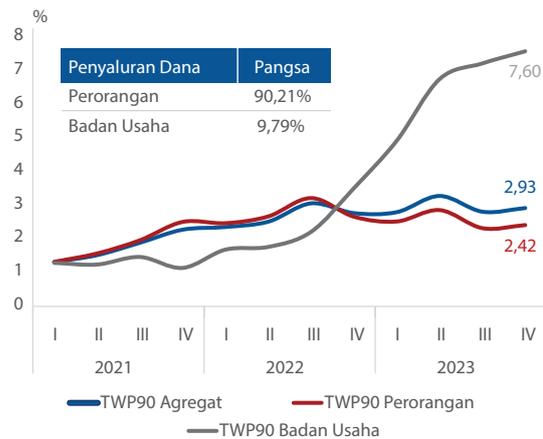
16 Sebagaimana tertuang dalam *Roadmap* Perasuransian Indonesia 2023-2027 dari OJK

17 Jenis asuransi penyumbang terbesar premi bruto pada 2023 adalah asuransi sosial dengan pangsa 46,45%, diikuti oleh asuransi jiwa, asuransi umum, serta reasuransi masing-masing sebesar 29,40%, 18,57% dan 4,26%.

18 Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 2022 sebesar 2,22% (yoy)

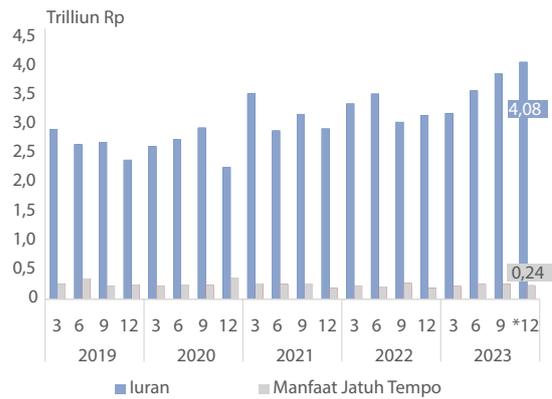
19 Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2022 sebesar 5,74% (yoy)

Grafik 3.1.14 Perkembangan Risiko Kredit oleh Fintech



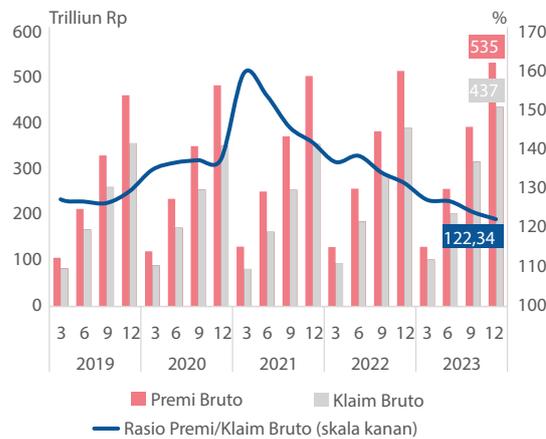
Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.1.16 Iuran dan Manfaat Dana Pensiun



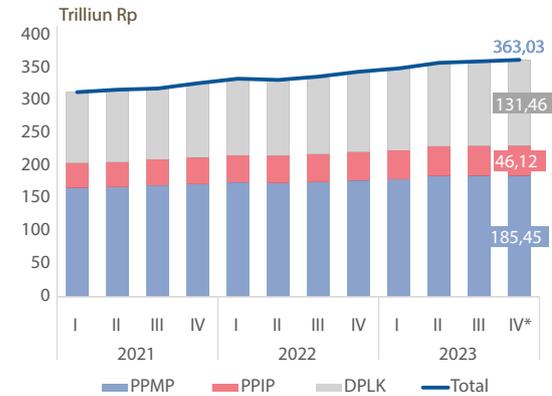
Keterangan: *) Data Dana Pensiun Triwulan IV 2023 merupakan data per November 2023
Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.1.15 Premi dan Klaim Bruto Asuransi



Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.1.17 Aset Dana Pensiun



Keterangan: *) Data Dana Pensiun Triwulan IV 2023 merupakan data per November 2023
Sumber: OJK, diolah

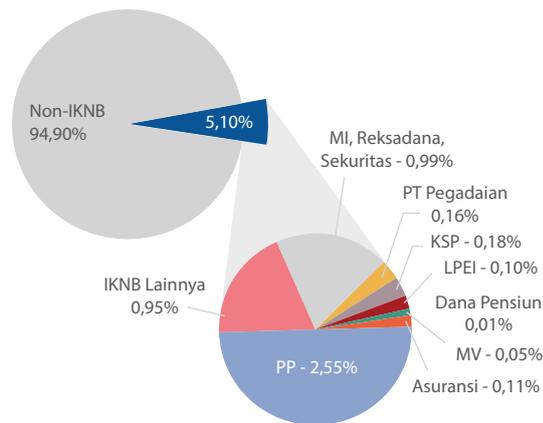
besar dibandingkan dengan klaim manfaatnya (Grafik 3.1.16). Aset dana pensiun pada tahun 2023 tercatat Rp363 triliun atau tumbuh sebesar 6,2% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 2022 sebesar 5,34% (yoy) (Grafik 3.1.17).

Interkoneksi antara IKNB dengan perbankan masih terbatas sehingga potensi rambatan risiko antara bank dan IKNB relatif terbatas. Dari sisi aset, total pangsa aset produktif bank di IKNB terhadap total aset produktif bank pada 2023 hanya sebesar 5,10%, dengan penempatan terbesar pada PP yang mayoritas dialokasikan dalam bentuk kredit (Grafik 3.1.18). Sementara

dari sisi kewajiban, pangsa kewajiban bank ke IKNB terhadap total kewajiban bank sebesar 6,01% yang mayoritas merupakan kewajiban dalam bentuk DPK (Grafik 3.1.19). Sejalan dengan eksposur yang terbatas, potensi rambatan risiko antara bank dan IKNB diperkirakan relatif terbatas.

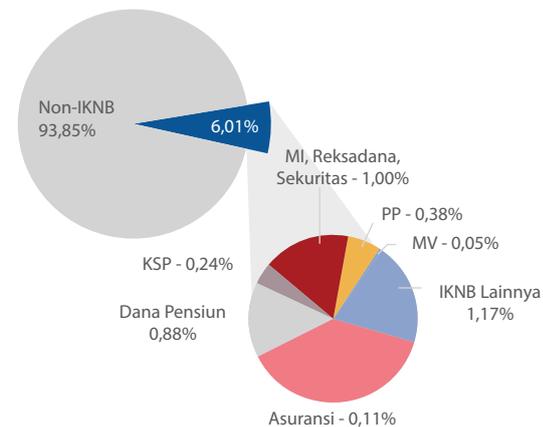
Di sisi lain, risiko siber yang timbul sebagai dampak digitalisasi sektor keuangan relatif terjaga, didukung oleh penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku layanan keuangan. Perkembangan digitalisasi layanan keuangan berpotensi meningkatkan risiko siber yang dapat memengaruhi industri keuangan

Grafik 3.1.18 Interkoneksi dari Sisi Aset Bank terhadap IKNB



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.1.19 Interkoneksi dari Sisi Kewajiban Bank terhadap IKNB



Sumber: Bank Indonesia

melalui tiga jalur: (i) kegiatan sistem operasional yang tidak dapat digantikan dengan mudah jika mengalami gangguan (*lack of availability*); (ii) berkurangnya tingkat keyakinan konsumen terhadap industri jasa keuangan (*loss of confidence*); (iii) integritas data yang memburuk sehingga mengganggu aktivitas industri. Dengan demikian, penguatan ketahanan dan keamanan siber bagi penyelenggara layanan keuangan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia menjadi penting dalam mengantisipasi risiko sektor keuangan digital yang semakin berkembang (Boks 3.1).

Boks 3.1

Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Penyelenggara Layanan Keuangan yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia

Perkembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) meningkatkan paparan risiko siber terhadap sektor keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui peningkatan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran serta perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital selama 2023 telah berdampak terhadap peningkatan transaksi *digital banking* di sektor keuangan. Data secara global yang dirilis oleh *Check Point* dan *Financial Services Information Sharing and Analysis Center* selama 2023 menunjukkan peningkatan serangan siber terhadap sektor keuangan sebesar 9%²⁰. Berdasarkan lanskap keamanan siber, Indonesia termasuk dalam daftar *top 10* negara yang menjadi sumber dan tujuan serangan siber²¹. Selama tiga tahun terakhir, Bank Indonesia mencatat peningkatan kejadian insiden siber, khususnya pada Penyelenggara Sistem Pembayaran (Grafik B3.1.1).

Grafik B3.1.1 Jumlah Insiden Siber yang Tercatat dalam Pengawasan Bank Indonesia



Keterangan:

PSPS: Penyelenggara SP Sistemik

PSPK: Penyelenggara SP Kritis

PSPU: Penyelenggara SP Umum

Sumber: Bank Indonesia, diolah

²⁰ BSSN, Profil Risiko Siber Sistem Pembayaran, 2023 tersedia di <https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2024/02/Infografis-Profil-Risiko-Siber-Sistem-Pembayaran.pdf> (diakses 9 Maret 2024).

²¹ BSSN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia, 2022, tersedia di [Cloud BSSN](https://www.bssn.go.id/) (diakses 21 Februari 2024).

Bank Indonesia memitigasi risiko siber pada sistem pembayaran dengan memastikan pemenuhan Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi (MRSI) oleh penyelenggara layanan keuangan. Berdasarkan PBI No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), PJP dan PIP wajib memenuhi MRSI sesuai dengan kategori PJP/PIP. Cakupan MRSI meliputi pengendalian internal, *Data Center/Disaster Recovery Center*, *Fraud Detection System*, Audit Teknologi Informasi, Audit Laporan Keuangan, dan *Information Security*. Kategori PJP/PIP dibedakan menjadi Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik (PSPS), Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritis (PSPK), Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum (PSPU), dan PSPU Perusahaan Transfer Dana Bukan Bank (PTD-BB) Skala kecil (Gambar 3.1.19). Bank Indonesia memastikan pemenuhan MRSI melalui pelaksanaan asesmen terhadap *action plan* MRSI yang disampaikan PJP/PIP.

Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pemeriksaan pada aspek Teknologi Informasi (TI) termasuk risiko siber. PJP dan PIP menyampaikan laporan *availability* dan gangguan layanan sistem pembayaran secara rutin kepada Bank Indonesia untuk menggambarkan gangguan TI secara umum. Berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia periode 2023, gangguan sistem yang terjadi relatif terkendali dan tidak berdampak luas terhadap kelancaran layanan sistem

Gambar B3.1.1. Cakupan MRSI

Pemenuhan MRSI	Data Center/ Data Recovery Center	Fraud Detection System	Audit TI	Information Security
PSPS	<ul style="list-style-type: none"> Minimal memiliki DC dan DRC pada <i>site</i> yang terpisah serta aktif secara bersamaan dengan kapasitas infrastruktur SI yang sama sesuai analisis dampak bisnis Melakukan uji coba DRC minimal 1 tahun sekali termasuk diantaranya simulasi ketahanan siber 	Wajib memiliki FDS yang dapat mendeteksi aktivitas akun, aktivitas jaringan maupun transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi minimal 1 tahun sekali Pelaksanaan <i>penetration test</i> secara menyeluruh oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi minimal 1 tahun sekali 	Wajib memiliki sertifikasi standar internasional terkait <i>information security</i> kegiatan SP utama.
PSPK	<ul style="list-style-type: none"> Minimal memiliki DC dan DRC pada <i>site</i> yang terpisah dengan kapasitas infrastruktur SI yang sama sesuai analisis dampak bisnis Melakukan uji coba DRC minimal 1 tahun sekali termasuk diantaranya simulasi ketahanan siber 	Wajib memiliki FDS yang dapat mendeteksi aktivitas akun, aktivitas jaringan maupun transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi minimal 1 tahun sekali Pelaksanaan <i>penetration test</i> secara menyeluruh oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi minimal 1 tahun sekali 	Minimal memiliki sertifikasi standar nasional terkait <i>information security</i> kegiatan SP utama
PSPU	<ul style="list-style-type: none"> Minimal memiliki DC dan DRC pada <i>site</i> yang terpisah, dengan infrastruktur SI yang setara sesuai analisis dampak bisnis Melakukan uji coba DRC minimal 1 tahun sekali termasuk diantaranya simulasi ketahanan siber 	Wajib memiliki FDS yang dapat mendeteksi aktivitas akun, aktivitas jaringan maupun transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi atau independen internal minimal 1 tahun sekali Pelaksanaan <i>penetration test</i> secara menyeluruh oleh auditor TI independen eksternal minimal 1 tahun sekali 	Minimal mengadopsi <i>best practice</i> standar <i>information security</i>
PSPU PTD BB Skala kecil (kategori izin 3)	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal layanan didukung oleh sistem informasi, minimal memiliki infrastruktur SI DC dan DRC pada <i>site</i> yang terpisah Melakukan uji coba DRC minimal 1 tahun sekali 	Melaksanakan praktik pengelolaan <i>fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen minimal 1 tahun sekali termasuk melakukan asesmen keamanan sistem informasi layanan transfer dana 	Melakukan praktik penegamanan informasi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

pembayaran. Selain laporan tersebut, PJP dan PIP menyampaikan laporan insidental apabila terjadi gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk ketika terjadi insiden siber. Berdasarkan laporan insiden siber tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan mengacu pada standar keamanan yang dikeluarkan oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST).

Bank Indonesia terus berusaha meningkatkan ketahanan dan keamanan sistem informasi pada pelaku industri melalui formulasi kebijakan *end to end*. Bank Indonesia tengah menyusun formulasi

kebijakan Ketahanan dan Keamanan Siber yang mencakup empat pilar utama, yaitu tata kelola, pencegahan, penanganan, serta pengawasan dan kolaborasi. Secara umum, terdapat tiga langkah penting yang menjadi sasaran pengaturan KKS tersebut, yaitu peningkatan KKS penyelenggara, peningkatan manajemen risiko siber penyelenggara, dan penguatan pengawasan dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan insiden siber penyelenggara. Mengacu kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PPSK, cakupan penyelenggara tidak hanya meliputi penyelenggara sistem pembayaran, namun juga pelaku pasar uang dan pasar valas.

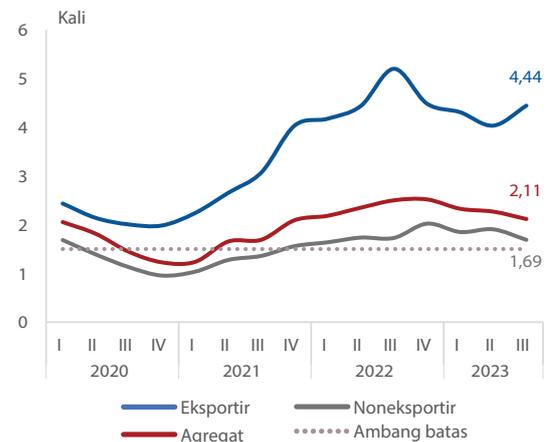
3.2

Repayment Capacity Korporasi dan Rumah Tangga Terjaga

Ketidakpastian perekonomian yang tinggi di tengah kebijakan *high for longer* dan dinamika harga komoditas berdampak terbatas pada kinerja korporasi. *Profit margin* korporasi komoditas utama Indonesia (batubara, kelapa sawit, dan nikel) pada 2023 masih berada di zona positif, meski mengalami penurunan sebagai dampak penurunan harga komoditas. Penurunan tersebut sejalan dengan Indeks Harga Ekspor Komoditas (IHKEI) komoditas utama di Indonesia yang terkoreksi menjadi negatif seiring usainya periode *commodity boom* pada 2021-2022. Ekspor batubara, kelapa sawit, dan nikel yang sebelumnya sempat tumbuh tinggi, pada 2023 termoderasi oleh penurunan harga komoditas sehingga memengaruhi kinerja korporasi.

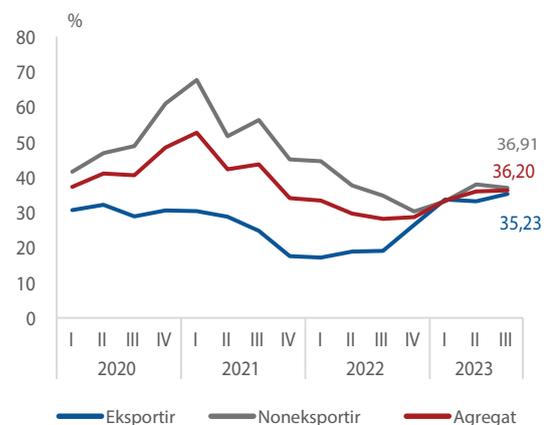
Kemampuan bayar korporasi masih terjaga baik di tengah kondisi suku bunga tinggi dan harga komoditas yang menurun. Hal itu tecermin dari ICR korporasi yang masih di atas 1,5 kali baik secara agregat maupun pada kelompok korporasi eksportir dan noneksportir (Grafik 3.2.1). Rasio utang berisiko atau *Debt at Risk* (DaR) juga masih relatif rendah (Grafik 3.2.2). Meski masih terjaga, rasio ICR maupun DaR menunjukkan

Grafik 3.2.1 Perkembangan *Interest Coverage Ratio*



Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 3.2.2 Perkembangan *Debt at Risk*



Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

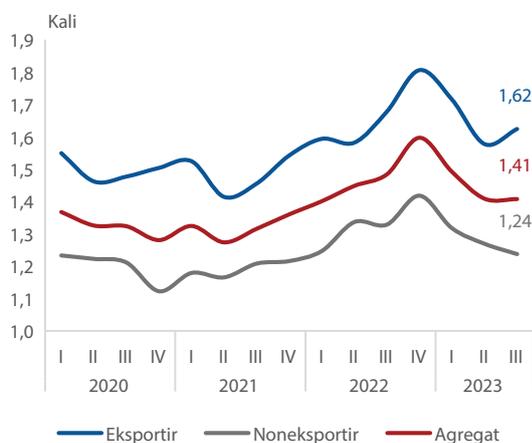
tren peningkatan dibandingkan dengan 2022. Hal tersebut sejalan dengan tertahannya pendapatan korporasi dan pengeluaran beban suku bunga di tengah kondisi suku bunga tinggi dan turunnya harga komoditas.

Terjaganya kemampuan bayar korporasi ditopang kondisi likuiditas yang masih ample. Hal tersebut tecermin pada *current ratio* dan *cash ratio* korporasi pada 2023 yang secara agregat tercatat masing-masing sebesar 1,41 kali dan 0,41 kali. Keduanya masih berada di atas level periode pandemi (Grafik 3.2.3 dan 3.2.4), meski mengalami penurunan, sejalan dengan

perlambatan penjualan dan beberapa korporasi yang melakukan pelunasan pinjaman lebih awal.

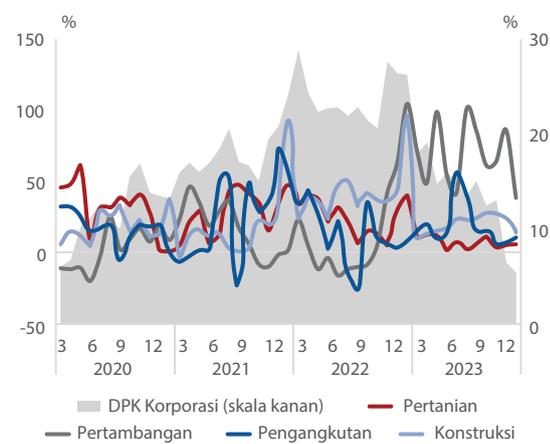
Excess saving korporasi yang menurun pada beberapa sektor berpotensi membuka ruang permintaan kredit. Penurunan *excess saving* tersebut tecermin dari pertumbuhan DPK korporasi pada 2023 sebesar 5,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar 13,31% (yoy) (Grafik 3.2.5). Perlambatan pertumbuhan DPK dimaksud didorong penurunan *Free Cash Flow* (FCF) pada beberapa sektor utama (Pertambangan, Listrik Gas Air, dan Pengangkutan) (Grafik 3.2.6).

Grafik 3.2.3 Perkembangan Current Ratio



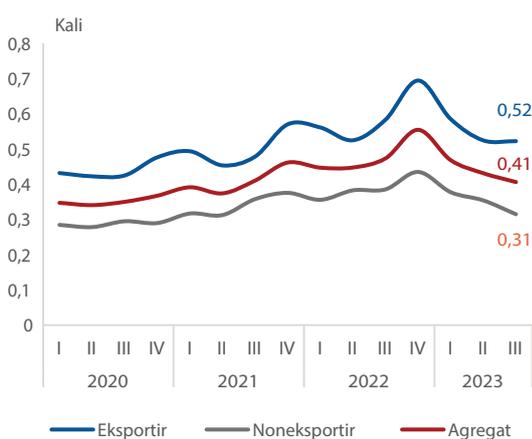
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 3.2.5 Pertumbuhan DPK



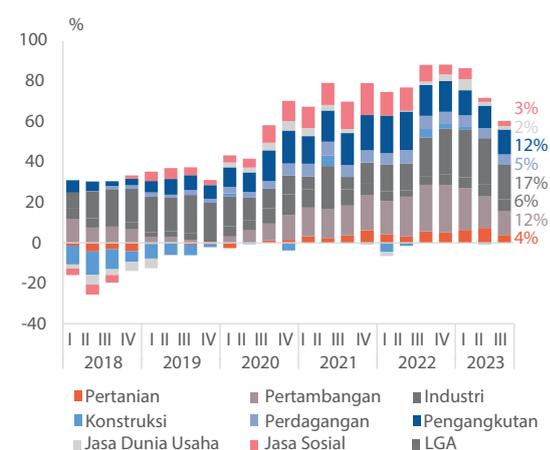
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.4 Perkembangan Cash Ratio



Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 3.2.6 Free Cash Flow

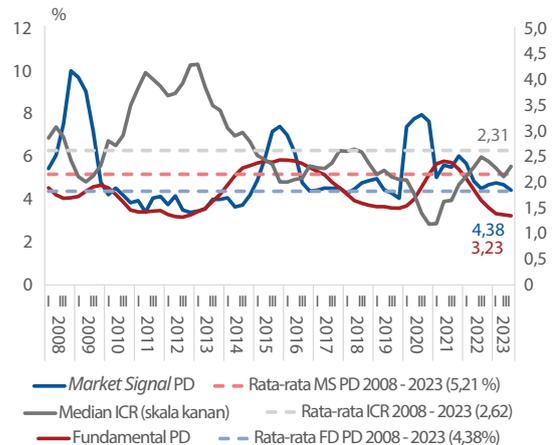


Sumber: Bloomberg, diolah

Ketahanan korporasi yang masih terjaga juga tecermin dari *Probability of Default (PD)* korporasi pada 2023 yang relatif lebih baik. Secara umum PD korporasi dapat dilihat berdasarkan indikator laporan keuangan (PD fundamental²²) maupun dari indikator pasar (PD *market signal*²³). Pada 2023, secara agregat korporasi mencatatkan PD fundamental sebesar 3,23%, dan PD *market signal* sebesar 4,38%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historis²⁴ PD fundamental di level 4,38% dan PD *market signal* di level 5,21% (Grafik 3.2.7). Baik PD fundamental maupun *market signal* masih menunjukkan tren penurunan sejak periode pasca pandemi, sehingga mengindikasikan risiko *default* yang masih rendah untuk menopang ekspansi permintaan pembiayaan korporasi.

Ketahanan korporasi yang kuat diprakirakan mampu menahan eksternal *spillover* dari dinamika global dari perlambatan ekonomi dan krisis properti Tiongkok. Secara umum korporasi dengan pasar utama Tiongkok memiliki kemampuan bayar yang lebih tinggi dibandingkan korporasi yang berorientasi ekspor di luar Tiongkok. Pelemahan ekonomi Tiongkok diperkirakan berdampak terbatas pada ekspor korporasi ke Tiongkok, sehingga penurunan ICR dan peningkatan risiko hutang korporasi (*debt to EBITDA*) juga terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, eksposur Indonesia pada pasar properti Tiongkok juga cenderung terbatas. Dari total 81 juta dolar AS nilai obligasi properti Tiongkok, kepemilikan Indonesia tercatat sebesar 1 juta dolar AS. Kinerja obligasi tersebut relatif baik, tecermin dari indeks harga yang meningkat pada Desember 2023 sebesar 101,6, dibandingkan 2022 sebesar 101,3 (Grafik 3.2.8). Di tengah penurunan minat investasi obligasi korporasi *developer* di Tiongkok, ekspor produk terkait perumahan

Grafik 3.2.7 ICR dan Market Signal serta Fundamental Probability of Default Korporasi



Sumber: Capital IQ & Bloomberg, diolah

Grafik 3.2.8 Perkembangan Indeks Harga Obligasi Korporasi Developer Tiongkok yang dimiliki Indonesia



Sumber: Bloomberg, diolah

22 PD *fundamental* merupakan PD korporasi berdasarkan indikator laporan keuangan

23 PD *market signal* merupakan PD korporasi berdasarkan indikator pasar

24 Rata-rata historis periode 2008 - 2023

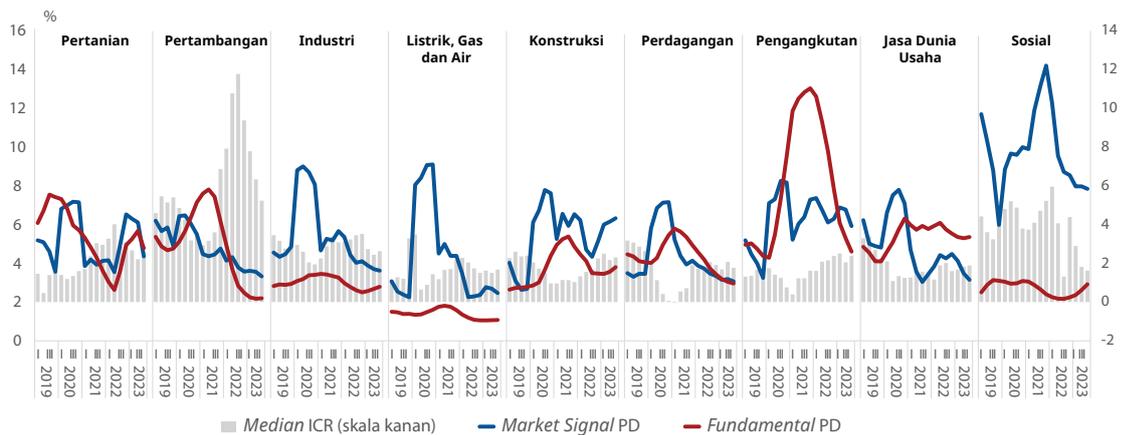
Indonesia ke Tiongkok pada 2023 masih tumbuh sebesar 27,75% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2022 (Grafik 3.2.9). Lebih lanjut, sektor properti Indonesia juga masih menunjukkan kinerja positif di tengah krisis properti Tiongkok (Boks 3.2).

Meski secara agregat masih terjaga, ketahanan korporasi di kelompok tertentu perlu dicermati
Secara sektoral, sektor Konstruksi masih mengalami peningkatan tren PD hingga di atas 6% pada 2023 (Grafik 3.2.10). Sedangkan berdasarkan klasifikasi ICR, PD korporasi dengan ICR rendah (di bawah nilai ambang batas 1) belum membaik, yaitu 14,45% pada 2023 dibandingkan dengan Triwulan II 2023 sebesar 13,14%. Masih tingginya PD korporasi dengan ICR rendah tersebut sejalan

Grafik 3.2.9 Perkembangan Harga Keseluruhan Obligasi Korporasi Developer Tiongkok dan Ekspor Indonesia ke Tiongkok untuk Produk terkait Housing



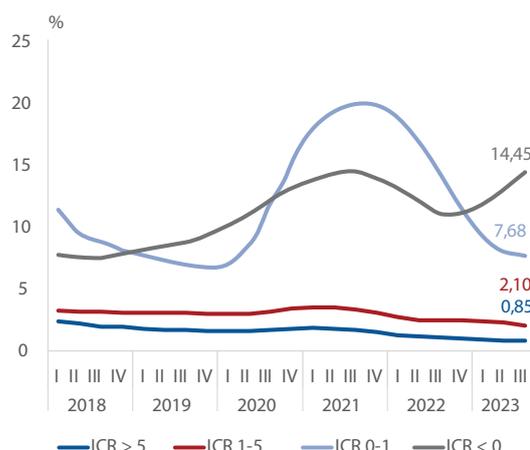
Grafik 3.2.10 Probability of Default Korporasi per Sektor



dengan perburukan kinerja sebelum periode Covid-19. Kinerja korporasi di kelompok tersebut tecermin pada belum pulihnya *margin* dan aktivitas korporasi pada Triwulan III 2023 yang lebih rendah dibandingkan pada 2019 (Grafik 3.2.11). Lebih lanjut, perlu dicermati sektor yang mengalami penurunan likuiditas cukup dalam, khususnya

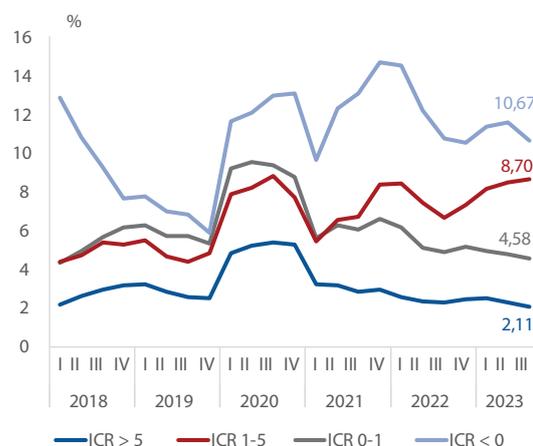
yang disertai dengan tingkat utang tinggi dan penurunan penjualan yang dalam. Sektor tersebut antara lain industri kayu, industri kulit dan alas kaki, peternakan, tanaman perkebunan, informasi dan telekomunikasi, konstruksi, dan industri kimia farmasi (Tabel 3.2.1).

Grafik 3.2.11 Fundamental Probability of Default berdasarkan Klasifikasi ICR



Sumber: Capital IQ & Bloomberg, diolah

Grafik 3.2.12 Market Signal Probability of Default berdasarkan Klasifikasi ICR



Sumber: Capital IQ & Bloomberg, diolah

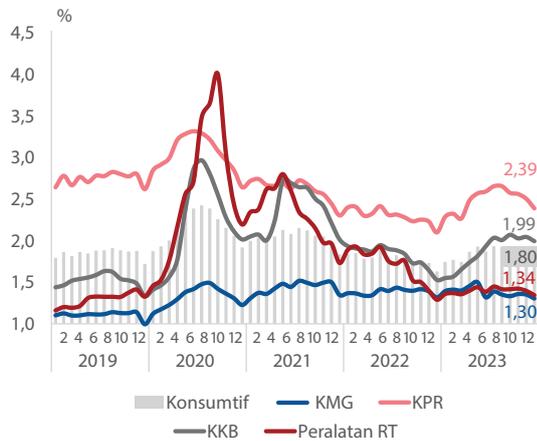
Tabel 3.2.1 Total Aset, Pertumbuhan Kas, Pertumbuhan Penjualan, dan Debt to Equity (DER) berdasarkan Subsektor

Subsektor	Pertumbuhan Cash (%_yoy)		Pertumbuhan Sales (%_yoy)		DER	
	2023 Tw2	2023 Tw3	2023 Tw2	2023 Tw3	2023 Tw2	2023 Tw3
Industri Kayu	(0,34)	(0,74)	(0,24)	(0,38)	0,74	0,74
Industri Kulit dan Alas Kaki	0,45	(0,72)	0,34	0,01	0,43	0,52
Peternakan	(0,89)	(0,46)	(0,46)	(0,64)	0,66	0,62
Tanaman Perkebunan	(0,17)	(0,22)	(0,03)	(0,05)	0,61	0,60
Informasi dan Telekomunikasi	(0,23)	(0,21)	0,07	0,06	1,06	1,02
Konstruksi	(0,15)	(0,16)	0,11	0,05	0,77	0,80
Industri Kimia Farmasi	(0,22)	(0,15)	(0,05)	(0,06)	0,61	0,60
Jasa Keuangan Lainnya	(0,72)	(0,43)	(0,86)	(0,97)	0,02	0,02
Pertambangan Batubara dan Lignit	0,16	(0,29)	0,36	0,02	0,22	0,20
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya	(0,26)	(0,23)	(0,01)	(0,10)	0,26	0,23
Industri Alat Angkutan	(0,19)	(0,21)	0,18	0,11	0,43	0,46
Perdagangan Besar & Eceran	(0,19)	(0,20)	0,17	0,10	0,40	0,43
Angkutan Darat	(0,09)	(0,14)	0,48	0,29	0,18	0,18
Pengolahan Tembakau	(0,40)	(0,13)	0,02	(0,02)	0,13	0,08
Tanaman Pangan	0,17	(0,13)	(0,11)	(0,14)	0,00	0,00
Jasa Lainnya	0,02	(0,01)	(0,05)	(0,10)	0,29	0,30
Jasa Kesehatan	0,01	(0,01)	0,04	0,11	0,23	0,23
Real Estate	0,23	0,01	0,43	0,26	0,19	0,19
Jasa Perusahaan	(0,27)	0,12	0,07	0,05	0,23	0,22
Hotel dan Restoran	0,11	0,13	0,33	0,17	0,49	0,49
Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir	0,23	0,15	0,28	0,12	0,90	0,70
Industri Makanan dan Minuman	0,19	0,15	0,08	0,06	0,59	0,57
Angkutan Laut	0,20	0,15	0,36	0,15	0,26	0,21
Industri TPT	(0,20)	0,16	(0,16)	(0,23)	(3,17)	(3,30)
Pertambangan Bijih Logam	0,24	0,27	0,12	0,02	0,33	0,33
Industri Barang Galian Bukan Logam	0,13	0,30	0,10	0,06	0,40	0,37
Industri Karet dan Plastik	(0,25)	0,31	(0,15)	(0,19)	0,47	0,43
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Media Rekaman	0,18	0,31	0,01	(0,08)	0,55	0,55
Industri Barang dari Logam dan Elektronik	0,40	0,49	(0,02)	(0,00)	0,67	0,64
Industri Logam Dasar	0,00	0,55	(0,10)	(0,21)	1,14	1,16
Industri Mesin dan Perlengkapan	0,38	0,56	(0,06)	0,08	0,57	0,57
Transportasi Udara	1,90	1,04	0,95	0,62	(2,16)	(2,14)
Perikanan	(0,22)	1,08	0,01	(0,08)	0,32	0,28
Industri Furnitur	(0,38)	1,46	(0,53)	(0,54)	0,72	0,67

Sumber: Bloomberg, diolah

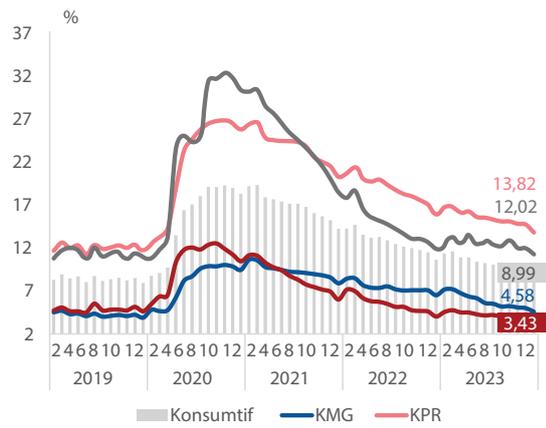
Sejalan dengan ketahanan korporasi yang terjaga, risiko kredit rumah tangga juga relatif terkendali. Hal ini tecermin dari perkembangan rasio NPL dan LaR kredit RT yang masih relatif terjaga. Pada akhir 2023 kredit RT memiliki rasio NPL 1,80% atau di bawah nilai ambang batas 5% (Grafik 3.2.16). Sementara rasio LaR kredit RT menurun sepanjang 2023 dan tercatat sebesar 8,99% (Grafik 3.2.17), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 sebesar 10,66%. Berdasarkan jenis kredit, risiko kredit RT relatif terjaga rendah, baik untuk kredit multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan peralatan RT.

Grafik 3.2.13 NPL Kredit Rumah Tangga



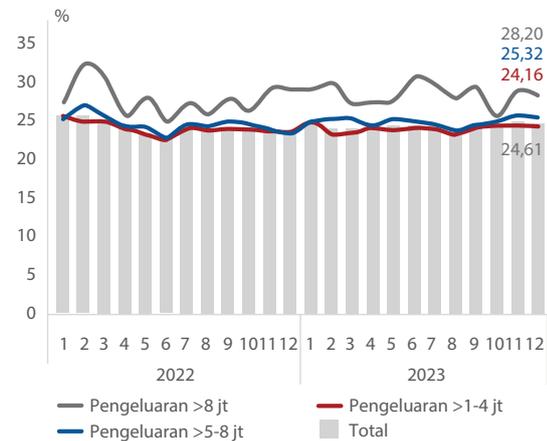
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.14 LAR Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.15 Debt Service Ratio Rumah Tangga



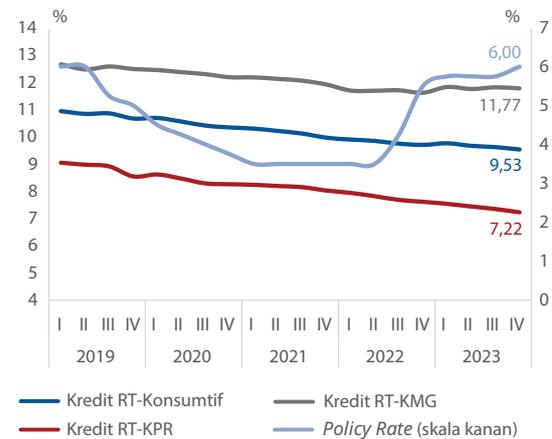
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Terkendalinya risiko kredit RT ditopang oleh *repayment capacity* RT yang terjaga.

Hal ini tecermin dari *Debt Service Ratio* (DSR) RT yang tercatat sebesar 24,61% pada Desember 2023, sedikit meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar 23,55%, namun masih dalam batas wajar (Grafik 3.2.18). Berdasarkan kelompok pengeluaran, RT kelas atas yaitu dengan pengeluaran di atas Rp8 juta memiliki DSR tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dengan pengeluaran tinggi, sebagai *proxy* pendapatan tinggi, cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan layanan jasa keuangan, sehingga porsi pendapatan yang digunakan untuk pembayaran cicilan cenderung lebih besar. Sementara porsi pendapatan masyarakat berpendapatan rendah yang digunakan untuk konsumsi lebih tinggi, sehingga porsi pendapatan yang digunakan untuk pembayaran cicilan menjadi lebih rendah.

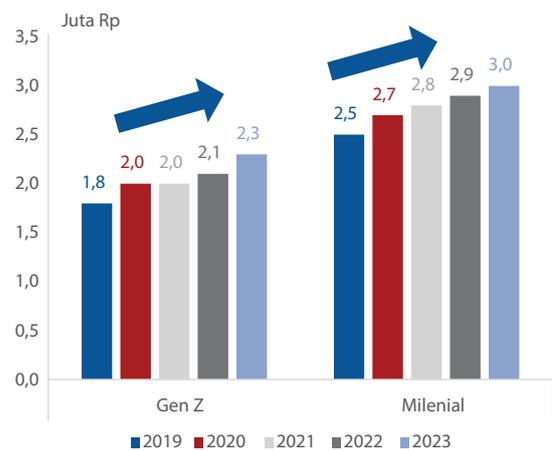
Risiko RT yang terjaga didukung oleh tren penurunan suku bunga kredit konsumsi RT dan peningkatan pendapatan pada tahun 2023. Suku bunga kredit konsumsi RT turun menjadi 9,53% pada 2023. Sejalan dengan tren industri, suku bunga kredit KPR dan multiguna (sebagai kredit RT dengan pangsa terbesar) juga mengalami penurunan (Grafik 3.2.19). Penurunan beban bunga tersebut memengaruhi kemampuan bayar RT. Selain itu, peningkatan pendapatan pada pekerja usia produktif juga turut mendorong kemampuan bayar kredit RT pada 2023 (Grafik 3.2.20).

Grafik 3.2.16 Rata-Rata Suku Bunga Kredit Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.17 Perkembangan Rata-Rata Upah Buruh Nominal Individu berdasarkan Generasi



Sumber: BPS, diolah

Krisis properti Tiongkok diawali fenomena *excessive lending* oleh developer properti²⁵ sehingga Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai “*Three Red Lines*” atau “*Tiga Garis Merah*”²⁶. Kebijakan yang dikeluarkan pada Agustus 2020 tersebut mengklasifikasikan perusahaan properti ke dalam empat zona, yaitu hijau, kuning, oranye, dan merah, sebagai indikator pemenuhan persyaratan pengajuan pembiayaan²⁷. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan sejumlah developer properti mengalami kesulitan keuangan dan lebih lanjut memicu krisis properti Tiongkok yang tecermin dari penurunan drastis permintaan properti dan kontraksi harga properti.

Merespons krisis tersebut, otoritas Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang bersifat represif sebagai upaya penyelamatan sektor properti. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja developer properti dan daya beli masyarakat.

IMF²⁸ mengelompokkan kebijakan-kebijakan dimaksud dalam tiga besaran, yakni permintaan, penawaran, dan restrukturisasi²⁹. Di tengah upaya penyelamatan dimaksud, hingga akhir 2023 sektor properti Tiongkok masih dalam tren penurunan. Guncangan akibat krisis properti Tiongkok dimaksud menimbulkan *concern* atas potensi rambatannya pada kinerja sektor properti domestik.

Kinerja sektor properti residensial Indonesia masih terjaga di tengah krisis sektor properti Tiongkok. Hal tersebut tecermin dari pertumbuhan penjualan properti residensial yang masih tumbuh positif dan dalam tren peningkatan pada 2023. Pertumbuhan penjualan properti pasar primer di Indonesia tercatat sebesar 3,37% pada akhir 2023, didorong oleh pertumbuhan penjualan rumah tipe besar (Grafik B3.2.1). Tren positif tersebut berbeda dengan penjualan properti baru di Tiongkok yang masih dalam tren penurunan pada 2023 (Grafik 3.2.2).

25 *Excessive lending* dari developer property terjadi pada periode sebelum Pandemi Covid-19

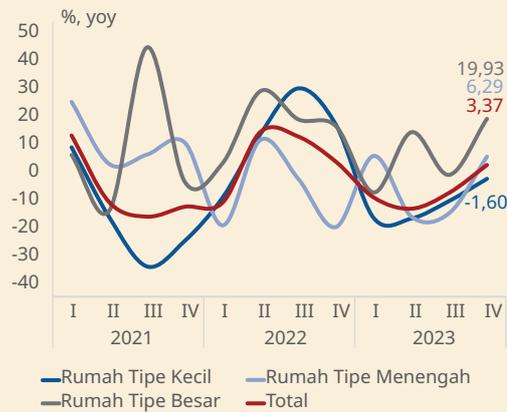
26 Ke, D., & Xie, C. (2023). Analysis of the Development Process and Trend of China's Real Estate Industry. *Advances in Economics, Business and Management Research*.

27 Terdapat 3 (tiga) persyaratan pinjaman properti sesuai “*Three Red Lines*”: (i) utang tidak melebihi 70% dari aset, (ii) nilai utang maksimal sebesar 100% dari ekuitas, (3) rasio antara dana tunai dan pinjaman jangka pendek maksimal berbanding satu. Zona hijau mengindikasikan perusahaan properti yang memenuhi semua persyaratan, zona kuning mengindikasikan perusahaan properti yang memenuhi dua dari tiga persyaratan, zona oranye mengindikasikan perusahaan properti yang memenuhi satu dari tiga persyaratan, sedangkan zona merah mengindikasikan perusahaan properti yang tidak memenuhi seluruh persyaratan.

28 IMF. (2023). IMF Article IV Consultation with the People's Republic of China. Washington, DC.

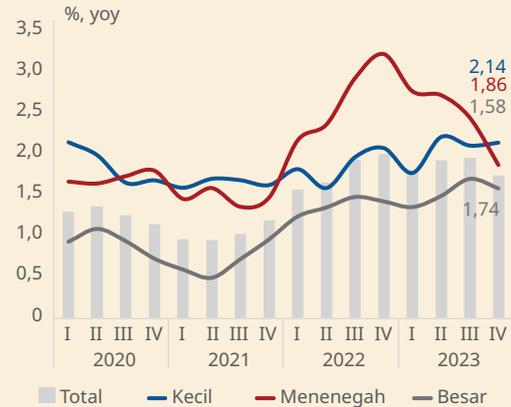
29 Kebijakan pada sisi permintaan termasuk menurunkan minimum uang muka, suku bunga KPR, serta pajak individu untuk transaksi properti. Kebijakan pada sisi penawaran mencakup mendorong pembiayaan bagi developer properti dan melonggarkan NPL untuk sektor properti. Sementara kebijakan terkait restrukturisasi antara lain pembiayaan bank untuk penyelesaian proyek hunian dan bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk membantu proyek yang bermasalah.

Grafik B3.2.1 Pertumbuhan Penjualan Rumah Baru di Indonesia



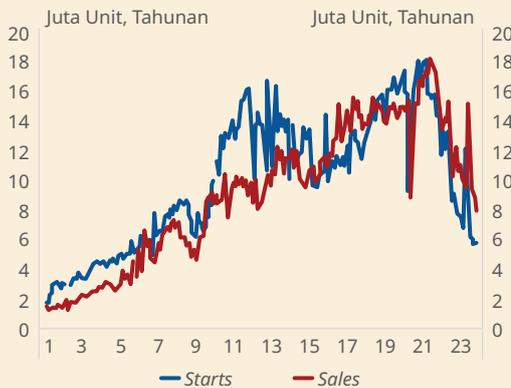
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.3 Pertumbuhan Harga Properti Pasar Primer Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.2 Pertumbuhan Penjualan Rumah Baru di Tiongkok



Sumber: Trading Economics, National Bureau of Statistics of China

Grafik B3.2.4 Pertumbuhan Harga Properti Pasar Primer Tiongkok



Sumber: Trading Economics, National Bureau of Statistics of China

Pertumbuhan harga properti residensial di Indonesia yang masih positif menunjukkan optimisme. Pertumbuhan harga properti residensial pasar primer di Indonesia pada akhir 2023 tercatat sebesar 1,74%, didorong oleh pertumbuhan rumah tipe kecil dan menengah (Grafik B3.2.3). Sedangkan, pertumbuhan harga properti residensial di Tiongkok cenderung mengalami kontraksi sepanjang 2023, mengindikasikan belum pulihnya permintaan terhadap properti residensial (Grafik B3.2.4).

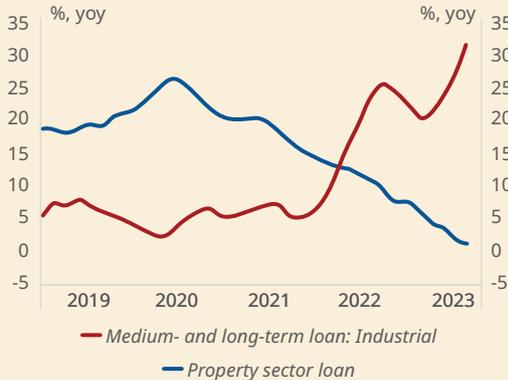
Permintaan sektor properti residensial Indonesia diperkirakan masih meningkat. Hal tersebut tecermin dari pertumbuhan kredit industri di sektor *real estate* yang mencapai 9,02% (yoy) pada Desember 2023 (Grafik B3.2.5). Kondisi tersebut berbeda dari Tiongkok yang masih terus mengalami perlambatan pertumbuhan kredit sektor properti, dipengaruhi permintaan pembiayaan oleh developer di Tiongkok yang masih belum pulih.

Grafik B3.2.5 Pertumbuhan Kredit Properti Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

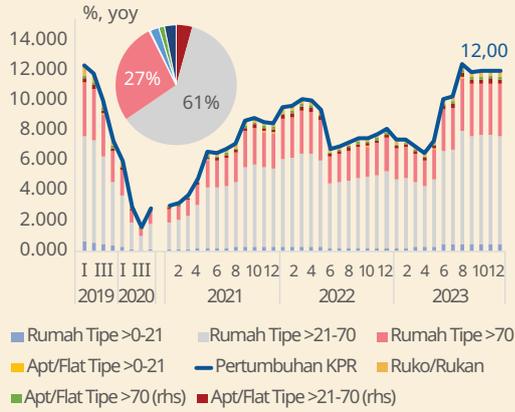
Grafik B3.2.6 Pertumbuhan Kredit Properti Tiongkok



Sumber: Wind, PBoC, dalam Goldman Sachs Global Investment Research

Optimisme permintaan kredit RT di sektor properti juga tecermin dari pertumbuhan KPR di Indonesia. KPR tumbuh sebesar 12,00% (yoy) pada Desember 2023. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 dimana pertumbuhan KPR RT sebesar 5,07%(yoy). Jenis properti residensial yang memiliki kontribusi terbesar dalam pertumbuhan KPR RT adalah rumah tapak tipe menengah (tipe 21-70 meter persegi) (Grafik B3.2.7).

Grafik B3.2.7 Perkembangan KPR RT 2019 s.d. 2023



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari sisi pasar modal, market confidence terhadap sektor properti Indonesia terindikasi masih baik. Kinerja saham sektor properti Indonesia pada periode *default event developer* Tiongkok pada 2023 relatif kuat (Grafik B3.2.8). Selain itu, aktivitas penerbitan saham baik melalui IPO maupun *right issue* pada sektor properti serta sektor yang memiliki ekspor terkait dengan properti Tiongkok mencatat pertumbuhan nilai *fund raise* dalam rangka mendukung ekspansi usaha (Grafik B3.2.9).

Grafik B3.2.8 Kinerja Indeks Saham Sektor (IHSG & Hang Seng) pada Periode Default Event



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik B3.2.9 Perkembangan Penerbitan Saham Sektor yang terkait Kondisi Properti RRT

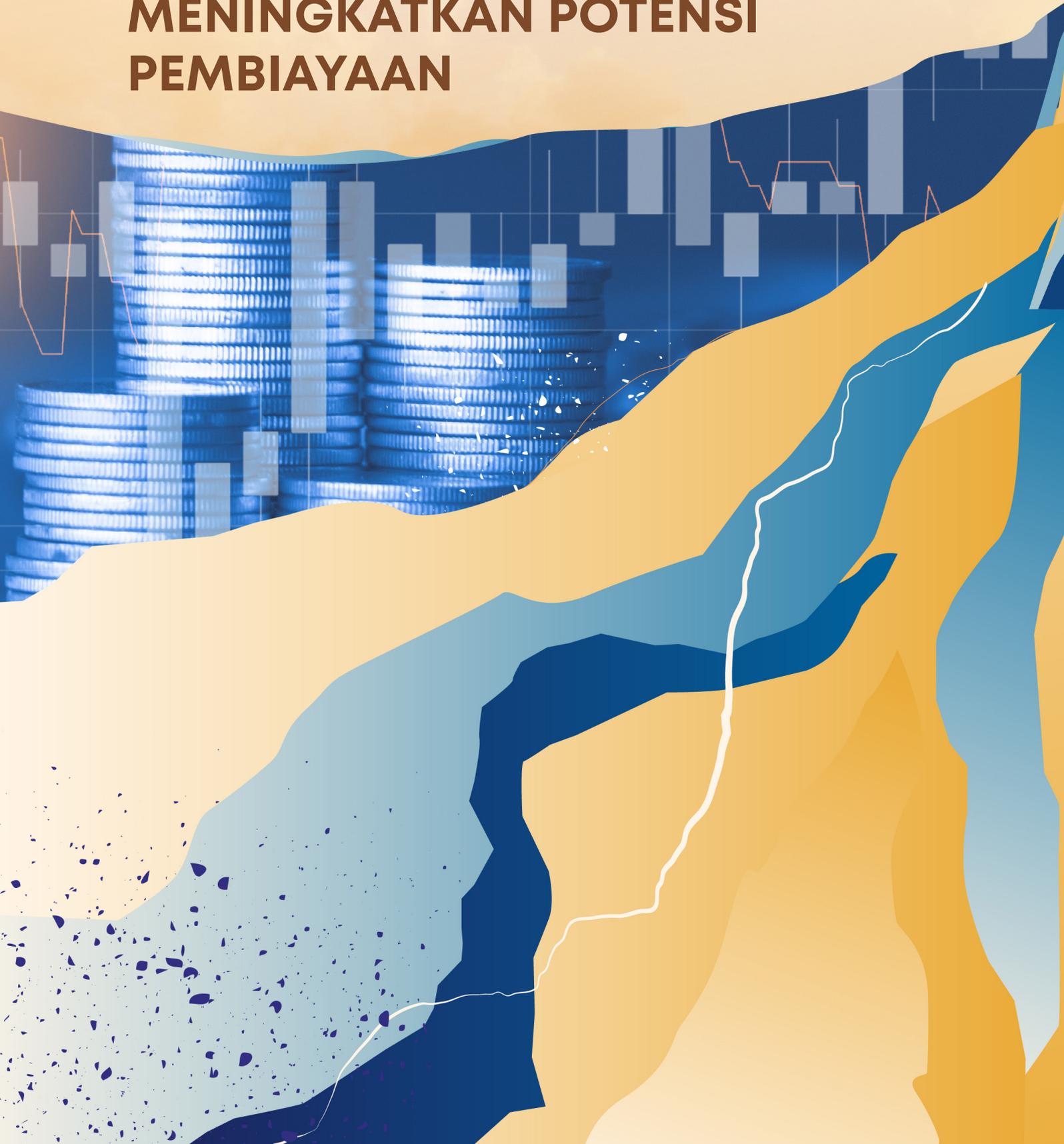


Sumber: KSEI, BEI, diolah

Ke depan, perlu dicermati apabila dalam jangka panjang tekanan sektor properti Tiongkok merambat ke perekonomian Indonesia. Transmisi krisis properti Tiongkok dapat melalui jalur perdagangan yang memengaruhi kinerja korporasi dan RT, maupun jalur keuangan yang memengaruhi *risk-appetite* investor/lender di pasar properti sehingga memengaruhi penawaran kredit. Krisis properti Tiongkok memberikan *lesson learned* mengenai perlunya memperkuat data dan *tools monitoring* deteksi dini dari: (i) indikasi *bubble* properti; (ii) penguatan koordinasi kebijakan fiskal, sektoral, makro-mikroprudensial; serta (iii) *timing* intervensi kebijakan yang tepat untuk memitigasi risiko maupun mendorong sektor properti.

BAB 04

INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN MENINGKATKAN POTENSI PEMBIAYAAN



Pembiayaan kepada UMKM pada 2023 tumbuh positif didukung kuatnya peran perbankan dan IKNB dalam mendorong inklusi ekonomi dan keuangan.

Pada 2023 kredit UMKM masih tumbuh positif sebesar 8,03% (yoy), meski melambat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM terutama dikontribusikan oleh segmen mikro, serta didukung kebijakan Pemerintah terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peran IKNB, terutama PP dan *fintech* turut mendorong pembiayaan kepada UMKM. Inovasi pembiayaan melalui kanal digital menjadi salah satu strategi lembaga keuangan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM. Pertumbuhan kredit UMKM dengan memanfaatkan berbagai model pembiayaan oleh perbankan menjadi katalisator peningkatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Dalam rangka mendukung pencapaian RPIM, Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan lembaga keuangan dalam pengembangan model bisnis dan fasilitasi *business matching* pembiayaan UMKM, serta memberikan apresiasi kepada bank yang mendukung pembiayaan inklusif Bank Indonesia Award (BI Award).

Inklusi ekonomi dan keuangan juga tumbuh baik di sisi syariah melalui sektor keuangan komersial dan sosial, serta pemberdayaan pelaku usaha syariah.

Pembiayaan inklusif perbankan syariah kepada UMKM tumbuh positif terutama ditopang pembiayaan ke usaha mikro dan kecil. Selain melalui jalur keuangan komersial, inklusi keuangan juga membaik didorong meningkatnya kinerja keuangan sosial syariah. Sektor keuangan sosial syariah Indonesia berperan penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana ZISWAF dalam mendorong daya beli dan kemampuan

usaha kelompok ekonomi lemah (dhuafa'). Inovasi baik di sisi pembiayaan syariah maupun pemberdayaan pelaku usaha syariah (UMKM) terus dilakukan untuk mendukung berkembangnya ekosistem *Halal Value Chain* (HVC), khususnya sektor pertanian, makanan-minuman halal, fesyen muslim (*modest fashion*), dan Pariwisata Ramah Muslim (PRM).

Sinergi dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau serta perlindungan konsumen juga terus diperkuat.

Empat pilar program UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM terutama UMKM pangan, pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, program digitalisasi UMKM, dan perlindungan konsumen. Peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perluasan akses pasar domestik maupun ekspor melalui program promosi perdagangan yang dilaksanakan secara *selected* dan *targeted* terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Selanjutnya, dukungan kepada UMKM untuk melakukan transformasi dan penguatan ekosistem digital menjadi kunci upaya peningkatan daya saing nasional dan internasional. Dari sisi edukasi dan literasi, program peningkatan akses dan literasi keuangan diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi serta pengembangan modul dan pedoman pemanfaatan layanan keuangan digital oleh UMKM melalui penyusunan panduan penggunaan *Digital Financial Services* (DFS). Pelindungan konsumen juga diperkuat sebagai bagian dalam kebijakan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau). Kebijakan perlindungan konsumen diselenggarakan dengan prinsip MATRIC yaitu *Massive, Technology-based, Responsive, dan Consumer Centric*.

Perbankan terus mendorong pertumbuhan inklusi ekonomi dan keuangan dengan penyaluran kredit UMKM terutama di segmen mikro. Kredit UMKM 2023 masih tumbuh positif sebesar 8,03% (yoy), meski melambat dibanding 2022 sebesar 10,47% (yoy), terutama dikonstruksikan oleh segmen mikro dengan pertumbuhan 24% (yoy) (Grafik 4.1.1). Dengan pertumbuhan tersebut, maka pangsa kredit UMKM dibanding total kredit industri perbankan pada Desember 2023 mencapai 20,6%. Pertumbuhan kredit UMKM juga diikuti dengan rasio NPL yang terjaga pada level 3,7%, meski meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,41%. Dari sisi sektoral, penyaluran kredit UMKM ditopang pertumbuhan kredit di sektor Listrik, Gas dan Air, Pengangkutan, Pertambangan, dan Pertanian (Tabel 4.1.1). Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM didukung kebijakan Pemerintah yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi KUR 2023 sebesar Rp260,09 triliun atau mencapai 87,57% dari target Rp297 triliun, dengan rasio NPL KUR yang terjaga rendah pada level 2,03%. Berdasarkan total baki debit, KUR yang telah disalurkan mencapai Rp482 triliun kepada 44,4 juta

Grafik 4.1.1. Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM per Segmen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

debitur dengan debitur KUR pada 2023 mencapai 4,6 juta debitur dengan segmen terbesar di skala mikro mencapai 81,5% atau 3,7 juta debitur.

Pemerintah mendorong perluasan akses KUR dan inklusi keuangan kepada debitur baru dengan penerapan suku bunga berjenjang. Pada 2023, perubahan kebijakan KUR dilakukan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator

Tabel 4.1.1 Tabel Kredit UMKM per 9 Sektor Ekonomi

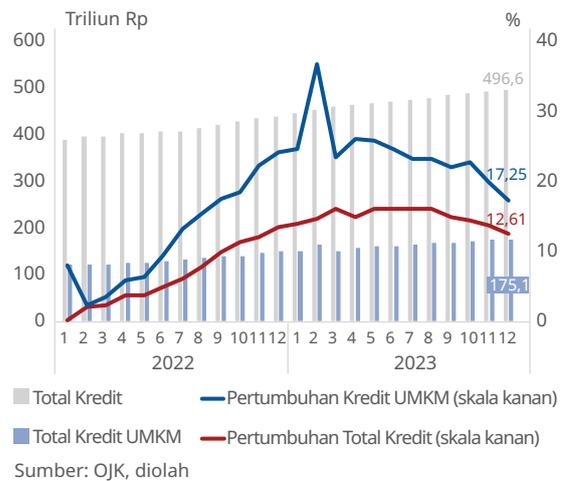
Sektor	Pertumbuhan Kredit UMKM (% yoy)			NPL Kredit UMKM (%)			Pangsa Kredit UMKM (%)
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1. Pertanian	24,59	30,65	13,94	1,86	1,54	2,15	18,00
2. Pertambangan	11,57	-21,06	15,07	3,81	5,37	4,68	0,56
3. Industri	13,80	5,84	7,07	4,23	3,45	4,06	9,97
4. Listrik, gas, air	-5,73	-6,37	23,41	3,50	2,88	2,22	0,30
5. Konstruksi	-2,67	-9,24	4,23	12,75	10,81	9,62	3,74
6. Perdagangan	13,54	8,76	4,99	3,53	3,58	3,89	51,72
7. Pengangkutan	-1,95	8,10	15,30	4,50	3,17	3,36	3,58
8. Jasa Dunia Usaha	-6,92	5,77	10,20	5,41	3,96	4,11	4,68
9. Jasa Sosial	12,75	10,66	14,20	2,19	2,30	2,75	7,46
Total	12,19	10,47	8,03	3,83	3,41	3,71	100,00

Sumber: Bank Indonesia, diolah

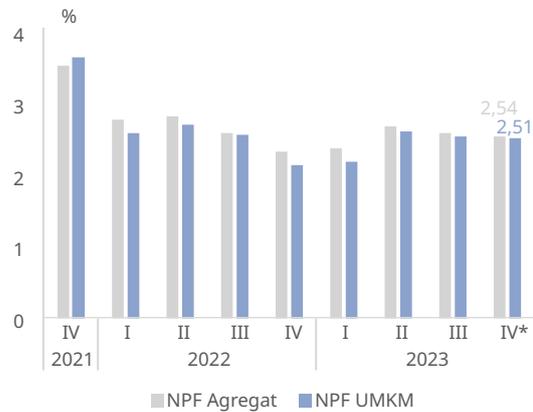
Perekonomian No. 1 Tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan KUR kepada calon debitur baru dan mendorong debitur naik kelas. Penyesuaian fundamental dari kebijakan KUR tersebut adalah penerapan suku bunga/margin berjenjang bagi debitur KUR berulang. Selain itu, dilakukan reformulasi kriteria calon penerima KUR untuk menghilangkan praktik perpindahan dari debitur kredit komersial menjadi debitur KUR. Sebagai upaya mendorong penyaluran KUR di skala usaha ultra mikro, dilakukan perubahan suku bunga/margin KUR super mikro (plafon s.d. Rp10 juta) menjadi 3% yang sebelumnya sebesar 6%. Dengan berbagai penyesuaian tersebut diharapkan penyaluran KUR lebih tepat sasaran, mendorong debitur KUR naik kelas, memperluas penyaluran KUR kepada debitur baru, dan menjaga kredibilitas penyaluran.

Peningkatan intermediasi kepada UMKM juga didukung oleh PP dan *fintech*. Pada 2023, pertumbuhan pembiayaan UMKM yang disalurkan PP tumbuh sebesar 17,25% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya (Grafik 4.1.2), disertai dengan tingkat risiko yang terjaga dengan rasio NPF pada level 2,51% (Grafik 4.1.3). Sementara pembiayaan UMKM oleh *fintech* mengalami pertumbuhan sebesar 7,6% (yoy) (Grafik 4.1.4). Pertumbuhan pembiayaan UMKM oleh PP dan *fintech* tidak lepas dari dukungan inovasi dan digitalisasi, sehingga memberi kemudahan

Grafik 4.1.2 Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Perusahaan Pembiayaan



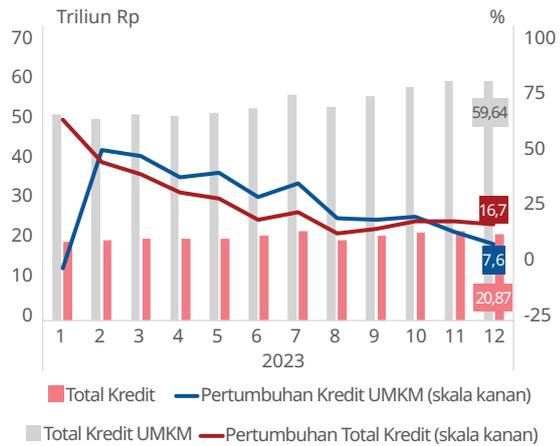
Grafik 4.1.3 Risiko Pembiayaan UMKM oleh PP



kepada UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan untuk mendapatkan alternatif layanan keuangan dan pembiayaan.

Pembiayaan di segmen ultra mikro juga mengalami pertumbuhan yang baik. Pembiayaan kepada segmen ultra mikro baik oleh bank maupun IKNB turut mendorong pencapaian target kredit UMKM. Pembiayaan ultra mikro oleh bank mencapai sekitar Rp76,85 triliun, sebesar Rp39,65 triliun diantaranya disalurkan secara langsung dan Rp37,2 triliun lainnya disalurkan melalui IKNB seperti PNM, PT Pegadaian, dan koperasi. Selain itu, realisasi pembiayaan ultra mikro yang berasal dari dana PIP terus mengalami peningkatan. Pada 2023 mencapai Rp9,48 triliun yang disalurkan kepada 2,21 juta debitur (Grafik 4.1.5). Sebagian besar pembiayaan ultra mikro PIP disalurkan melalui PT Permodalan Nasional Madani (88%) sebagai penyalur langsung dan PT Bahana Artha Ventura (7,3%) sebagai penyalur *linkage*. Pembiayaan ultra mikro oleh IKNB, disertai dengan pendampingan dan pembinaan kepada debitur untuk memastikan keberlanjutan usaha debitur. Mayoritas penerima pembiayaan ultra mikro adalah perempuan dan kelompok berbasis komunitas.

Grafik 4.1.4 Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Fintech Lending



Sumber: OJK, diolah

Grafik 4.1.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro



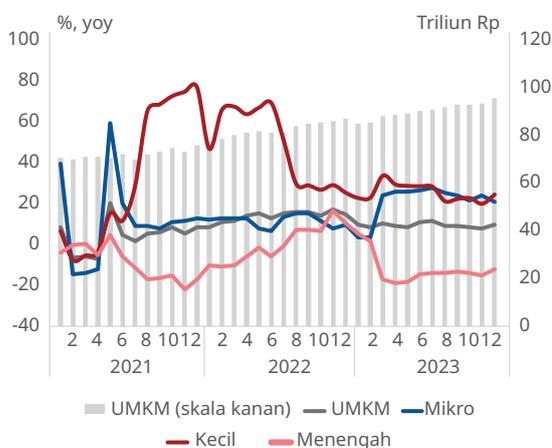
Sumber: SIKP Ultra Mikro, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, diolah

Pembiayaan inklusif syariah tumbuh positif tercermin dari kinerja pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM yang tumbuh positif. Pembiayaan kepada UMKM per Desember 2023 tumbuh cukup baik mencapai 9,84% (yoy), meski tidak setinggi pada 2022 sebesar 15,80% (Grafik 4.2.1). Pertumbuhan tersebut ditopang meningkatnya pembiayaan ke usaha mikro dan kecil, meski tertahan kontraksi penyaluran ke usaha menengah yang makin dalam, khususnya terkait pembiayaan non-KUR. Pembiayaan KUR sendiri masih terus meningkat khususnya ditopang oleh penetrasi bank penyalur KUR KBMI 3 dan KBMI 1. Secara sektoral, pertumbuhan pembiayaan ke UMKM pada 2023 utamanya didorong meningkatnya pembiayaan ke sektor manufaktur dan jasa lainnya, meski relatif tertahan melambatnya penyaluran ke sektor perdagangan dan pertanian sejalan dengan melambatnya kinerja kedua sektor ini dalam PDB 2023.

Selain melalui jalur keuangan komersial, inklusi keuangan juga membaik didorong meningkatnya kinerja keuangan sosial syariah. Sektor keuangan sosial syariah berkembang

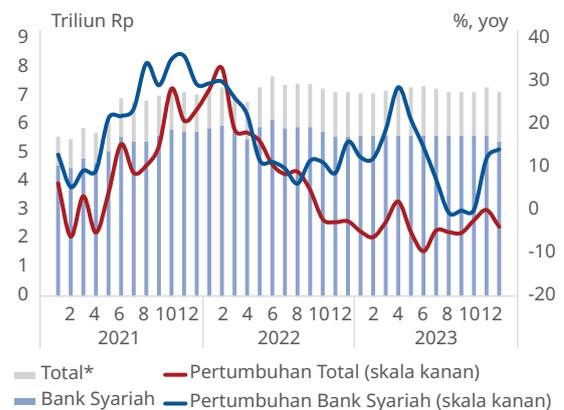
dengan baik didukung potensi besar filantropi masyarakat Indonesia. *World Giving Index* (WGI) 2023 yang diluncurkan oleh Charities Aid Foundation (CAF) kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia untuk keenam kalinya sejak 2018. Predikat tersebut menunjukkan keberhasilan para pegiat filantropi, khususnya badan dan lembaga pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), dalam menggalang, mengelola, dan mendayagunakan dana keuangan sosial syariah. Membaiknya kinerja pengumpulan dana keuangan sosial masyarakat terindikasi dari peningkatan DPK di perbankan syariah milik Badan Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang tumbuh 14,4% (yoy) (Grafik 4.2.2). Selain itu, pengumpulan dan penyaluran keuangan syariah melalui perbankan juga meningkat pada 2023, terutama didorong pertumbuhan zakat dan infak/sedekah (Grafik 4.2.3). Potensi besar keuangan sosial syariah tersebut berperan penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana ZISWAF dalam mendorong daya beli dan kemampuan usaha kelompok ekonomi lemah (*dhuafa*).

Grafik 4.2.1 Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

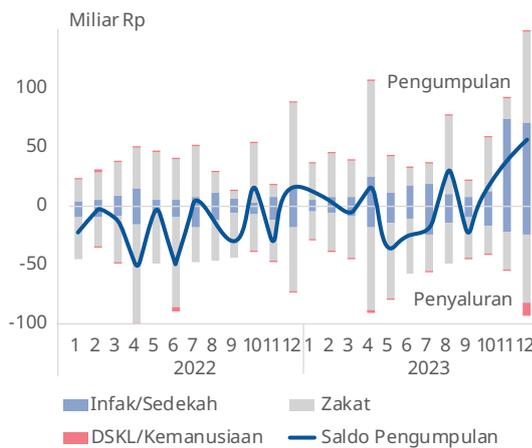
Grafik 4.2.2 Perkembangan DPK BAZIS



*Total golongan nasabah lembaga Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah BANK UMUM (BAZIS- Asing, swasta, dan campuran)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2.3 Pengumpulan dan Penyaluran Keuangan Sosial Syariah Antarbank



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berbagai inovasi dilakukan untuk mengintegrasikan keuangan komersial dan sosial syariah (*blended finance*) guna memberdayakan masyarakat prasejahtera dan mendukung UMKM naik kelas. Implementasi integrasi sektor komersial dan sosial syariah antara lain dilakukan dalam bentuk pengembangan aset wakaf produktif melalui konsep *blended finance* di Indonesia. Salah satu upaya yang telah diinisiasi sejak 2022 lalu adalah kerja sama internasional dengan Awqaf Properties Investment Fund (APIF) yang merupakan *subsidiary* dari Islamic Development Bank (IsDB) untuk dapat menyalurkan pembiayaan ke berbagai proyek pengembangan aset wakaf agar menjadi lebih produktif. APIF memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan global terhadap inovasi instrumen *blended finance* berupa penghargaan *IsDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economic* pada 2023 atas instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dimana konsep modelnya telah diadopsi oleh berbagai negara.

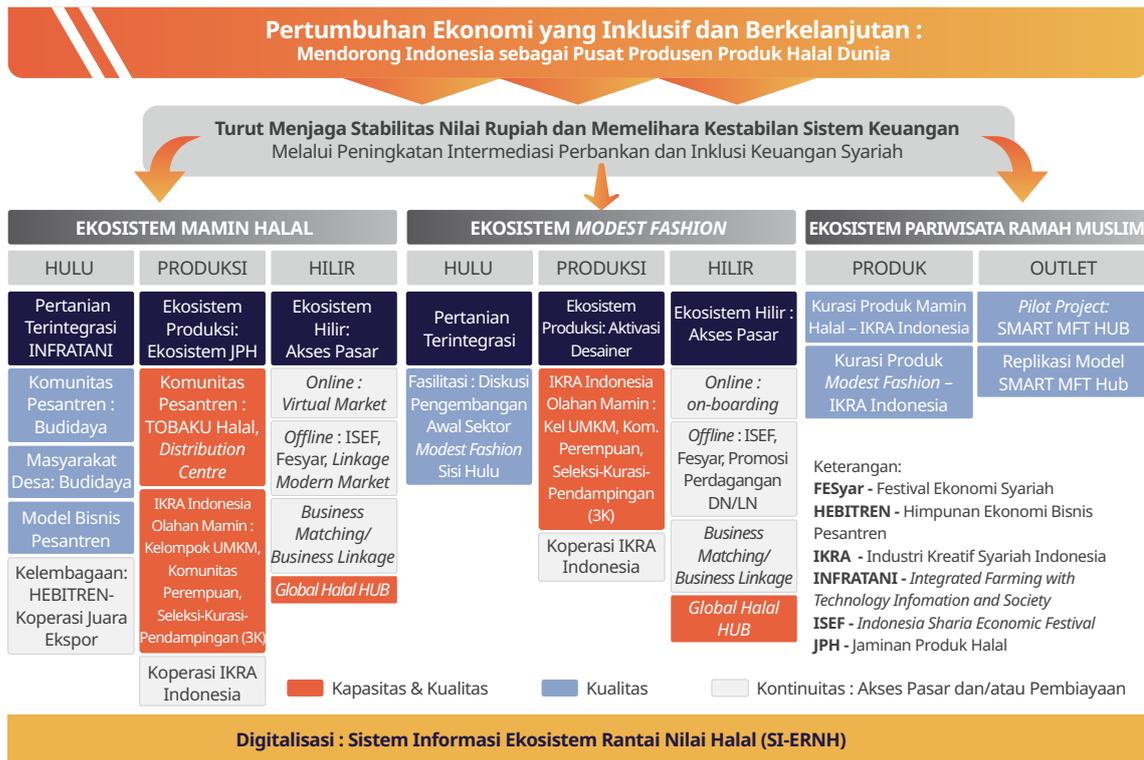
Berbagai inovasi di sisi pembiayaan syariah tersebut juga diiringi upaya pemberdayaan pelaku usaha syariah (UMKM) untuk mendukung berkembangnya ekosistem *Halal Value Chain* (HVC). Sehubungan dengan penguatan peran Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

sesuai mandat UU PPSK, pengembangan ekonomi syariah pada 2023 diperkuat untuk semakin mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Penguatan tersebut dilakukan dengan mendorong terbentuknya ekosistem HVC, khususnya sektor Makanan-minuman halal termasuk pertanian, Fesyen muslim (*modest fashion*), dan Pariwisata Ramah Muslim (PRM) (Gambar 4.2.1). Pengembangan juga difokuskan pada pelaku usaha syariah kelompok UMKM berbasis komunitas, yaitu komunitas pesantren, perempuan, maupun desa, dengan menyoar penguatan Kapasitas, Kualitas, dan Kontinuitas (3K).

Pengembangan ekosistem HVC makanan-minuman halal, termasuk sektor Pertanian, difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi. Di sisi hulu, program *Integrated Farming with Technology Information and Society* (INFRATANI) dilakukan dengan mengembangkan model bisnis beberapa produk pertanian di komunitas pesantren dan desa guna meningkatkan pasokan dan produktivitas. Di sisi produksi, program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha syariah sektor makanan-minuman halal yang semakin luas dan berkualitas. Di sisi hilir, dilakukan pengembangan virtual *market* dan inisiasi *linkage* dengan industri menengah-besar, serta peningkatan akses pasar halal nasional dan global guna perluasan jaringan dan promosi perdagangan. Selama 2023, telah dilaksanakan tiga kali promosi perdagangan luar negeri untuk produk makanan-minuman halal sebagai bagian dari upaya penetrasi pasar di Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Malaysia, serta promosi dalam negeri melalui keterlibatan dalam ISEF 2023 dan Muslim *Life Fest* 2023. Bank Indonesia bersama *stakeholders* terkait juga terus mendukung penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) secara *end-to-end* dari sisi hulu, produksi, dan hilir, untuk mencapai target sertifikasi halal nasional.

Pengembangan ekosistem HVC sektor fesyen muslim (*modest fashion*) diarahkan untuk mendukung stabilitas harga bahan baku dan meningkatkan intermediasi pembiayaan.

Gambar 4.2.1 Kerangka Pengembangan Pelaku Usaha Syariah untuk Mendukung Ekosistem HVC



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Di sisi hulu guna mengurangi impor bahan baku fesyen, pada 2023 Bank Indonesia telah menginisiasi berbagai sinergi, diantaranya kajian bersama Dewan Serat Indonesia yang menghasilkan identifikasi pemetaan perusahaan tekstil Indonesia dalam memproduksi produk tekstil berstandar internasional. Selain itu, memfasilitasi kolaborasi pelaku usaha industri fesyen untuk menguasai pasar domestik secara maksimal dan pengakuan *brand* secara global. Di sisi hilir, selama 2023 melalui program IKRA, Bank Indonesia bersinergi dengan para mitra strategis telah melaksanakan dan mengikuti empat kali promosi perdagangan domestik dan enam kali promosi perdagangan luar negeri sebagai bagian dari uji coba penetrasi pasar di UEA, Perancis, Afrika Selatan, Inggris, Korea, dan Jepang dalam rangkaian kegiatan *Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF)*.

Pengembangan sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) mengamplifikasi perkembangan sektor makanan-minuman halal dan fesyen muslim guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan inklusif. Hal ini mengingat sebagian besar sektor PRM merupakan

pelaku UMKM yang bergerak di bidang, antara lain penyediaan akomodasi, penyediaan transportasi, penjualan cinderamata, sehingga memiliki daya ungkit yang cukup besar. Dalam rangka mendorong optimalisasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarpihak dalam pengembangan PRM, telah dibentuk Kelompok Kerja *Indonesia Muslim Friendly Tourism Forum*. Inisiasi pengembangan PRM 2023 dilakukan Bank Indonesia bersama sejumlah mitra strategis melalui penyusunan kajian kerangka model ekosistem PRM, yaitu *Sustainable Muslim Attractive Tourism – Muslim Friendly Tourism Hub (SMART-MFT Hub)*. Konsep model ekosistem tersebut kemudian diterapkan dalam bentuk *piloting* di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya, agar dapat mengembangkan sektor PRM Indonesia dengan lebih terencana, sistematis, dan terukur, telah disusun *Indonesia Muslim Friendly Tourism Index (IMTI) 2023* yang memberikan gambaran mengenai berbagai provinsi yang telah berhasil memosisikan diri mereka sebagai destinasi utama bagi wisatawan muslim.

4.3

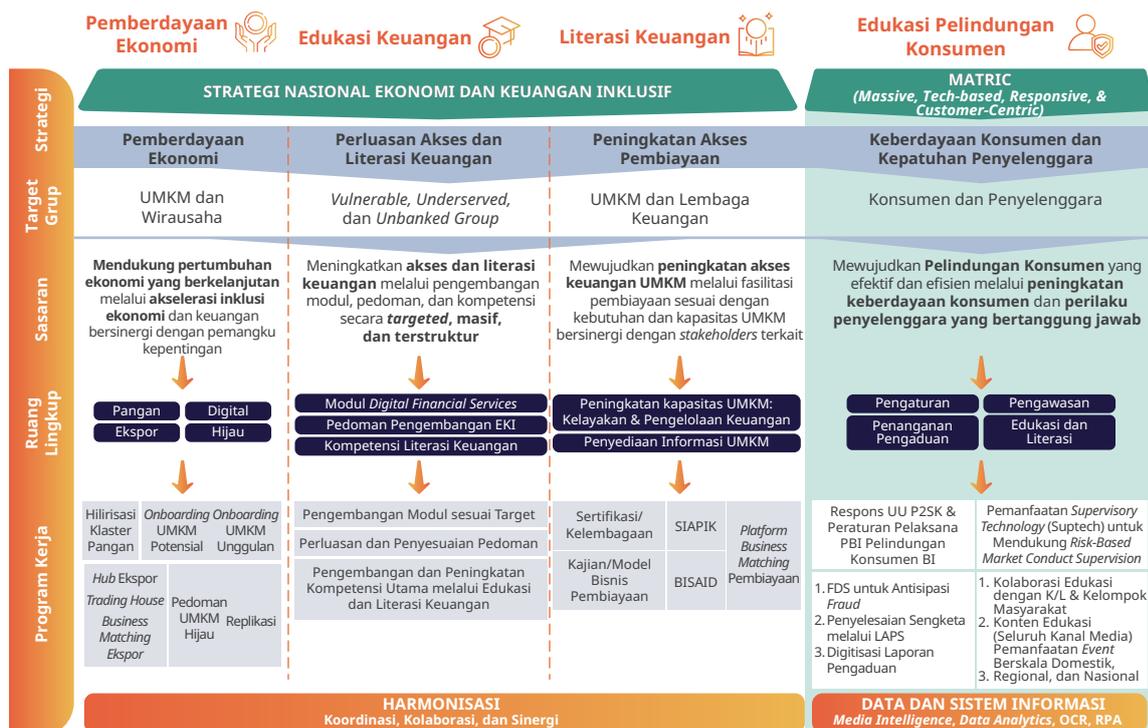
Pengembangan UMKM Terus Didorong untuk Pertumbuhan yang Inklusif

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau dan edukasi perlindungan konsumen. Dalam implementasinya, Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif terutama melalui pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM perlu didorong karena peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM tercatat memiliki kontribusi terhadap PDB 61% dengan penyerapan tenaga kerja 97%. Bank Indonesia melakukan penguatan pada empat pilar implementasi strategi nasional ekonomi dan keuangan inklusif (Gambar 4.3.1), yaitu pemberdayaan ekonomi, perluasan akses dan literasi keuangan, peningkatan akses pembiayaan, serta perlindungan konsumen. Pada pilar strategi pemberdayaan ekonomi, fokus program diarahkan pada 3 (tiga) aspek penting: (i) peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM serta kelompok terutama melalui pengembangan UMKM pangan; (ii) transformasi UMKM agar mampu naik kelas

melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau; dan (iii) penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM.

Pilar strategi pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi utamanya melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM Pangan. Kompetensi petani diperkuat melalui pemanfaatan teknologi termasuk implementasi *digital farming*, penerapan budidaya pertanian ramah lingkungan dan hilirisasi. Per akhir 2023, Bank Indonesia membina 262 UMKM/klaster pangan yang terdiri dari 218 klaster pangan utama (bawang merah, cabai, dan padi), serta 44 klaster pangan lainnya (komoditas hortikultura, peternakan dan perikanan). UMKM/klaster pangan tersebut melibatkan peran aktif dari 28.459 petani dan lebih dari 50.000 tenaga kerja. Implementasi berbagai *best practice* tersebut telah

Gambar 4.3.1 Strategi Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

menghasilkan lebih dari 30 UMKM klaster pangan yang mengalami peningkatan produktivitas di atas 10%. Guna mendorong perluasan aspek pasar, dikembangkan program inovasi hilirisasi melalui pembuatan pasar lelang yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak, fasilitasi kemitraan dengan *offtaker* seperti industri pangan olahan, pasar modern, termasuk *e-commerce* pertanian.

Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM juga dilakukan dengan mendorong perluasan akses pasar domestik maupun ekspor melalui program promosi perdagangan yang dilaksanakan secara *selected* dan *targeted*. Dukungan perluasan pasar perlu dilakukan karena hanya 15% UMKM yang telah melakukan ekspor dengan nilai ekspor baru mencapai 4% dari kinerja ekspor Indonesia. Pada 2023, Bank Indonesia melakukan sinergi dengan Kementerian terkait untuk memperluas akses pasar ekspor produk UMKM melalui fasilitasi pada 23 *event* promosi perdagangan internasional melibatkan 224 UMKM. Promosi perdagangan internasional baik dalam bentuk *Business to Business* (BTB) dan *Business to Consumer* (BTC). Peran aktif UMKM dalam berbagai *event* tersebut telah menghasilkan penjualan langsung senilai 1,01 juta dolar AS yang meningkat sebesar 354% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 221,8 ribu dolar AS. Pelaksanaan promosi perdagangan juga diarahkan pada program atau kegiatan yang bersifat berkelanjutan, salah satunya melalui pembentukan *trading house*³⁰. Indonesia House of Bean (IHOB) di Tokyo, Singapura, dan Malaysia, menjadi contoh *trading house* produk UMKM kopi binaan Bank Indonesia yang dibangun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan KBRI dan pengusaha lokal di masing-masing negara tersebut. Guna mendukung UMKM memasuki pasar global, pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai inisiasi meliputi penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI), penyediaan panduan (modul) ekspor, penajaman *e-catalogue* dan pengembangan *platform hub*

30 *Trading House* adalah rumah dagang bersama yang berfungsi sebagai sarana perdagangan atau *commercial intermediaries* yang juga sebagai agregator-konsolidator pemasaran produk UKM-IKM dalam bertransaksi dagang yang fokus pasar internasional

ekspor www.indonesiasmehub.com. Platform tersebut menyediakan berbagai informasi ekspor serta memfasilitasi pelaksanaan *business matching* dan *business meeting* dengan *potential buyer*.

Transformasi dan penguatan ekosistem digital menjadi kunci upaya peningkatan daya saing nasional, termasuk dalam meningkatkan kinerja usaha dan akses pembiayaan UMKM.

Tercatat 25,2 juta pelaku UMKM di Indonesia telah masuk ekosistem digital dan memanfaatkan *e-commerce* dan akan terus didorong untuk mencapai target 30 juta UMKM *onboarding* pada 2024. Upaya digitalisasi UMKM Bank Indonesia antara lain dilakukan melalui program edukasi dan fasilitasi *onboarding* oleh 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Bangga Berwisata #diIndonesiaAja (BBWI). Digitalisasi UMKM tidak hanya untuk UMKM pemula, tetapi juga untuk memperkuat kualitas UMKM yang telah berada dalam ekosistem digital agar lebih berdaya saing dan *sustainable*. Program dilakukan melalui empat tahapan yaitu persiapan, edukasi, pendampingan, dan *monitoring* dengan total UMKM sukses *onboarding* secara akumulatif sampai dengan Triwulan IV 2023 sebanyak 1.612 UMKM.

Pengembangan UMKM juga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM hijau. Penerapan praktik hijau pada UMKM diharapkan dapat memperluas akses pasar serta pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan model bisnis pengembangan UMKM hijau yang dikembangkan Bank Indonesia, praktik hijau UMKM dibagi menjadi tiga kategori yaitu *eco-adopter*, *eco-entrepreneur* dan *eco innovator* dengan indikator produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan. Berdasarkan *self-assessment* dari 538 UMKM binaan/mitra Bank Indonesia, terdapat 162 UMKM yang dikategorikan UMKM hijau (52 UMKM sektor pertanian dan 110 UMKM sektor kerajinan), mayoritas berada di tahap *eco-adopter*.

Pilar strategi perluasan akses dan literasi keuangan terus didorong oleh Bank Indonesia sebagai gerbang masuk UMKM dan kelompok subsisten pada ekonomi dan keuangan yang inklusif. Program peningkatan akses dan literasi keuangan diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM dan kelompok subsisten. Program tersebut dilakukan melalui kombinasi pendekatan sisi *supply* dengan terus mempercepat berkembangnya ekosistem EKD, dan pendekatan sisi *demand* melalui program literasi keuangan dan keberdayaan konsumen. Di samping itu, sebagai implementasi *framework* Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI), Bank Indonesia juga melaksanakan berbagai program pengembangan untuk kelompok subsisten yang terdiri dari tiga aspek utama, yakni: (i) penguatan kapasitas usaha; (ii) penguatan literasi dan akses keuangan; serta (iii) penguatan kelembagaan. Kemudian, dalam rangka mendorong kesadaran, pemahaman, dan adopsi *Digital Financial Services* (DFS), telah disusun materi edukasi dan *lesson plan* (bahan ajar) DFS untuk UMKM. Materi tersebut disusun untuk meningkatkan adopsi DFS oleh *non-user* atau *passive user* DFS, sementara penyusunan *lesson plan* bertujuan untuk mendorong pemanfaatan DFS untuk usaha produktif, khususnya kepada UMKM.

Untuk mendorong perkembangan usaha mikro potensial, program pengembangan bagi kelompok subsisten dengan mengintegrasikan inklusi keuangan dengan pemberdayaan ekonomi. Model bisnis pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif berbasis kelompok subsisten, yaitu sebuah program yang menyo-

kelompok subsisten di antaranya merupakan penerima bansos, serta memiliki rintisan usaha. Saat ini, telah terdapat 91 kelompok subsisten yang dibina oleh Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Dari kegiatan tersebut diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, mengelola keuangan, menggunakan produk dan layanan keuangan, serta penguatan kerja sama agar kelompok usaha mikro subsisten memiliki penghasilan usaha, lebih mandiri dan resilien, serta dapat berkembang menjadi UMKM formal.

Pada pilar strategi peningkatan akses pembiayaan, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung terwujudnya akses pembiayaan UMKM yang sehat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Program peningkatan akses pembiayaan UMKM ditempuh antara lain melalui penguatan program terpadu "AKUBISA" Akses Keuangan UMKM melalui *Business Matching* dan Literasi untuk Peningkatan Daya Saing. Program fasilitasi UMKM "AKUBISA" dilakukan secara *end-to-end process* yang meliputi peningkatan literasi pencatatan keuangan usaha secara digital menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK)³¹, penyediaan *database* informasi profil UMKM potensial dibiayai (BISAID)³² dan pelaksanaan *business matching* pembiayaan. Berbagai program

31 SIAPIK merupakan aplikasi pencatatan informasi keuangan yang membantu dan mendukung UMKM dalam melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan.

32 BISAID sebagai pusat database informasi UMKM potensial dibiayai, yang menyajikan data dan informasi UMKM yang lengkap dan akurat.

dimaksud dilaksanakan untuk mendukung UMKM semakin *bankable* sehingga mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan BI terkait dukungan kepada pembiayaan UMKM adalah kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Realisasi RPIM pada 2023 industri perbankan sebesar 33,55%, meningkat dibandingkan dengan 2022, yaitu sebesar 32,74%. Ke depan, RPIM perbankan diperkirakan meningkat seiring dengan prospek perbaikan kredit UMKM pada 2024 yang didukung faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga, penyaluran program KUR, serta prakiraan omzet UMKM ke depan yang terjaga.

Sinergi Bank Indonesia dengan Kementerian/ Lembaga dan lembaga keuangan dalam mendukung akses pembiayaan UMKM terus diperkuat melalui fasilitasi temu bisnis (*business matching*) pembiayaan. Sebagai upaya penguatan, fasilitasi *business matching* pembiayaan pada 2023 tidak hanya mempertemukan UMKM potensial yang dibiayai oleh sejumlah lembaga keuangan, namun juga melibatkan agregator UMKM. Fasilitasi *business matching* juga mengakomodir berbagai model bisnis pembiayaan melalui *Multi Channel Financing* (MCF) yang melibatkan rantai nilai usaha UMKM dengan mitra, dimana UMKM sebagai pemasok, distributor, atau *end user*. Termasuk dalam pembiayaan MCF adalah skema pembiayaan inti plasma, resi gudang, serta KUR klaster. Fasilitasi *business matching* pembiayaan yang dilaksanakan pada 2023 telah berhasil menghubungkan 340 UMKM dengan 24 lembaga keuangan bank dan bukan bank serta memperoleh realisasi pembiayaan sebesar Rp56,8 miliar.

Pada 2023 Bank Indonesia memberikan apresiasi BI Award kepada bank pendukung pembiayaan inklusif mengusung tema "Bank Pendukung Ketahanan Pangan Terbaik". Apresiasi diberikan kepada perbankan yang secara optimal mendukung dan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di sektor pangan strategis, sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)³³. Penilaian BI Award tersebut memperhitungkan pencapaian lembaga keuangan bank terhadap RPIM sesuai target bank, risiko kredit, serta kontribusi bank dalam penyaluran kredit kepada UMKM di sektor pangan strategis. BI Award Bank Pendukung Pembiayaan Inklusif pada 2023 diberikan kepada tiga bank di KBMI 3 dan 4, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sementara itu apresiasi kepada 3 (tiga) bank di KBMI 1 dan 2 diberikan kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk., PT Bank Mandiri Taspen, dan PT Bank BTPN Syariah, Tbk.

³³ Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif dan berdampak nasional.

Pelindungan konsumen diperkuat guna mendukung akselerasi peningkatan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Kebijakan pelindungan konsumen diselenggarakan dengan prinsip MATRIC yaitu *Massive, Technology-based, Responsive, dan Consumer Centric* untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang dihadapi konsumen di era perkembangan inovasi keuangan digital yang pesat dan kompleks. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat program pelindungan konsumen pada empat aspek strategis, yaitu: (i) penerbitan peraturan tentang pelindungan konsumen Bank Indonesia sebagai respons terhadap UU P2SK; (ii) pengawasan (*market conduct*) yang diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sistem informasi pelindungan konsumen; (iii) perluasan edukasi dan literasi yang salah satu program utamanya adalah Survei Nasional Pelindungan Konsumen tahun 2023 guna mengukur efektivitas pelaksanaan dan menjangking masukan untuk penguatan strategi pelindungan konsumen Bank Indonesia; dan (iv) penanganan pengaduan konsumen melalui optimalisasi kanal dan platform penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen, termasuk penguatan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan pengembangan *fraud detection system* (FDS) yang dilakukan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Framework Strategi Edukasi Pelindungan Konsumen mendorong perluasan program edukasi dan literasi masyarakat. Salah satu prinsip pelindungan konsumen di sektor keuangan dalam UU PPSK adalah edukasi yang memadai. *Framework* Strategi Edukasi Pelindungan Konsumen dilakukan dengan tiga strategi, yaitu (i) konten edukasi yang *updated, targeted, dan customer centric*; (ii) Multi kanal, *above, dan below the line sesuai target segmen*; dan (iii) kolaborasi.

Strategi edukasi pelindungan konsumen Bank Indonesia disusun memenuhi unsur-unsur penting untuk suksesnya implementasi, melalui pemanfaatan teknologi digital, implementasi edukasi yang bersifat *end-to-end*, kolaborasi dengan *stakeholders*, dan implementasi strategi edukasi yang dijalankan dengan luas (Gambar 4.4.1). Implementasi atas *framework* yang disusun tersebut dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui *joint* program dengan Kementerian/ Lembaga, Edukasi Pelindungan Konsumen pada *event* hari besar nasional dan pada berbagai *flagship* Program Bank Indonesia, serta Kampanye Nasional – PeKA (Peduli, Kenali, dan Adukan). Implementasi atas Strategi Edukasi Pelindungan Konsumen juga dilakukan di seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia dengan mengusung tema “Guardian Nusantara” atau “Gerakan Edukasi Pelindungan Konsumen Nusantara”.

Pada 2023, konsumen semakin paham terkait hak dan mampu mengenali risiko yang harus dihindarinya. Berdasarkan Survei Nasional Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (SNPKBI) kepada 13.666 responden yang tersebar di 34 provinsi diperoleh Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) sebesar 64,67 (kritis)³⁴. Hal tersebut memperlihatkan indikasi bahwa konsumen mampu dan berani menyampaikan masalah ketika ada hak yang tidak dipenuhi atau beban berlebih atas kewajiban, serta mampu mengenali risiko dan menghindarinya. Dalam catatan Bank Indonesia pada 2023 terdapat 13.911 pengaduan yang langsung disampaikan konsumen kepada Bank Indonesia dengan permasalahan yang paling sering diajukan setiap bulan yaitu

³⁴ Indeks Keberdayaan Konsumen terdiri dari 5 tingkat mulai dari yang paling rendah yaitu sadar (<20%), paham (20%-40%), mampu (40%-60%), kritis (60%-80%) dan berdaya (80%-100%).

Gambar 4.4.1 *Framework* Strategi Edukasi Pelindungan Konsumen Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

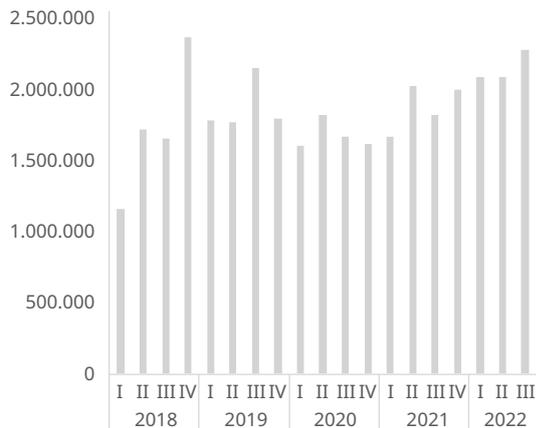
permasalahan dalam Dompot Elektronik (25,51%), pengaduan tentang transfer dana (20,99%), dan etika penagihan kartu kredit (13,87%). Dari seluruh pengaduan yang disampaikan kepada Bank Indonesia 99,38% selesai ditangani kurang dalam 1 hari kerja. Sementara itu pada Triwulan III 2023, pengaduan yang diterima langsung oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), KUPVA dan Lembaga Remitansi tercatat sebanyak 2,29 juta pengaduan, mengalami peningkatan 25,5% (yoy). Pengaduan konsumen didominasi layanan yang diberikan oleh perbankan (69,40%), nonbank (30,59%), dan sisanya BPR (0,01%).

Grafik 4.4.1 Total Pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

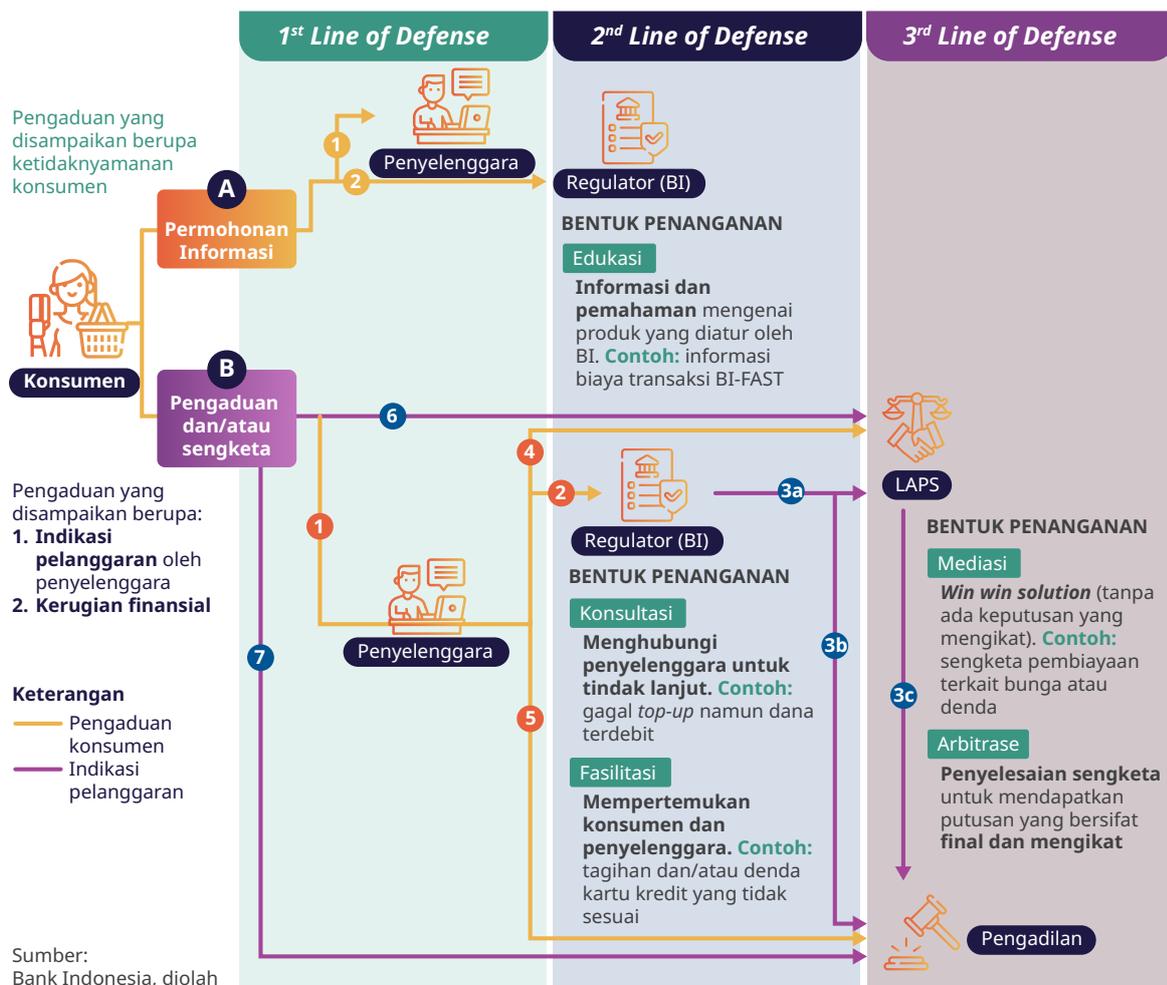
Grafik 4.4.2 Total Pengaduan Konsumen kepada Penyelenggara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Bank Indonesia menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima sesuai dengan mekanisme yang diatur PBI Perlindungan Konsumen. Bentuk tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Bank Indonesia adalah BI dapat memberikan edukasi, konsultasi dengan upaya menghubungi penyelenggara untuk tindak lanjut, serta fasilitasi dengan mempertemukan konsumen dengan penyelenggara. Dalam hal fasilitasi Bank Indonesia terhadap aduan tersebut belum dapat menyelesaikan aduan konsumen, konsumen dapat meneruskan permasalahan tersebut ke pengadilan atau ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan bentuk penanganan berupa mediasi untuk mencapai kesepakatan dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa (Gambar 4.4.2).

Gambar 4.4.2 Tahapan Penanganan Pengaduan Konsumen





Boks 4.1

Dukungan terhadap GBBI/BBWI untuk *Onboarding* UMKM dan Peningkatan Belanja PDN

Peningkatan resiliensi dan kemandirian ekonomi nasional dengan bertumpu pada kemampuan mengelola sumber daya dalam negeri secara berkelanjutan.

Pada 14 Mei 2020, Presiden RI (Bapak Joko Widodo) meluncurkan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk meningkatkan permintaan dan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN). Pada 2022, BBI diperluas dengan penambahan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) guna meningkatkan perjalanan wisatawan domestik.

Sejak 2021, Bank Indonesia konsisten berperan aktif pada pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI didukung oleh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Mengacu pada Keppres No. 15 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gubernur Bank Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Gernas BBI. Pada 2023, Gernas BBI dan BBWI difokuskan pada pencapaian empat *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu (i) peningkatan jumlah UMKM *onboarding* dengan target 30 juta pada 2024; (ii) peningkatan transaksi penjualan UMKM yang berhasil masuk ke dalam ekosistem digital; (iii) aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dengan target 95% belanja Pemda untuk Produk Dalam Negeri (PDN); dan (iv) Bangga Berwisata di Indonesia Aja dengan target 1,2-1,4 miliar perjalanan. Bank Indonesia berperan aktif pada Gernas BBI/BBWI 2023 antara lain melalui penyelenggaraan KKI, ISEF, FESyar, GNPIP, dan Strategic Flagship Event di seluruh KPwDN dengan pelaksanaan kurasi, peningkatan kapasitas, pameran produk, serta *business matching* pembiayaan dan perluasan pasar. Untuk memperluas akses pasar ekspor, kampanye PDN dan promosi pariwisata Indonesia juga dilakukan pada *event* ASEAN di antaranya dalam bentuk *showcasing* produk UMKM.

Peran aktif Bank Indonesia pada Gernas BBI/BBWI 2023 juga ditargetkan untuk mendorong digitalisasi UMKM melalui *onboarding*. Program *onboarding* UMKM mencatatkan capaian sebanyak 3.339 UMKM peserta pelatihan *onboarding* dan mendorong belanja PDN mencatatkan capaian *business matching* penjualan dalam negeri sebesar Rp524,44 miliar. Capaian ini tidak terlepas dari peran Bank Indonesia sebagai *Co-Campaign Manager* bersama Kementerian Pertanian untuk mendukung secara langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Gernas BBI/BBWI pada Juli 2023. Selanjutnya, Bank Indonesia juga berperan dalam reaktivasi Gernas BBI/BBWI di sembilan wilayah melalui kegiatan peningkatan kapasitas UMKM, perluasan QRIS, dan perluasan akses pembiayaan.

Pelaksanaan Gernas BBI/BBWI pada tahun 2024 akan terus diperluas dan diperkuat. Pelaksanaan Gernas BBI/BBWI akan dilaksanakan di 21 provinsi dan difokuskan pada empat KPI yang merupakan kelanjutan dan penguatan KPI pada 2023: (i) peningkatan jumlah UMKM *onboarding* dengan target 30 juta (kumulatif) pada 2024; (ii) belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh K/L dan Pemda dengan target 95% APBN dan APBD; (iii) peningkatan transaksi penjualan UMKM dengan target minimal Rp50 miliar per daerah; serta (iv) 1,25-1,5 miliar perjalanan wisatawan Nusantara dan 14,3 juta wisatawan mancanegara.

Boks 4.2

Kinerja Keuangan UMKM Berdasarkan Survei Laporan Keuangan UMKM (SLKU) Tahun 2023

UMKM mengalami pertumbuhan aset, perbaikan solvabilitas, dan profitabilitas berdasarkan hasil Survei Laporan Keuangan UMKM (SLKU) tahun 2023. Total aset meningkat 4% selama 2023 dengan aset lancar meningkat 8%, sementara aset tidak lancar meningkat 1%. Rasio solvabilitas *Debt Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR) UMKM relatif rendah dan tidak banyak berubah dari tahun 2022 masing-masing tercatat di 3% dan 2,76%. Selanjutnya, rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) juga mengalami perbaikan dari tahun 2022 sebesar 103,7 meningkat menjadi 111,42. Ketiga rasio ini menunjukkan kemampuan UMKM untuk membayar utang yang lebih baik karena UMKM mengalami peningkatan profitabilitas yang ditopang dari efisiensi biaya produksi dan penurunan biaya bunga.

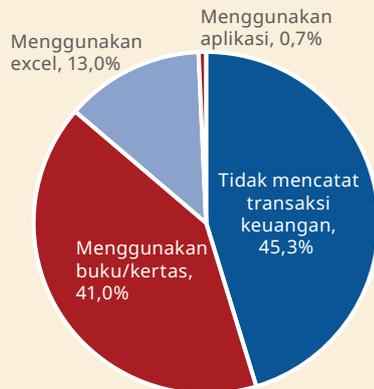
UMKM masih perlu didukasi dan didampingi agar memiliki pemahaman yang baik dalam pembuatan laporan/pencatatan keuangan. Mayoritas responden (45,3%) tidak memiliki pencatatan transaksi keuangan. Alasan utama tidak melakukan pencatatan keuangan adalah karena merasa belum diperlukan, tercampur dengan uang pribadi, dan tidak mengerti cara membuat laporan keuangan. Pencatatan keuangan menjadi penting untuk membantu UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dampak dari lemahnya pencatatan keuangan menyebabkan hanya 19,8% responden yang memiliki pendanaan dari pihak ketiga, sementara mayoritas responden masih mengandalkan permodalan sendiri. Bentuk pinjaman yang paling diminati

Tabel B4.2.1 Rasio Keuangan UMKM

Rasio Keuangan	Indikator	2021	2022	2023
Likuiditas	<i>Current Ratio</i>	5,85	7,08	6,95
	<i>Cash Ratio</i>	3,06	4,90	4,30
Solvabilitas	<i>DER (%)</i>	4,40	3,96	3,03
	<i>DAR (%)</i>	3,96	3,55	2,76
	<i>Debt/EBITDA (%)</i>	35,35	13,31	8,65
	<i>ICR</i>	27,40	103,68	111,42
Profitabilitas	<i>GPM (%)</i>	43,09	46,14	52,61
	<i>NPM (%)</i>	8,72	24,65	26,67
	<i>RoA (%)</i>	8,70	24,24	27,75
	<i>RoE (%)</i>	9,57	27,07	30,54

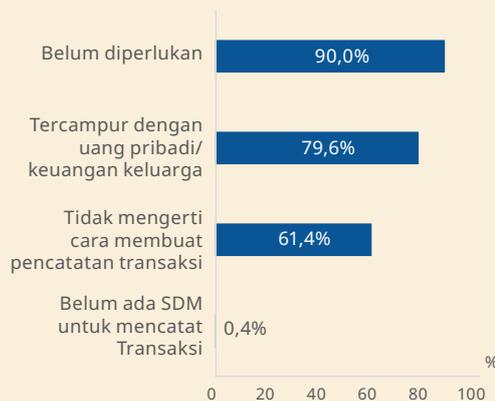
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B4.2.1 Kepemilikan Pencatatan Keuangan



Sumber: Bank Indonesia, SLKU 2023

Grafik B4.2.2 Alasan Tidak Memiliki Pencatatan Keuangan

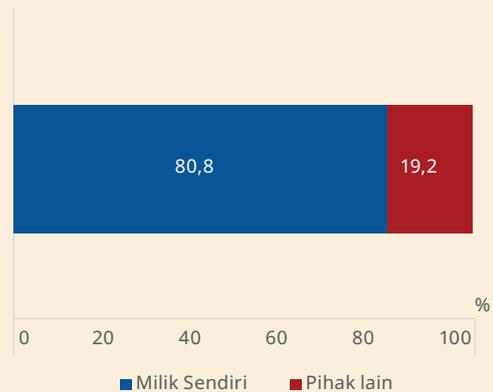


Sumber: Bank Indonesia, SLKU 2023

oleh mayoritas responden (72%) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai kebutuhan di rentang Rp20 juta s.d. Rp500 juta.

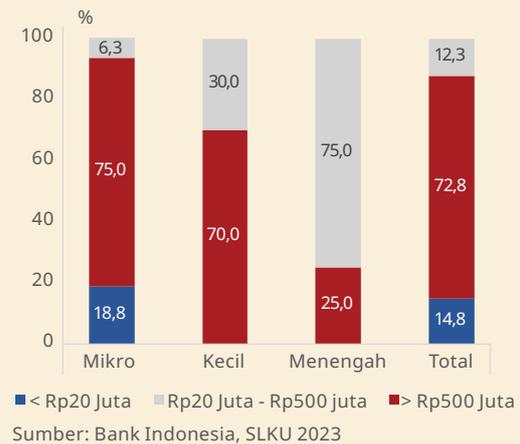
Mayoritas responden UMKM (76,8%) masih belum memiliki rencana investasi pada tahun mendatang. UMKM yang memiliki rencana investasi, mayoritas akan berinvestasi dalam bentuk aset tanah (33%), bangunan (30%), dan peralatan (18%). Masih sangat sedikit UMKM yang berinvestasi dalam bentuk instrumen keuangan dan bentuk investasi lain.

Grafik B4.2.3 Sumber Pendanaan Awal UMKM



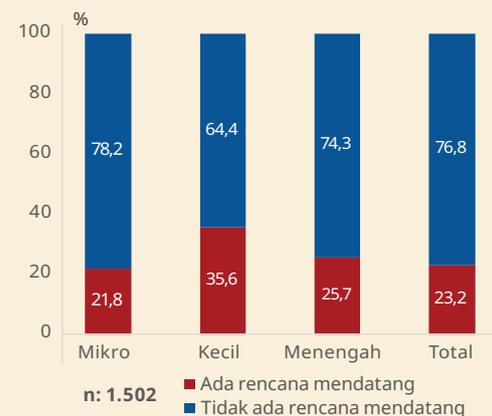
Sumber: Bank Indonesia, SLKU 2023

Grafik B4.2.4 Jumlah Pembiayaan dari Bank



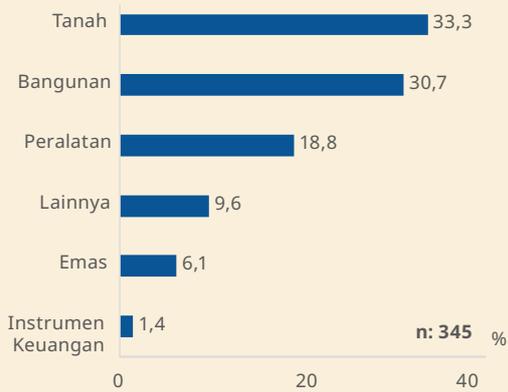
Sumber: Bank Indonesia, SLKU 2023

Grafik B4.2.5 Rencana Investasi



Sumber: Bank Indonesia, SLKU 2023

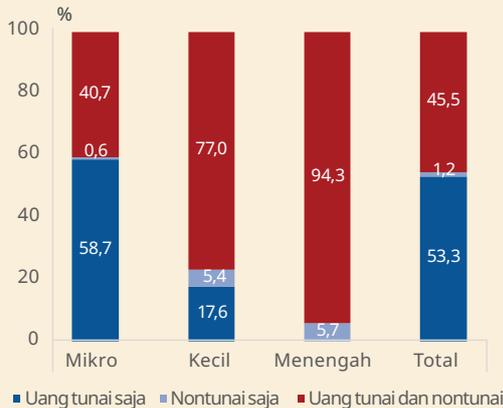
Grafik B4.2.6 Jenis Investasi



Sumber : Bank Indonesia, SLKU 2023

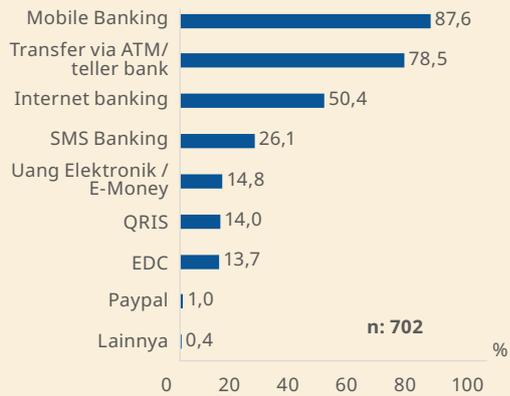
Penggunaan transaksi nontunai masih sebagai model pembayaran alternatif. Sebagian besar UMKM (53,3%) masih menggunakan metode pembayaran berupa uang tunai, diikuti 45,6% menggunakan gabungan dari uang tunai dan nontunai, dan hanya 1,2% yang sudah nontunai. Jenis pembayaran nontunai yang mayoritas digunakan adalah *mobile banking* (88%), *transfer* (78%), *internet banking* (50%), *SMS banking* (26%), dan *uang elektronik* (15%).

Grafik B4.2.7 Metode Pembayaran



Sumber: Bank Indonesia, SLKU 2023

Grafik B4.2.8 Jenis Pembayaran Nontunai



Sumber: Bank Indonesia, SLKU 2023

Secara umum, hasil SLKU tahun 2023 mencatatkan bahwa perkembangan usaha mayoritas responden UMKM lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan kinerja keuangan yang mencatat perbaikan terutama pertumbuhan aset, perbaikan solvabilitas, dan profitabilitas. Ke depan, Bank Indonesia akan lebih aktif untuk mendukung UMKM yang mayoritas masih belum memiliki laporan keuangan dengan program peningkatan literasi pencatatan keuangan usaha secara digital menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.



BANK INDONESIA

BAB 05

RESPONS KEBIJAKAN DALAM MENDORONG INTERMEDIASI



Bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan moneter tetap konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, Bank Indonesia terus melakukan penguatan kebijakan untuk memastikan keselarasan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diimplementasikan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit besar. Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV), dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor dipertahankan longgar. Guna memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, Bank Indonesia menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Selain itu, pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) juga terus dilakukan.

Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan ekonomi dan keuangan inklusif, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, otoritas terkait, dan mitra strategis. Sinergi

dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dilakukan antara lain melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), serta perluasan implementasi QRIS dan penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah. Koordinasi kebijakan nasional melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan guna mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Sinergi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan juga terus dilakukan secara kontinu dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sejalan dengan amanat UU PPSK, Bank Indonesia terus melanjutkan dan memperkuat area kebijakan, khususnya yang terkait kebijakan makroprudensial.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan UU PPSK, selama 2023 Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan yaitu mengenai KLM, Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS), perlindungan konsumen, pasar uang dan pasar valuta asing, serta penerbitan instrumen dan transaksi di pasar uang. Penguatan ketentuan akan terus dilakukan Bank Indonesia dengan memperhatikan batas jangka waktu pembentukan peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam UU PPSK yaitu paling lambat dua tahun sejak UU PPSK diundangkan.

Penerapan bauran kebijakan makroprudensial terus diarahkan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial tersebut ditempuh dengan mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar melalui implementasi KLM, melanjutkan pelonggaran LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, mempertahankan RIM pada level yang akomodatif, serta mempertahankan rasio CCyB pada 0%. Bank Indonesia juga menurunkan rasio PLM untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan implementasi kebijakan RPIM guna mendukung ekonomi-keuangan inklusif, serta melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga perbankan.

Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antara lain dilakukan dengan penguatan implementasi KLM. KLM merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berupa pengurangan persentase kewajiban Giro Wajib Minimum yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Kebijakan ini telah melalui beberapa tahapan reformulasi sejak penerapannya pertama kali pada 2022. Reformulasi KLM yang terakhir³⁵ telah diimplementasikan sejak tanggal 1 Oktober 2023, bertujuan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor tertentu,

termasuk sektor terkait hilirisasi (antara lain minerba, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan), perumahan, pariwisata, inklusi (UMKM, KUR, dan Ultra Mikro), serta kredit/pembiayaan hijau. Total insentif KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 4%, dengan realisasi per Desember 2023 sebesar Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapannya pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp137 triliun dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan insentif sebelumnya per September 2023 yaitu sebesar Rp108 triliun (Boks 5.1).

Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti dan minimum uang muka (UM) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Kebijakan ini dilanjutkan untuk mempertahankan minat dan daya beli masyarakat dalam membeli properti dan kendaraan bermotor yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian. Rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan properti tetap longgar yaitu paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF Total Kredit/Pembiayaan dan rasio NPL/NPF Total Kredit/Pembiayaan Properti. Uang muka KKB/PKB juga tetap longgar yaitu paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor, bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF Total Kredit/Pembiayaan dan rasio NPL/NPF Total Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Pelonggaran LTV/FTV dan UM ini telah diimplementasikan sejak 2021 dan terus diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2024³⁶.

35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

36 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan To Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Bermotor.

Gambar 5.1.1 Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti dan UM Kredit/ Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Fasilitas ke..	Memenuhi Kriteria NPL/NPF				Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF					
	1	≥2	1	≥2	1	≥2	≥3	1	≥2	≥3
Rumah Tapak										
Tipe >70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%
Tipe >21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Tipe ≤21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
Rumah Susun										
Tipe >70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%
Tipe >21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Tipe ≤21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
Ruko/Rukan	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%

*) Kriteria NPL/NPF:
 1. Rasio **Kredit** bermasalah atau rasio **Pembiayaan** bermasalah secara bruto kurang dari 5% (limas persen); dan
 2. Rasio **KP** bermasalah atau rasio **PP** bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen).

Jenis Kendaraan	UM Kendaraan Bermotor Tidak Berawawasan Lingkungan		UM Kendaraan Bermotor Berawawasan Lingkungan	
	NPL memenuhi Persyaratan*	NPL tidak memenuhi*	NPL memenuhi Persyaratan*	NPL tidak memenuhi*
Roda Dua	0%	10%	0%	10%
Roda Tiga/Lebih (nonproduktif)	0%	10%	0%	10%
Roda Tiga/Lebih (produktif)	0%	5%	0%	5%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan. Sejak 1 Desember 2023, rasio PLM untuk Bank Umum Konvensional (BUK) yang semula 6% diturunkan menjadi 5%, dengan fleksibilitas repo sebesar 5%³⁷. Sementara itu, rasio PLM Syariah untuk Bank Umum Syariah (BUS) yang semula 4,5% diturunkan menjadi 3,5%, dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. Penurunan rasio PLM/PLM Syariah ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong

pendalaman pasar keuangan. Dengan adanya penurunan rasio PLM/PLM Syariah ini diharapkan memberikan tambahan ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit/pembiayaan dengan memanfaatkan dana yang sebelumnya digunakan untuk penempatan surat berharga.

Selain penurunan rasio, dilakukan penyesuaian kebijakan PLM/PLM Syariah dengan menambahkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai bagian dari surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM/PLM Syariah³⁸. SRBI merupakan instrumen operasi moneter kontraksi untuk mengelola likuiditas yang sekaligus

37 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

38 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar uang dan stabilitas nilai tukar Rupiah karena dapat ditransaksikan dan dimiliki oleh nonbank, baik penduduk maupun bukan penduduk, di pasar sekunder. Secara keseluruhan, surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM/PLM Syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), SRBI, Sukuk Bank Indonesia (SukBI), dan Surat Berharga Negara (SBN).

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar dengan kebijakan CCyB, RIM, dan RPIM. CCyB dipertahankan sebesar 0% dengan kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga dan belum terdapat indikasi adanya pertumbuhan kredit/pembiayaan yang berlebihan yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Dengan CCyB 0%, bank tidak diharuskan untuk memupuk tambahan modal, sehingga meningkatkan kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan. RIM yang merupakan salah satu instrumen makroprudensial untuk mendorong intermediasi bank, dipertahankan pada kisaran

84-94% untuk terus mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan. Bank Indonesia juga terus mendorong peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan baik dari sisi permintaan pembiayaan melalui penguatan korporatisasi, kapasitas, dan akses pembiayaan UMKM, maupun dari sisi penawaran pembiayaan melalui kewajiban bank dalam pemenuhan RPIM. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan insentif KLM kepada bank atas pencapaian RPIM dan penyaluran kredit ultra mikro.

Guna menjaga transparansi informasi suku bunga, Bank Indonesia rutin mempublikasikan asesmen SBDK dalam siaran pers RDG Bulanan. Transparansi SBDK membuat informasi harga kredit menjadi lebih transparan sehingga meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi di pasar kredit perbankan. Selama 2023, Bank Indonesia terus melakukan penguatan kebijakan transparansi SBDK dengan fokus pendalaman antara lain pada suku bunga kredit sektor-sektor jasa (perdagangan, jasa dunia usaha, pengangkutan, dan jasa sosial), kredit UMKM, serta kredit sektor perumahan dan pariwisata.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas di sektor keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Penguatan sinergi Bank Indonesia dengan anggota KSSK lainnya, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, termasuk upaya meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan pemantauan bersama anggota KSSK, stabilitas sistem keuangan pada Semester II 2023 dinilai masih tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta koordinasi dan sinergi KSSK yang semakin baik. Sebagai tindak lanjut implementasi UU PPSK, koordinasi kebijakan antar-anggota KSSK juga terus diperkuat antara lain melalui pembahasan *cross-cutting issues* antarlembaga dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPSK.

Melalui pelaksanaan Rapat Berkala KSSK pada Semester II 2023, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk bersinergi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui bauran kebijakan dari setiap lembaga. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran kebijakan fiskal dalam mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Dari sisi Bank Indonesia, konsistensi atas *stance* kebijakan moneter terus dilanjutkan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran target, yang didukung oleh penguatan stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit/ pembiayaan, dan penguatan kebijakan sistem pembayaran

dengan mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran. Sementara itu, OJK melanjutkan upaya penguatan industri jasa keuangan dan infrastruktur pasar, diantaranya melalui penyempurnaan penerapan tata kelola bagi bank umum dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi, serta berkoordinasi dengan perbankan, aparat penegak hukum, dan K/L lainnya. Di sisi lain, LPS akan memperkuat kebijakannya terkait penjaminan dan resolusi untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan termasuk dalam menjaga SSK. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memonitor kecukupan penjaminan simpanan sesuai Undang-Undang LPS, memastikan efektivitas mekanisme *early involvement* dalam penanganan permasalahan bank, dan koordinasi dengan anggota KSSK lainnya dalam pelaksanaan resolusi.

Secara bilateral, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK terus diperkuat melalui Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM). Selama 2023, berbagai kebijakan strategis telah dikoordinasikan melalui FKMM. Kebijakan Bank Indonesia yang telah dibahas dalam forum ini adalah Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dan KLM. Selain itu, dalam rangka pendalaman pasar keuangan, penerbitan instrumen keuangan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) turut menjadi fokus pembahasan bersama. Sementara itu, dari sisi OJK, beberapa Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) dan Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) telah diharmonisasikan dengan ketentuan Bank Indonesia melalui FKMM. Lebih lanjut, guna memperkuat analisis kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, kedua otoritas secara intensif melakukan pertukaran data dan informasi, riset bersama, termasuk melakukan *joint stress test*.

Kerjasama bilateral antara Bank Indonesia dan LPS telah diimplementasikan secara konsisten guna mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia terus memberikan dukungan kepada LPS a.l. melalui *sharing* pengetahuan terkait manajemen anggaran dan tata kelola. Bank Indonesia juga melakukan *benchmarking* terhadap praktik ketahanan dan keamanan siber yang dilakukan LPS. Selain itu, kolaborasi intensif dalam pertukaran data dan informasi antara kedua otoritas terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Kerja sama tripartit antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS semakin diperkuat dalam pelaksanaan integrasi pelaporan bank umum, serta harmonisasi kebijakan ketiga lembaga. Sejak 2019, ketiga lembaga telah mengimplementasikan integrasi pelaporan perbankan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang terus diperkuat dengan perluasan berbagai metadata. Integrasi pelaporan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi laporan perbankan. Selain itu, koordinasi tripartit juga dilakukan melalui asesmen bersama antara lain pemutakhiran daftar bank sistemik, yang bertujuan untuk menyinergikan arah kebijakan di ketiga otoritas. Upaya sinergis tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional.

Dari sisi pengembangan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan industri terus dilanjutkan secara konsisten. Sinergi dilakukan melalui program Gerakan Nasional (Gernas)

Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada 2023, program Gernas BBI dan BBWI diselaraskan dengan program strategis Bank Indonesia seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI). Selanjutnya, sinergi dan koordinasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) selain untuk mendukung pengendalian inflasi juga ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM di sektor pangan strategis. Di samping itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama antarnegara terus dilakukan guna mendorong inklusi keuangan dan Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Dalam rangka turut serta mendorong UMKM, sinergi Bank Indonesia dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, asosiasi perusahaan teknologi finansial (*fintech*), dan asosiasi lainnya terus diperkuat untuk memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran yang sudah berjalan seperti QRIS melalui pengembangan fitur *Transfer*, Tarik dan Setor Tunai (QRIS TUNTAS) dan perluasan kerja sama QR antarnegara. Perluasan kerja sama pembayaran berbasis QR *code* lintas negara telah diimplementasikan dengan Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, dan Bank Negara Malaysia, serta akan terus dilakukan inisiasinya dengan negara mitra lainnya. Dengan pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, terutama bagi UMKM, diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan UMKM. Selain itu, penguatan implementasi dan akseptasi kartu kredit Indonesia segmen Pemerintah diharapkan juga dapat membuka peluang bagi UMKM, sebagai mitra Pemerintah, untuk naik kelas dengan tersambung dalam ekosistem EKD nasional.

UU PPSK yang disahkan pada awal 2023 telah memperkuat landasan hukum dan memberikan penegasan kewenangan terkait tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan UU PPSK adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, meningkatkan inklusi ekonomi dan inklusi keuangan, serta keuangan berkelanjutan.

Kewenangan Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial diatur lebih lanjut dalam UU PPSK. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan (i) pengaturan makroprudensial, (ii) pengawasan makroprudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi, (iii) pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, (iv) penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*, (v) *reverse repo* (*repurchase agreement*) dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan likuiditas; dan (vi) koordinasi dengan otoritas terkait.

Sejalan dengan amanat UU PPSK tersebut, Bank Indonesia terus melanjutkan dan memperkuat transformasi di area kebijakan. Bank Indonesia tengah melakukan *revisit* atas kerangka kerja kebijakan makroprudensial

sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, untuk memastikan keselarasannya dengan amanat UU PPSK. Di area kebijakan makroprudensial, penguatan kerangka regulasi pada 2023 telah dilakukan Bank Indonesia melalui penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan penerbitan dan implementasi ketentuan KLM. Penyempurnaan ketentuan PLJP dan ketentuan PLJPS juga dilakukan dalam kerangka penguatan penanganan permasalahan bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bank Indonesia juga telah menerbitkan beberapa ketentuan lain sebagai tindak lanjut amanat UU PPSK, antara lain ketentuan mengenai perlindungan konsumen, pasar uang dan pasar valas, serta penerbitan instrumen dan transaksi di pasar uang. Selain itu, dalam menindaklanjuti penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPSK, Bank Indonesia juga turut serta dalam berbagai pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) antara lain RPP mengenai Derivatif Keuangan dan Aset Kripto, RPP mengenai Penanganan Permasalahan Perbankan, dan RPP mengenai Komite Nasional dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Ketentuan mengenai KLM diterbitkan Bank Indonesia sebagai pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dan pelaksanaan mandat UU PPSK bahwa Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, upaya pengelolaan likuiditas dapat dilakukan Bank Indonesia melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai implementasi dari mandat tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan mengenai KLM yang merupakan insentif yang ditetapkan Bank Indonesia berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum

dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata bagi bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor tertentu. Implementasi KLM diharapkan dapat mendorong kredit/pembiayaan di sektor-sektor tersebut, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Bank Indonesia melakukan penyediaan dana untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas melalui Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (PLJP)³⁹/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS)⁴⁰. Ketentuan mengenai PLJP/PLJPS merupakan penguatan dari ketentuan PLJP/PLJPS sebelumnya, sebagai tindak lanjut amanat Pasal 20 dan Pasal 30 Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPSK) sebagaimana terakhir diubah dalam UU PPSK.⁴¹ Secara umum, penguatan pengaturan PLJP/PLJPS antara lain mencakup:

1. Penguatan persyaratan bagi bank untuk memperoleh PLJP/PLJPS, yaitu bank umum harus memenuhi persyaratan: a) solvabilitas; b) memiliki agunan yang cukup sebagai jaminan PLJP/PLJPS; dan c) memiliki proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJP/PLJPS.
2. Penyesuaian pengaturan mengenai agunan:
 - a. penambahan aset tetap sebagai agunan yang dapat digunakan untuk jaminan PLJP/PLJPS;
 - b. penyesuaian nilai agunan terhadap plafon untuk SBN sesuai *haircut* transaksi operasi moneter;

- c. penyesuaian periode restrukturisasi aset kredit/pembiayaan yang dapat diterima sebagai agunan PLJP pada periode stimulus Covid-19; dan
 - d. penambahan kredit/pembiayaan pensiunan sebagai agunan PLJP/PLJPS.
3. Penyesuaian jangka waktu pemberian PLJP/PLJPS yaitu menjadi paling lama 30 hari kalender setiap periode pemberian PLJP/PLJPS dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak dua periode, sehingga secara keseluruhan maksimum 90 hari kalender.

Selain untuk memperkuat fungsi *lender of the last resort* Bank Indonesia, penyesuaian pengaturan PLJP/PLJPS di atas juga dapat memperkuat skema penanganan permasalahan bank secara keseluruhan khususnya yang terkait permasalahan likuiditas, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga.

Guna memperlancar implementasi PLJP dan PLJPS, Bank Indonesia dan OJK telah memperkuat mekanisme koordinasi. Beberapa tugas dan wewenang yang beririsan antar-otoritas telah disepakati antara lain koordinasi proses permohonan dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan PLJP/PLJPS, dan koordinasi dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu, penambahan atau penggantian agunan, pengawasan bank penerima PLJP atau PLJPS, serta pembayaran kembali dan eksekusi agunan.

Penguatan fungsi perlindungan konsumen merupakan salah satu implementasi dari wewenang Bank Indonesia yang diamanatkan dalam UU PPSK. UU PPSK memperkuat kewenangan otoritas sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia, dalam pengaturan perlindungan konsumen, mencakup hak dan kewajiban konsumen, serta hak, kewajiban, dan larangan bagi penyelenggara, penyesuaian prinsip perlindungan konsumen, pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Penguatan pengaturan perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan melalui penerbitan

39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

41 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Kosumen Bank Indonesia. Penguatan kebijakan dimaksud ditujukan untuk menjawab tantangan bagi terselenggaranya pelindungan konsumen yang efektif di tengah perkembangan ekonomi keuangan digital. Untuk mendukung implementasi prinsip pelindungan konsumen oleh penyelenggara, Bank Indonesia juga telah menerbitkan peraturan teknis⁴². Tujuan utama pengaturan pelindungan konsumen adalah untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pelindungan konsumen dan meningkatkan keberdayaan konsumen. Pengaturan pelindungan konsumen diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, mengeliminasi penyampaian informasi yang menyesatkan, penyalahgunaan kewenangan, dan *fraud*, serta mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan efisien. Pelindungan konsumen yang kuat, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen untuk memanfaatkan layanan keuangan sehingga pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia.

UU PPSK juga memperkuat kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing. Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing bertujuan untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi UU PPSK di pasar uang dan pasar valuta asing dilakukan melalui penerbitan PBI PUVA⁴³. PBI PUVA difokuskan pada tiga aspek, yaitu berkaitan dengan perumusan kebijakan guna mengantisipasi inovasi, pengembangan pasar uang dan pasar

valuta asing, dan sinergi kebijakan. Pengaturan PBI PUVA mencakup aspek produk, harga, pelaku, dan penggunaan infrastruktur. Pengaturan lainnya meliputi data dan informasi pasar uang, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pelindungan konsumen, serta koordinasi dan pengawasan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI PUVA, juga telah diterbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023⁴⁴.

42 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

43 PBI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

44 PADG Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Boks 5.1

Stimulus Likuiditas Makprudensial untuk Mendorong Intermediasi

Perekonomian global dan domestik saat ini berada dalam fase pemulihan pasca berakhirnya pandemi Covid-19. Di sisi global, meskipun pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan membaik, ketidakpastian masih tinggi. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik namun dengan struktur pertumbuhan yang belum kuat. Kinerja konsumsi dan investasi masih perlu didorong untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi tersebut. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan cenderung stabil tecermin dari terjaganya ketahanan perbankan di tengah intermediasi yang tetap tinggi. Kredit/pembiayaan perbankan pada 2023 tetap baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada 2023 mencapai 10,38% (yoy), berada dalam kisaran atas prakiraan Bank Indonesia 9-11%. Dari sisi permintaan, peningkatan kredit/pembiayaan tersebut sejalan dengan kinerja positif korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit/pembiayaan didorong oleh *risk appetite* perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang terjaga baik.

Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dari sisi penawaran perbankan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu inovasi kebijakan makprudensial akomodatif yang diambil Bank Indonesia adalah penguatan stimulus kebijakan makprudensial yang berbasis likuiditas melalui penajaman dan peningkatan besaran insentif makprudensial berupa KLM. KLM efektif diterapkan per 1 Oktober 2023 untuk mendukung likuiditas perbankan. KLM merupakan penyempurnaan dari insentif makprudensial yang telah diterapkan sejak Maret 2022 (rincian perubahan kebijakan sebagaimana Gambar B5.1.1). Insentif makprudensial diberikan dalam bentuk stimulus likuiditas berupa pengurangan atas kewajiban giro bank yang harus ditempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah rata-rata. Dari pengurangan GWM, bank diharapkan mendapatkan kelonggaran likuiditas yang dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan. Insentif

Gambar B5.1.1 Tahapan Kebijakan Insentif Makprudensial



*) Menggunakan data rasio kredit UMKM terhadap Total Kredit
 **) Menggunakan rasio RPIM 2022

***) Kredit/pembiayaan UMi a.l. melalui channeling kepada Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Sumber: Bank Indonesia, diolah

likuiditas diarahkan kepada penyaluran kredit/ pembiayaan perbankan untuk sektor-sektor ekonomi tertentu, yaitu sektor prioritas, sektor inklusi, serta sektor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Realisasi insentif makroprudensial perbankan secara keseluruhan terus meningkat sejak awal implementasinya pada 2022 (Grafik B5.1.1). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa insentif makroprudensial cukup efektif dimanfaatkan oleh perbankan dalam mendorong peningkatan kredit/ pembiayaannya. Dengan melihat efektivitas insentif makroprudensial pada pertumbuhan kredit/ pembiayaan serta dampak positifnya pada pemulihan sektor-sektor prioritas, dilakukan penguatan melalui penajaman sektor kredit/ pembiayaan yang diberikan insentif dan peningkatan besaran insentif kepada perbankan melalui KLM. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit/ pembiayaan yang lebih tinggi. Selain itu, saat ini siklus keuangan masih berada di bawah tren jangka panjangnya. Kondisi tersebut mengonfirmasi ruang pertumbuhan kredit/ pembiayaan perbankan yang masih dapat didorong.

Grafik B5.1.1 Realisasi Besaran Insentif Makroprudensial yang Diterima Perbankan



Sumber:

Bank Indonesia melakukan penajaman pemberian KLM bagi bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor yang memenuhi lima prinsip utama: i) memberi daya ungkit pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan/penguatan nilai tambah (*value added*), memiliki *backward-forward linkages* yang tinggi, serta mendukung struktur ekonomi, lapangan kerja, peluang usaha, dan ketahanan pangan; ii) mendukung momentum pemulihan untuk sektor tertentu (termasuk sektor *scarring* dan *contact-intensive*); iii) mendukung pembiayaan inklusif dan berkelanjutan; iv) diimplementasikan secara *targeted* terhadap pembiayaan ke sektor/ komoditas tertentu; serta v) selaras dan tersinergi dengan kebijakan dan program Pemerintah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ditetapkan kredit/ pembiayaan yang akan didorong adalah pada sektor hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro), serta ekonomi keuangan hijau.

Selain penyesuaian dari sisi cakupan sektor, Bank Indonesia juga meningkatkan besaran KLM dari paling tinggi 2,8% menjadi paling tinggi 4%. Besaran KLM untuk bank penyalur kredit/ pembiayaan pada sektor hilirisasi minerba dan nonminerba (sektor pertanian, peternakan, dan perikanan), sektor perumahan, dan sektor pariwisata, adalah paling tinggi 2%. Besaran KLM untuk bank penyalur kredit/ pembiayaan inklusif yang tecermin dari pencapaian RPIM adalah paling tinggi 1%.

Bentuk perhatian tinggi Bank Indonesia pada keuangan inklusif juga tecermin dari pemberian KLM atas penyaluran kredit/ pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu paling tinggi 0,5%. Terakhir, KLM atas pemberian kredit/ pembiayaan berwawasan

lingkungan menjadi paling tinggi 0,5%. Dengan demikian, bank dapat memperoleh besaran KLM hingga paling tinggi 4% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel B5.1.1 Besaran KLM

Kelompok	Pertumbuhan K/P (%yoy)	Insentif (bps)
Hilirisasi Minerba	≥3-7%	20
	>7%	30
Hilirisasi NonMinerba	≥3-7%	60
	>7%	80
Perumahan	≥3-7%	50
	>7%	60
Pariwisata	≥3-7%	25
	>7%	30

Kelompok	Pencapaian RPIM	Insentif (bps)
Inklusif (RPIM)	≥10-20%	10
	>20-30%	40
	>30-50%	60
	>50%	100

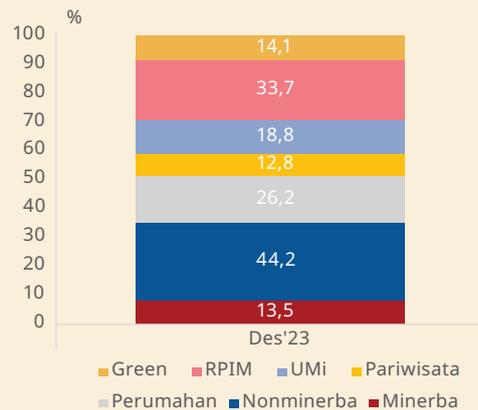
Kelompok	Pangsa K/P Ultra Mikro	Insentif (bps)
Ultra Mikro	>0 - 3%	30
	>3%	50

Kelompok	Pangsa KP/PP dan KKB/PKB Lingkungan	Insentif (bps)
Hijau	>0-5%	30
	>5%	50

Sumber: Bank Indonesia, diolah

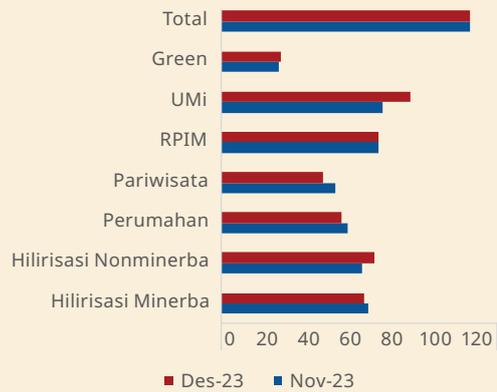
Dengan adanya KLM, diharapkan perbankan dapat lebih meningkatkan *appetite* dan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor yang menjadi target KLM. Per Desember 2023, realisasi KLM sebesar Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapannya pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp137 triliun dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan insentif sebelumnya per September 2023 yaitu sebesar Rp108 triliun (Grafik B5.1.2). Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM yang diterima oleh perbankan syariah mencapai Rp13,98 triliun dan Rp149,3 triliun untuk bank konvensional. Berdasarkan rincian sektornya, mayoritas sektor penyumbang insentif terbesar yaitu sektor inklusi dan sektor hilirisasi nonminerba. Tingginya besaran insentif pada kedua sektor

Grafik B5.1.2 Besaran Realisasi KLM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B5.1.3 Jumlah Bank penerima KLM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

tersebut turut mencerminkan dukungan yang lebih besar dari Bank Indonesia untuk masyarakat kelas bawah dan turut mendukung peningkatan inklusi keuangan dan ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, untuk mendukung implementasi KLM, diperlukan penguatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang terkait. Tahapan

koordinasi dilakukan melalui harmonisasi kebijakan, khususnya pada kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penguatan koordinasi stimulus makroprudensial-fiskal, penguatan koordinasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong skema pembiayaan yang sesuai, mengingat adanya perbedaan skema dan hilirisasi di masing-masing wilayah, serta sosialisasi kebijakan kepada industri perbankan dan pelaku usaha.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus melakukan evaluasi berkala atas efektivitas implementasi KLM. Evaluasi tersebut akan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi dan sistem keuangan terkini. Cakupan sektor dan besaran KLM akan terus dimonitor serta dievaluasi untuk memastikan optimalisasinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Perubahan iklim menimbulkan tantangan baru bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Risiko akibat perubahan iklim memiliki potensi besar yang dapat berdampak sistemik (FSB, 2022) karena sifatnya yang tidak dapat dikembalikan (*irreversible*) dan multidimensi. Sehingga, risiko perubahan iklim menimbulkan dampak yang simultan dan tidak terduga untuk berbagai sektor bahkan negara. Pada gilirannya, fenomena tersebut menimbulkan kerugian keuangan dan menurunkan kemampuan bayar perusahaan yang dapat mengganggu kualitas aset pada sistem keuangan. Untuk itu, dibutuhkan upaya mitigasi dan adaptasi, termasuk transformasi menuju sistem keuangan yang resilien terhadap perubahan iklim. Lebih lanjut, langkah mitigasi dan adaptasi tersebut perlu didukung oleh bank sentral dengan mempertimbangkan risiko dan peluang dari perubahan iklim guna mencapai tujuan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang.

Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) melalui pelaksanaan mandatnya sebagai otoritas moneter dan makroprudensial. Komitmen ini berlandaskan pada kesadaran bahwa perubahan iklim dapat memengaruhi pencapaian tujuan moneter dan stabilitas sistem keuangan pada jangka panjang. Risiko fisik dari perubahan iklim berpotensi menurunkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat memicu volatilitas harga. Di sisi lain, risiko transisi berupa transformasi struktur ekonomi dan perubahan preferensi konsumen merupakan tantangan bagi model bisnis *existing*, sehingga berpotensi menimbulkan *stranded assets* yang dapat menggerus kemampuan bayar dan valuasi aset debitur, serta berdampak pada terganggunya kondisi stabilitas sistem keuangan. Dengan

demikian, kebijakan makroprudensial untuk memitigasi risiko sistemik dari perubahan iklim dipandang sebagai suatu kebijakan yang diperlukan. Hingga saat ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan tiga kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan.

Pertama, Bank Indonesia memberlakukan kebijakan *Loan to Value* (LTV)/*Financing To Value* (FTV) untuk kredit/pembiayaan properti dan Uang Muka (UM) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB) berwawasan lingkungan sejak Desember 2019. Melalui kebijakan ini, LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan (*green building*) dapat diberikan hingga sebesar 100%, sedangkan UM untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat ditetapkan hingga 0%, sejalan dengan asesmen dan manajemen risiko yang dilakukan bank sebagai penyalur kredit/pembiayaan. LTV/FTV dan UM yang lebih longgar berpotensi meningkatkan *demand* dan akses pembiayaan, serta mendukung beralihnya preferensi masyarakat kepada properti dan kendaraan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini diharapkan akan dapat mengakselerasi pertumbuhan keuangan hijau, sekaligus menstimulasi perekonomian tanpa mengabaikan risiko lingkungan.

Kedua, Bank Indonesia menetapkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 guna mendukung pembiayaan inklusif dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank menetapkan target RPIM secara *self-assessment* sesuai dengan kapasitasnya dan memiliki kewajiban untuk mencapai target tersebut dengan periode evaluasi pada setiap akhir tahun. Kebijakan RPIM memperluas modalitas pembiayaan inklusif melalui: (1)

pembiayaan langsung dan rantai pasok; (2) pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan/badan layanan umum/badan usaha; dan (3) surat berharga pembiayaan inklusif (SBPI). Untuk mendukung pertumbuhan keuangan berkelanjutan, jenis surat berharga pada modalitas 3 diperluas dengan mencakup surat berharga untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, bank dapat membeli instrumen keuangan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan target RPIM.

Ketiga, Bank Indonesia mengimplementasikan KLM berupa pengurangan atas kewajiban pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata. KLM diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu, inklusif termasuk usaha ultra mikro, berwawasan lingkungan, dan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023). Melalui KLM, Bank Indonesia memberikan insentif kepada bank secara *tiering* atas pencapaian RPIM yaitu paling tinggi sebesar 1% yang dapat dicapai salah satunya melalui pembelian SBPI. Kebijakan ini juga memungkinkan bank untuk mendapatkan KLM sebesar paling tinggi 0,5%, meningkat dari sebelumnya paling tinggi 0,3%, apabila bank memenuhi pangsa kredit/pembiayaan hijau sebesar lebih dari 5% dari total portofolio kredit/pembiayaan. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi insentif bagi bank untuk mendukung transisi, mempertimbangkan praktik berkelanjutan termasuk dalam menilai kredit/pembiayaan, serta meningkatkan alokasi portofolionya terhadap pembiayaan aktivitas yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan berkelanjutan, kebijakan *existing* Bank Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan kebijakan otoritas terkait lainnya.

Terkait hal ini, Bank Indonesia menjalin koordinasi dan sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bauran kebijakan yang mendukung pertumbuhan keuangan berkelanjutan. OJK pada bulan Februari 2024 telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia untuk memetakan dan mendorong investasi terhadap sektor berwawasan lingkungan. Pemetaan kegiatan usaha ini diharapkan menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan berkelanjutan, antara lain pelaporan berkelanjutan, insentif dan disinsentif, dan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan. Dari sisi fiskal, Kemenkeu mengimplementasikan kebijakan mendorong sektor berwawasan lingkungan baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pendanaan, misalnya relaksasi pajak untuk menarik investasi dan mengakselerasi penggunaan KBLBB, alokasi anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penerbitan instrumen pendanaan hijau seperti *Global Green Sukuk*, *SDG Bond*, dan *Samurai Blue Bond*. Selain melalui sinergi dan koordinasi tersebut, Bank Indonesia terus mengkaji dan mengeksplorasi potensi dukungan pengembangan ekonomi dan keuangan berkelanjutan ke depan sehingga dapat menjadi katalis proses transisi untuk mencapai NDC Indonesia.

Boks 5.3

Kontribusi Perbankan dalam Pembiayaan Hijau: Apresiasi untuk Bank Pendukung Keuangan Hijau

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, diperlukan praktik berkelanjutan pada sistem keuangan. Transisi menuju ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan guna memitigasi dan beradaptasi terhadap risiko perubahan iklim. Proses transisi ini memerlukan dukungan pembiayaan yang signifikan, baik dari perspektif sektoral maupun intertemporal. Dalam konteks ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui *Third Biennial Update Report* tahun 2021, memperkirakan bahwa kebutuhan pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia mencapai 281 miliar dolar AS hingga tahun 2030. Hal ini menandakan perlunya dukungan pembiayaan sekitar Rp440 triliun per tahun, yang setara dengan sekitar 15-16% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, dibutuhkan dukungan sumber pendanaan yang luas dengan melibatkan tidak hanya sektor publik tetapi juga peran aktif sektor swasta, terutama perbankan.

Meskipun dihadapkan pada tantangan nyata berupa ekosistem yang masih dalam tahap berkembang, perbankan Indonesia terus menunjukkan peningkatan kinerja pada aktivitas pembiayaan dan pendanaan yang memperhatikan aspek lingkungan. Pertumbuhan pembiayaan aktivitas berkelanjutan tidak lepas dari dukungan Bank Indonesia melalui insentif berupa kelonggaran kewajiban *Loan To Value (LTV)/Financing To Value (FTV)* untuk kredit/pembiayaan pemilikan properti berwawasan lingkungan dan insentif berupa kelonggaran kewajiban uang muka untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB) listrik berbasis baterai. Dengan adanya insentif tersebut, perbankan dapat menyalurkan KPR

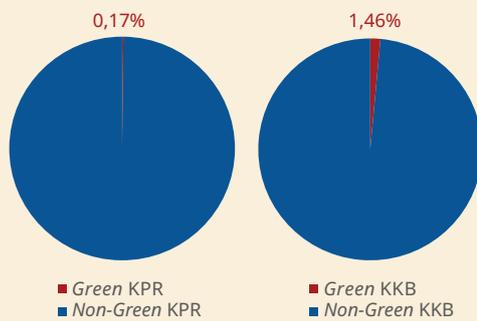
dan KKB berkelanjutan dengan nilai hingga Rp3,08 triliun per Desember 2023, meningkat pesat dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2022 sebesar Rp 0,96 triliun. Ke depan, masih terdapat ruang bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran KPR dan KKB berwawasan lingkungan menimbang proporsinya yang masih cenderung rendah dibandingkan total KPR dan KKB, masing-masing sebesar 0,17% untuk green KPR dan 1,46% untuk green KKB. Di samping itu, dukungan Bank Indonesia juga terlihat dari insentif berupa kelonggaran pemenuhan kewajiban Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui kepemilikan obligasi berkelanjutan. Berdasarkan data dari *ASEAN Capital Market Forum*, perbankan di Indonesia telah menerbitkan obligasi hijau dengan nilai *outstanding* sekitar Rp22 triliun per Desember 2023. Meskipun telah menunjukkan kinerja yang positif, namun optimalisasi kinerja pembiayaan dan pendanaan berkelanjutan perlu terus ditingkatkan dengan mengedepankan aspek pemerataan sehingga kontributor pembiayaan dan pendanaan berkelanjutan dapat berasal dari seluruh kelompok dan jenis bank.

Grafik B5.3.1 Perkembangan Penyaluran KPR dan KKB Berwawasan Lingkungan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B5.3.2 Proporsi KPR dan KKB Lingkungan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B5.3.3 Perkembangan Non-Performing Loans untuk KPR dan KKB Berwawasan Lingkungan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dalam rangka memberikan apresiasi serta memotivasi praktik keuangan berkelanjutan oleh perbankan, Bank Indonesia menginisiasi pemberian apresiasi kepada Bank Pendukung Keuangan Hijau Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada bank yang menunjukkan kinerja unggul dalam praktik intermediasi berwawasan lingkungan, baik melalui penyaluran pembiayaan yang memerhatikan aspek lingkungan maupun melalui upaya mendukung pendalaman pasar keuangan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan instrumen keuangan atau obligasi hijau yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan aktivitas berkelanjutan.

Penilaian mencakup berbagai aspek meliputi tata kelola, rencana aksi dan strategi transisi, manajemen risiko terkait perubahan iklim, dan ketersediaan metrik dan target yang jelas dan kredibel untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Untuk tahun 2023, *Award Bank Pendukung Keuangan Hijau Terbaik* diberikan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk subkategori Bank KBMI 3 dan KBMI 4, serta Bank Raya Indonesia untuk subkategori Bank KBMI 1 dan KBMI 2. Pemberian apresiasi kepada bank pendukung keuangan hijau terbaik juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan *disclosure* keberlanjutan oleh perbankan.

Pemberian penghargaan kepada Bank Pendukung Keuangan Hijau Terbaik diharapkan dapat mendorong laju inovasi dan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Pemberian penghargaan ini diimplementasikan sebagai salah satu strategi komunikasi untuk menunjukkan dukungan Bank Indonesia terhadap inovasi dan praktik keuangan berwawasan lingkungan oleh industri perbankan. Komunikasi dari bank sentral memiliki peran krusial dalam memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dan membantu mereka dalam memahami arah kebijakan ke depan⁴⁵. Salah satu bentuk komunikasi tidak langsung adalah melalui pemberian apresiasi atau penghargaan yang tidak hanya menciptakan citra dan reputasi positif bagi penerima, tetapi juga mendorong pengembangan institusi terkait serta memberikan motivasi kepada institusi lainnya untuk mengembangkan praktik bisnis yang sejalan⁴⁶. Oleh karena itu, pemberian apresiasi kepada Bank Pendukung Keuangan Hijau Terbaik diharapkan dapat meningkatkan motivasi bank untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, terutama dalam berinovasi dan memperkuat praktik keuangan berkelanjutan.

45 Bank for International Settlements. (2016). Objective-setting and communication of macroprudential policies. *Committee on Global Financial System Papers No. 57*.

46 Frey, B. S. (2006). *Giving and receiving awards. Perspectives on Psychological Science*, 1(4), 377-388. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00022.x>

BAB 06

OUTLOOK INTERMEDIASI DAN ARAH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL



Perbaikan ekonomi global yang diperkirakan masih tertahan menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang melanjutkan pertumbuhan. Pengetatan kebijakan moneter negara maju yang berlangsung lebih lama (*higher for longer*) menjadi tantangan bagi bank sentral secara global. Kebijakan moneter ketat negara maju tersebut didorong oleh proses penurunan inflasi yang lebih lambat di tengah perbaikan ekonomi yang diperkirakan tertahan. Inflasi AS yang masih tinggi menyebabkan suku bunga FFR diperkirakan baru mulai menurun pada Semester II 2024. Perkembangan tersebut menyebabkan ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada 2024. Sementara itu, pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dipengaruhi oleh membaiknya ekspor, tetap baiknya permintaan domestik, dan didukung oleh positifnya keyakinan pelaku ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga dan investasi khususnya nonbangunan perlu terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik 2024 diperkirakan akan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5%.

Ke depan, intermediasi perbankan diperkirakan tetap tumbuh dengan dukungan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Optimisme pertumbuhan kredit didukung oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terjaga, suku bunga yang kondusif, serta berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Intermediasi perbankan ke depan juga didukung oleh ketahanan perbankan yang kuat, yaitu risiko kredit yang rendah dan permodalan yang tetap kuat. Dari sisi permintaan, pembiayaan korporasi diperkirakan meningkat seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang resilien turut meningkatkan permintaan kredit konsumsi. Dari sisi inklusi, kredit UMKM diperkirakan melanjutkan peningkatan pertumbuhan seiring dengan perbaikan omzet UMKM dan dukungan

penyaluran KUR. Dengan perkembangan tersebut, intermediasi perbankan diperkirakan tumbuh sebesar 10-12% pada 2024 dan terus meningkat pada 2025 dengan kisaran 11-13%.

Bank Indonesia akan melanjutkan arah kebijakan makroprudensial *pro-growth* disertai penguatan sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial *pro-growth* ditempuh melalui peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan beberapa kebijakan makroprudensial yang telah mendukung *pro-growth*, yaitu *Loan to Value/Financing to Value*, Rasio Intermediasi Makroprudensial, *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), dan Kebijakan Transparansi Suku Bunga Kredit. Seiring arah kebijakan makroprudensial yang *pro-growth*, Bank Indonesia melakukan pengawasan secara tidak langsung (*surveilans*) dan pengawasan langsung (*pemeriksaan*) secara tematik. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi lintas otoritas sektor keuangan dalam KSSK dan sinergi bilateral antara BI-OJK dan BI-LPS. Sinergi ditujukan sebagai antisipasi potensi rambatan ketidakpastian global dan domestik ke sistem keuangan domestik. Sinergi KSSK antara lain dilakukan pada bauran kebijakan lintas otoritas dan penyusunan sejumlah peraturan sebagai tindak lanjut UU PPSK. Secara bilateral, Bank Indonesia berkordinasi dengan OJK antara lain dalam hal *sharing* informasi dan analisis terkait makroprudensial-mikroprudensial, koordinasi rancangan kebijakan sektor perbankan, dan pelaksanaan pemeriksaan perbankan secara bersama. Sementara itu, koordinasi bilateral dengan LPS dilakukan antara lain dalam penyusunan peraturan terkait makroprudensial dan penanganan permasalahan bank.

Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi. Ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada 2024, terutama ditopang lebih kuatnya kinerja ekonomi AS dan India sejalan dengan konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Suku bunga Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan baru mulai menurun pada Semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi. *Yield* US Treasury kembali meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara *emerging market*. Kondisi ini memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, terhadap ekonomi Indonesia.

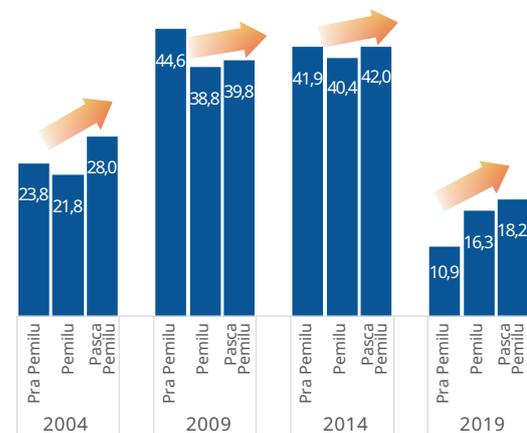
Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5%. Prospek ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspor, tetap baiknya permintaan domestik, dan didukung oleh positifnya keyakinan pelaku ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga dan investasi khususnya nonbangunan perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), prospek LU Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tetap tumbuh baik. Sementara secara spasial, pertumbuhan yang baik diperkirakan terjadi di seluruh wilayah, terutama Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) sejalan dengan dampak positif hilirisasi mineral, serta Jawa akibat permintaan domestik yang masih kuat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan, khususnya melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, serta bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik.

Stabilitas sistem keuangan yang diperkirakan tetap terjaga dan optimisme pertumbuhan ekonomi akan mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut. Intermediasi perbankan diperkirakan tumbuh sebesar 10-12% pada 2024 dan terus meningkat pada 2025 pada kisaran 11-13%. Optimisme pertumbuhan kredit didukung oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terjaga, suku bunga yang kondusif, serta berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Meningkatnya aktivitas ekonomi domestik ke depan akan mendorong naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga. Dari sisi penawaran, perbankan diperkirakan masih memiliki kapasitas yang baik dalam penyaluran kredit. Kecukupan likuiditas perbankan memberikan ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit. Bank cenderung menyalurkan kredit ke sektor berkinerja baik yang telah dipahami dan terukur risikonya.

Intermediasi perbankan ke depan juga didukung oleh ketahanan perbankan yang kuat, yaitu risiko kredit yang rendah dan permodalan yang tetap kuat. Hasil *stress test* sepanjang 2023 menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi dampak gejolak global, serta mempertimbangkan berakhirnya perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan secara *targeted* dan sektoral pada akhir Maret 2024. Terjaganya ketahanan perbankan juga didukung oleh kecukupan CKPN yang tinggi dan rasio permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang memadai.

Dari sisi permintaan, pembiayaan korporasi diperkirakan meningkat seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Korporasi terutama membutuhkan jenis pembiayaan kredit modal kerja KMK seiring dengan pertumbuhan penjualan korporasi pada kondisi kas yang cenderung akan menurun. Sementara itu, korporasi cenderung menahan investasi pada periode pemilu sehingga permintaan kredit investasi KI diperkirakan melambat di awal tahun. Berdasarkan historis yang ditunjukkan oleh Grafik 6.2.1, kredit investasi diperkirakan kembali meningkat pasca pemilu seiring realisasi capex korporasi. Aktivitas hilirisasi juga berpotensi meningkatkan kredit investasi, terutama pada pengolahan *intermediate products* dalam rangka penguatan rantai pasok.

Grafik 6.2.1 Realisasi Capex pada Prapemilu, Pemilu, dan Pasca Pemilu



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Konsumsi rumah tangga yang resilien turut meningkatkan permintaan pembiayaan, khususnya kredit konsumsi. Prospek perekonomian yang membaik mendorong ekspektasi lapangan kerja yang semakin optimis. Konsumsi rumah tangga terutama dikontribusikan oleh rumah tangga kelas atas yang berpendapatan tinggi. Sementara itu, penyaluran Bansos diharapkan dapat membantu konsumsi rumah tangga kelas bawah. Seluruh program Bansos akan tetap dilanjutkan pada tahun 2024 dengan nominal Rp 496,8T, meningkat 4,4% dibanding 2023. Berdasarkan demografi, konsumsi rumah tangga terutama ditopang oleh generasi muda yang memiliki peran semakin besar dalam perekonomian. Pertumbuhan KPR juga diperkirakan meningkat, seiring peningkatan penjualan rumah di pasar primer dan insentif PPN DTP.

Kredit UMKM diperkirakan melanjutkan peningkatan pertumbuhan didukung penyaluran KUR dan ditopang perbaikan omzet UMKM. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 300T yang diupayakan dapat terserap optimal di awal tahun. Optimalisasi penyaluran KUR juga didukung oleh kecukupan anggaran subsidi bunga dan subsidi margin, serta implementasi Kredit Usaha Alsintan. Pencapaian kredit UMKM juga didukung oleh sisi permintaan yang masih optimis. Hasil survei UMKM yang

dilakukan Bank Indonesia menunjukkan kinerja omzet UMKM masih optimis pada 2024 dengan ekspektasi indeks bisnis UMKM yang meningkat. Kinerja permintaan juga didukung oleh insentif fiskal berupa kebijakan BLT UMKM dan insentif PPh Final UMKM. Ke depan, pertumbuhan kredit UMKM dapat diarahkan kepada sektor mamin, fashion, dan kerajinan untuk semakin memperkuat daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu dicermati, antara lain rendahnya pertumbuhan DPK dan berakhirnya kelonggaran restrukturisasi kredit. Sustainability pertumbuhan DPK perlu dijaga untuk mendukung kecukupan likuiditas intermediasi perbankan. Beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan DPK antara lain realisasi ekspansi fiskal serta preferensi penempatan dana nonbank (Korporasi, RT, IKNB, dan perorangan asing) pada SBN. Perbankan diperkirakan akan melakukan penguatan pendanaan non-DPK sebagai alternatif sumber pendanaan, antara lain melalui realokasi aset surat-surat berharga. Selain itu, terdapat risiko *relapse* kredit restrukturisasi pada beberapa debitur yang mendapat perpanjangan pelonggaran restrukturisasi kredit dari OJK hingga Maret 2024, antara lain kredit UMKM, sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, sektor TPT dan alas kaki, dan kredit di wilayah Bali.

6.3

Arah Kebijakan Makroprudensial *Pro-Growth*

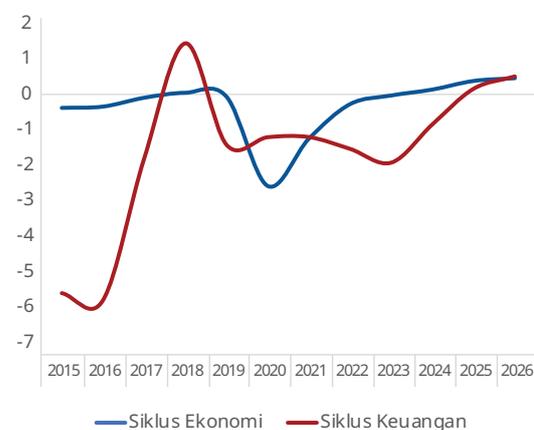
Bank Indonesia akan melanjutkan arah kebijakan makroprudensial *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar merupakan bagian dari *stance* bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan sistem pembayaran yang *pro-growth* dan kebijakan moneter yang lebih *pro-stability*. *Stance* bauran kebijakan ini didasarkan pada siklus ekonomi dan siklus keuangan yang diperkirakan sedang naik tetapi masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial, tecermin dari masih terdapatnya ruang pertumbuhan kredit/pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Bank Indonesia memprakirakan siklus ekonomi dan keuangan akan terus meningkat hingga mulai memasuki periode puncak (*boom*) pada 2025-2026 untuk siklus ekonomi dan pada 2026-2027 untuk siklus keuangan (Grafik 6.3.1). Oleh karena itu, *stance* kebijakan makroprudensial longgar tetap dipertahankan pada 2024 hingga pertengahan 2025 untuk terus mendorong kredit/pembiayaan perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Dukungan kebijakan makroprudensial longgar diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,

terutama dari sektor-sektor prioritas, serta UMKM dan ekonomi hijau sebagai perluasan inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan.

Kebijakan makroprudensial longgar ditempuh melalui peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Melalui kebijakan KLM, Bank Indonesia memberikan insentif likuiditas hingga 4% dari DPK kepada perbankan yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, KUR, Ultra Mikro dan ekonomi hijau. Bank Indonesia akan senantiasa mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif likuiditas KLM untuk mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor yang mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pelonggaran likuiditas juga dilakukan melalui penurunan rasio PLM sebesar 100bps efektif dilakukan per 1 Desember 2023, baik untuk BUK maupun BUS, menjadi masing-masing sebesar 5% dan 3,5%. Penurunan rasio PLM dilakukan seiring masih kuatnya likuiditas perbankan yang terlihat dari rasio AL/DPK perbankan sebesar 28,73% pada Desember 2023. Adanya pelonggaran kewajiban likuiditas ini diharapkan mampu memberikan fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan untuk mendukung perbankan meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaannya.

Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan beberapa kebijakan makroprudensial yang telah *pro-growth*, yaitu *Loan to Value/Financing to Value*, Rasio Intermediasi Makroprudensial, *Countercyclical Buffer*, dan Kebijakan Transparansi Suku Bunga Kredit. Bank Indonesia memperpanjang pelonggaran batas maksimum rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan

Grafik 6.3.1 Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia



Sumber : Bank Indonesia, diolah

properti dan minimum uang muka untuk kredit/ pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB), berlaku efektif 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Sementara itu, kebijakan akomodatif terhadap aspek permodalan dilanjutkan melalui kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB). Bank Indonesia tetap mempertahankan rasio CCyB sebesar 0%, sampai dengan akhir Desember 2024. Selanjutnya, Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah dipertahankan pada kisaran 84-94% untuk mendorong penyaluran kredit bank pada level optimal. Kebijakan transparansi suku bunga juga akan dilanjutkan untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial.

Seiring arah kebijakan makroprudensial yang *pro-growth*, Bank Indonesia melakukan pengawasan secara tidak langsung (surveilans) dengan memantau, mengidentifikasi, serta menilai perkembangan intermediasi perbankan dan eksposur risiko yang dihadapi. Surveilans

dilakukan melalui pendekatan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) untuk menganalisis area makroprudensial secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk keterkaitan dengan area moneter, pasar uang, pasar valas, dan sistem pembayaran. Dalam pendekatan DSRS, pelaksanaan surveilans turut mempertimbangkan tahapan eskalasi risiko sistemik yaitu *risk build up/accumulation, risk materialization, serta risk amplification and propagation*.

Melengkapi hasil surveilans, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung (pemeriksaan) secara tematik. Pemeriksaan tematik dilakukan terhadap beberapa bank berdasarkan fokus dan strategi pengawasan yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk melakukan evaluasi kebijakan maupun pemantauan terhadap implementasi kebijakan ditinjau dari aspek kepatuhan (*compliance-based*).

Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi lintas otoritas sektor keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penguatan sinergi ditujukan untuk mengantisipasi rambatan ketidakpastian di tingkat global dan domestik yang berpotensi memengaruhi kinerja perekonomian dan sistem keuangan domestik. Penguatan sinergi dilakukan melalui bauran kebijakan lintas otoritas yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan. Bank Indonesia, bersama dengan KSSK, secara aktif terlibat dalam diskusi dengan ekonom, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi dan masukan yang komprehensif atas perkembangan kondisi perekonomian dan sektor keuangan agar dapat merumuskan bauran kebijakan yang efektif dan kredibel. Koordinasi antarotoritas dilakukan melalui rapat berkala yang dijadwalkan secara triwulanan, serta melalui rapat/pertemuan lainnya di semua level, baik pada level teknis, pimpinan dan *deputies* yang dilaksanakan secara berkala dan juga sewaktu-waktu antara lain untuk membahas jika terdapat hal-hal/isu yang berpotensi berimplikasi signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Sinergi KSSK juga terus dilakukan untuk menindaklanjuti amanat dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Sebagai tindak lanjut penyusunan peraturan turunan PPSK, sampai dengan triwulan IV 2023, peraturan-peraturan pelaksanaan UU PPSK yang telah diterbitkan antara lain satu Peraturan Pemerintah, enam Peraturan Bank Indonesia (PBI), sembilan belas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta dua

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS). Ke depan, Bank Indonesia senantiasa berkontribusi dalam pembahasan bersama sebagai anggota KSSK terhadap penerbitan peraturan sebagai tindak lanjut UU PPSK yang melibatkan lembaga dan/atau kementerian terkait. Lebih lanjut, Bank Indonesia turut berkomitmen untuk melakukan penerbitan peraturan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut UU PPSK.

Secara bilateral, Bank Indonesia akan terus memperkuat mekanisme koordinasi antara BI-OJK dan BI-LPS. Koordinasi BI-OJK terus dilakukan secara intensif melalui *sharing* informasi dan analisis terkait makroprudensial-mikroprudensial, untuk memonitor risiko secara intensif dan merumuskan langkah mitigasi sesuai dengan kewenangan masing-masing otoritas. Selain itu rancangan kebijakan Bank Indonesia kedepan terus dikoordinasikan dengan otoritas terkait, sebagai bentuk sinergi untuk mendukung pengembangan sektor perbankan. Koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama kepada perbankan akan terus diperkuat, untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan implementasi kebijakan di sektor keuangan. Dari sisi koordinasi BI-LPS, telah disepakati penguatan landasan koordinasi kedua lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga. Dalam hal ini ruang koordinasi melalui sinkronisasi penyusunan peraturan terkait makroprudensial dan penanganan permasalahan bank sesuai dengan kewenangan masing-masing terus diperkuat, untuk menyelaraskan kebijakan yang diambil antarotoritas.

Dalam rangka menjaga SSK, Bank Indonesia terus memperkuat pemantauan terhadap indikator SSK termasuk melalui pemanfaatan *machine learning*. Pemantauan indikator SSK bertujuan untuk mencegah *build up* kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Hasil pemantauan menjadi masukan dalam formulasi kebijakan, baik yang bersifat *preemptive* maupun *forward looking*. Pemantauan indikator SSK juga mencakup langkah antisipatif ke depan yang ditempuh dengan proyeksi indikator. Oleh karena itu, proyeksi indikator SSK dalam jangka pendek (*Near-Term Forecast*) dengan tingkat akurasi yang kredibel menjadi penting. Untuk mendukung hasil proyeksi yang kredibel, Bank Indonesia menggunakan berbagai metode kuantitatif, termasuk pemanfaatan metode *machine learning*, khususnya *Supervised Machine Learning* (SML). Metode ini menjadi pilihan yang tepat seiring dengan meningkatnya jumlah data dan kompleksitas interaksi di dalam sistem keuangan. Hal serupa juga dilakukan beberapa bank sentral di dunia, diantaranya The Federal Reserve dalam proyeksi US Treasury dan proyeksi terjadinya resesi, Bank Sentral Malaysia dalam proyeksi indikator makroekonomi berdasarkan sentimen, Bank Sentral Rusia dalam proyeksi *probability of default*, serta Bank Sentral Perancis dalam proyeksi ekspor dan *foreign direct investment*.⁴⁷

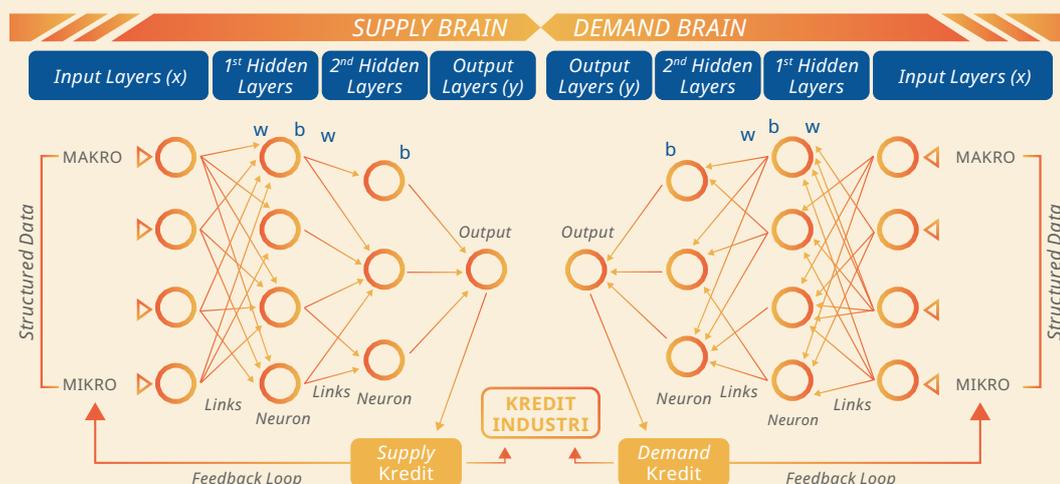
Tantangan utama dalam penggunaan *machine learning* dalam proyeksi adalah terbatasnya informasi mengenai kausalitas antarvariabel *input* dan *output*.

47 Araujo, D., Bruno, G., Marcucci, J., Schmidt, R., & Tissot, B. (2022). Machine learning applications in central banking. Irving Fisher Committee Bulletin, 57: Proceedings of the IFC-Bank of Italy Workshop on "Data Science in Central Banking", Part 1: Machine learning applications, Rome (virtual event), 19-22 October 2021.

Bank Indonesia telah mengimplementasikan beberapa metode *supervised machine learning* untuk proyeksi, antara lain *Gaussian Process Regression*, *Support Vector Machine*, dan *Neural Network*. Namun, SML terdiri dari beberapa metode yang masing-masing memiliki perbedaan pendekatan dalam penyelesaian masalah, sehingga sering kali tidak mudah untuk dipahami. Hal ini menyebabkan hasil proyeksi dari SML rentan terhadap *black box problem*, yaitu fenomena hasil proyeksi yang sulit untuk dijelaskan. *Black box problem* dapat diatasi dengan memanfaatkan beberapa algoritma seperti *Shapley Value* dan *Local Interpretable Model-Agnostic Explanations* untuk mengetahui seberapa penting suatu *predictor* atau *features importance*. Selain itu, *Partial Dependent Plot* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel *predictor* dengan indikator yang diproyeksikan. Interpretabilitas dari model SML penting untuk mengetahui kesesuaian relasi antarvariabel dengan teori.

Penggunaan *machine learning* dalam proyeksi dapat melengkapi penggunaan metode ekonometrika. Metode *machine learning* memiliki fleksibilitas dalam penyelesaian masalah karena tidak bergantung pada banyak asumsi statistik seperti pada metode ekonometri. Namun, metode ini memiliki kelemahan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel. Akibatnya, hasil proyeksi dari *machine learning* kadang kala tidak mudah untuk dijelaskan. Sebaliknya, metode ekonometrika mampu menjelaskan hubungan antarvariable meskipun tidak lebih fleksibel. Dengan demikian, kedua metode tersebut dapat saling melengkapi dan menjadi pembanding untuk memastikan konsistensi hasil proyeksi.

Gambar B6.1.1 Struktur Neural Network dari Model Kredit Industri



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Salah satu implementasi SML dalam proyeksi indikator SSK di Bank Indonesia yaitu proyeksi pertumbuhan kredit industri menggunakan metode *Neural Network*. Model proyeksi pertumbuhan kredit menggunakan *structured data* sebagai *input predictor*. Struktur *network* terdiri dari sisi penawaran (*supply brain*) dan sisi permintaan (*demand brain*). *Input predictor* pada sisi permintaan kredit antara lain meliputi variabel makroekonomi, kinerja korporasi, dan rumah tangga yang memengaruhi permintaan kredit. Sementara itu, *input predictor* pada sisi penawaran kredit antara lain meliputi variabel makroekonomi dan kinerja perbankan yang berperan sebagai agen intermediasi dalam sistem keuangan. *Neural Network* diestimasi menggunakan metode *Nonlinear Autoregressive*

Network with exogenous input (NARX) yang memiliki keunggulan dalam memproyeksi pola *nonlinear* dalam data *time series*.

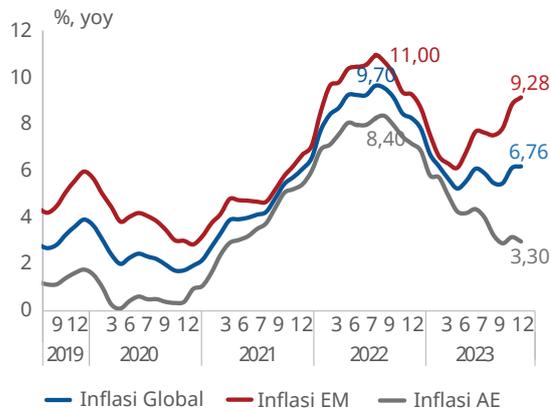
Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengembangkan model proyeksi indikator SSK berbasis *machine learning* untuk mendukung asesmen dan formulasi kebijakan. Metode *machine learning* telah digunakan untuk proyeksi beberapa indikator SSK, meliputi indikator bank dan korporasi. Beberapa indikator bank yang telah diproyeksi selain pertumbuhan kredit industri antara lain kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit perumahan, *Non-Performing Loan*, dan suku bunga kredit. Sementara itu, beberapa indikator korporasi yang telah diproyeksi menggunakan *machine learning* antara lain *Interest Coverage Ratio* dan *Capital Expenditure*.

LAMPIRAN



Kumpulan Grafik dan Tabel

Inflasi global masih dalam tren penurunan



Keterangan: Des'23: angka sementara
Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

Suku bunga kebijakan beberapa bank sentral masih tinggi

Group	Central Bank	2021	2022	2023
EM Europe	CBRT	14,00	9,00	42,50
	RUSSIAN Fed	8,50	7,50	16,00
EM LATAM	BCB	9,25	13,75	11,75
	Banxico	5,43	10,50	11,25
	BCCH (Chile)	4,00	11,25	8,25
EM Asia	RBI	4,00	6,25	6,50
	BSP	2,00	5,50	6,50
	BNM	1,75	2,75	3,00
	BOK	1,00	3,25	3,50
	BOT	0,50	1,25	2,50
	PBOC	2,95	2,75	2,40
Advanced Economies	RBNZ	0,75	4,25	5,50
	FED	0,25	4,50	5,50
	BOE	0,25	3,50	5,25
	RBA	0,10	3,10	4,35
	BOJ	0,00	0,00	-0,01
	ECB	0,00	2,50	4,50

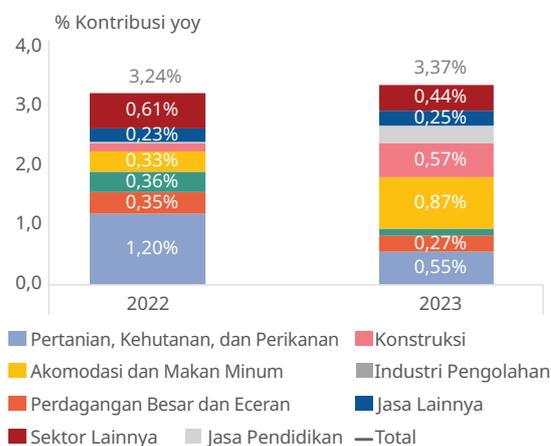
Sumber: Bloomberg, diolah

Pertumbuhan ekonomi domestik masih kuat dan terjadi pada seluruh lapangan usaha

Komponen	(% yoy)										
	2021	2022				2022	2023				2023
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,87	1,16	1,68	1,95	4,51	2,25	0,44	2,03	1,49	1,12	1,30
Pertambangan dan Penggalian	4,00	3,82	4,01	3,22	6,46	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12
Industri Pengolahan	3,39	5,07	4,01	4,83	5,64	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64
Pengadaan Listrik dan Gas	5,55	7,04	9,33	8,05	2,31	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	1,35	4,46	4,26	2,84	3,23	5,69	4,78	4,49	4,66	4,90
Konstruksi	2,81	4,83	1,02	0,63	1,61	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,63	5,74	4,43	5,37	6,56	5,53	4,94	5,29	5,10	4,09	4,85
Transportasi dan Pergudangan	3,24	15,79	21,27	25,80	16,99	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,88	6,57	9,79	17,79	13,77	11,94	11,54	9,91	10,94	7,89	10,01
Informasi dan Komunikasi	6,82	7,15	8,06	6,94	8,72	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56	1,64	1,50	0,87	3,76	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77
Real Estat	2,78	3,78	2,16	0,63	0,39	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43
Jasa Perusahaan	0,73	5,96	7,92	10,79	10,42	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,33	-1,29	-1,53	12,47	1,77	2,51	2,10	8,16	-6,24	1,61	1,50
Jasa Pendidikan	0,11	-1,41	-1,07	4,45	0,40	0,57	1,02	5,43	-2,07	2,63	1,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,45	4,52	6,51	-1,70	2,48	2,75	4,77	8,28	2,91	3,09	4,66
Jasa lainnya	2,12	8,25	9,26	9,13	11,14	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52
PDB	3,70	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05

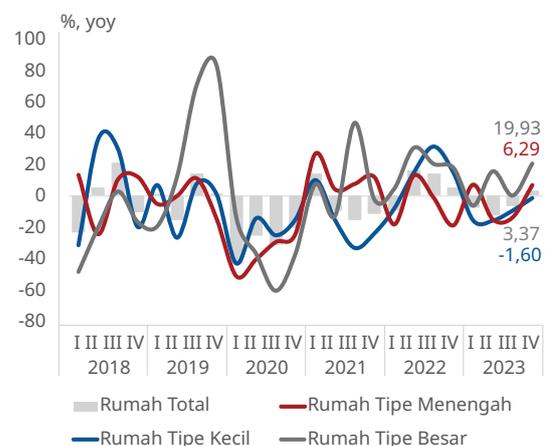
Sumber: BPS, diolah

Kinerja korporasi mendukung serapan tenaga kerja



Sumber: BPS, diolah

Masih kuatnya penghasilan RT mendorong penjualan perumahan



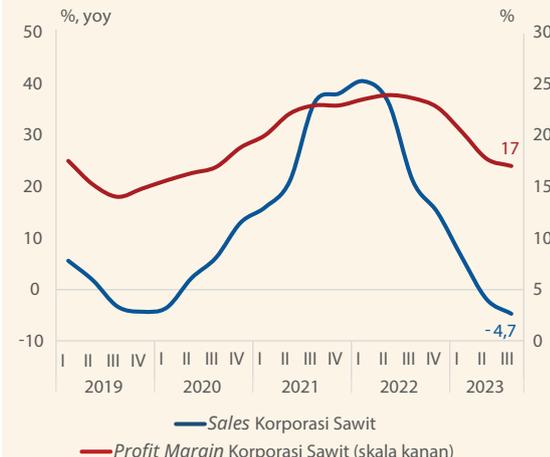
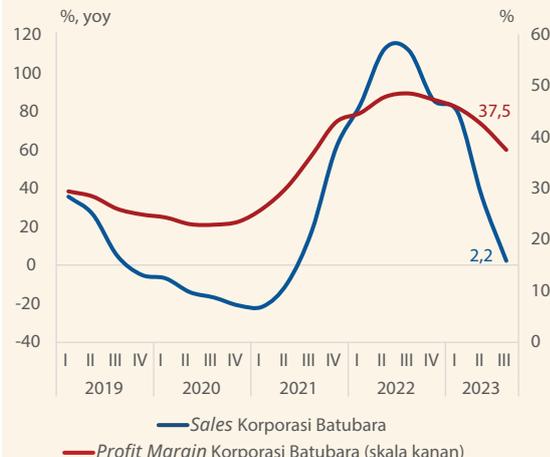
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Penurunan harga komoditas memoderasi pertumbuhan ekspor



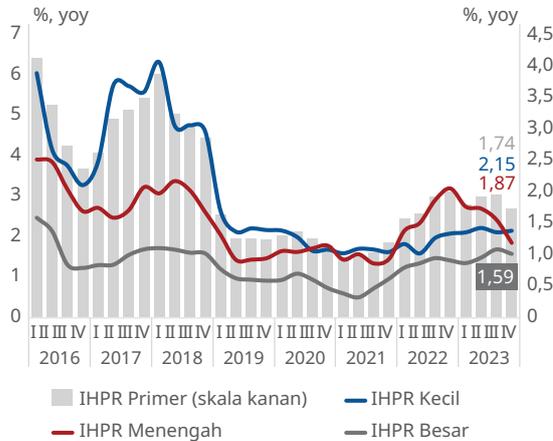
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kinerja korporasi komoditas utama masih positif



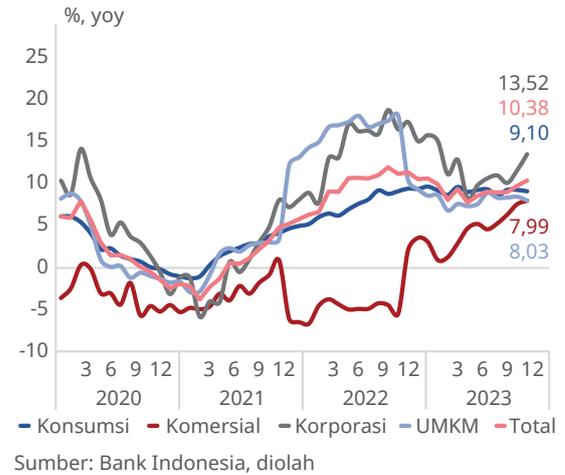
Sumber: Bloomberg, diolah

Pertumbuhan penjualan rumah mendorong peningkatan harga properti residensial di pasar primer



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kredit perbankan terus tumbuh didorong segmen korporasi



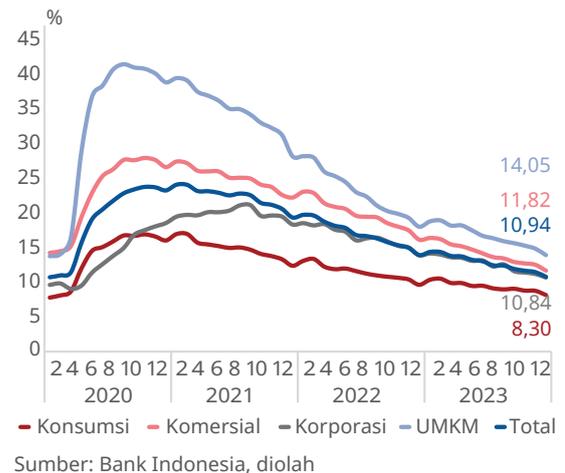
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kredit tumbuh positif pada hampir seluruh sektor ekonomi

Sektor Ekonomi	Pertumbuhan (% yoy)			Pangsa (%)
	Des-22	Jun-23	Des-23	Des-23
1. Pertanian	10,10	7,42	8,45	7,31
2. Pertambangan	54,35	20,02	22,36	4,10
3. Industri	12,19	1,70	4,72	15,76
4. Listrik, gas, dan air	1,64	-7,79	13,33	2,59
5. Konstruksi	4,26	5,73	-0,37	5,57
6. Perdagangan	6,61	3,62	8,77	17,91
7. Pengangkutan	2,22	5,11	19,28	5,27
8. Jasa Dunia Usaha	26,60	20,41	16,98	10,24
9. Jasa Sosial	18,23	28,00	35,06	3,98
10. Lain-lain	9,32	9,03	9,10	27,27
Total	11,35	7,76	10,38	100,00

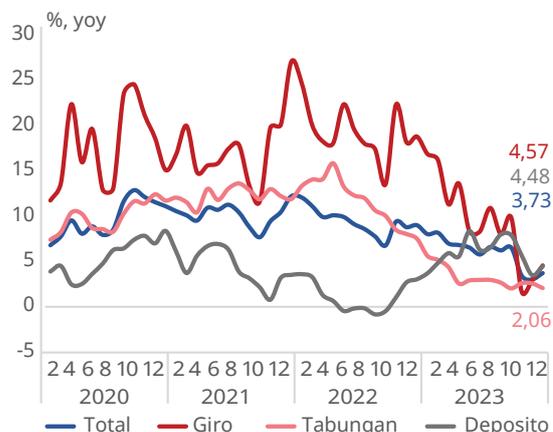
Sumber: BPS, diolah

Risiko kredit yang terjaga tecermin juga pada penurunan Loan at Risk pada semua segmen kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan dana pihak ketiga ditopang pertumbuhan Giro



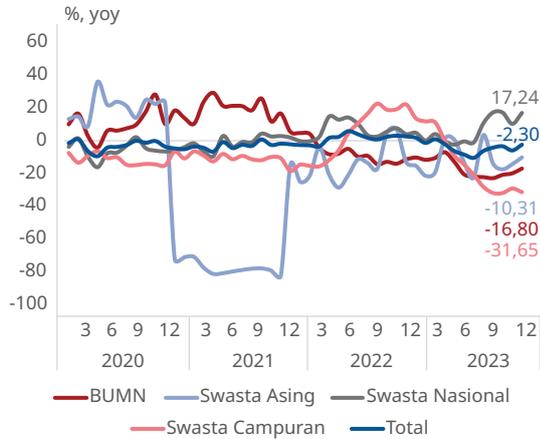
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan DPK dikontribusikan oleh golongan korporasi dan perseorangan

Golongan Pemilik	DPK (% yoy)		DPK (% ytd)		Kontribusi (% yoy) Des'23	Pangsa (%)
	2023		2023			
	Jun	Des	Jun	Des		
Bukan Penduduk	18,18	-0,90	3,57	-0,90	-0,01	1,05
Pemerintah BUMN	22,19	3,64	-7,40	3,64	0,25	6,98
Pemerintah Non BUMN	-7,53	-4,42	25,23	-4,42	-0,23	4,76
Perseorangan	4,37	3,13	-0,40	3,13	1,50	47,55
Swasta IKNB	-3,34	-1,45	1,30	-1,45	-0,06	3,71
Korporasi	8,97	6,50	-5,87	6,50	2,28	35,95
Total	5,79	3,73	-2,02	3,73	3,73	100,00

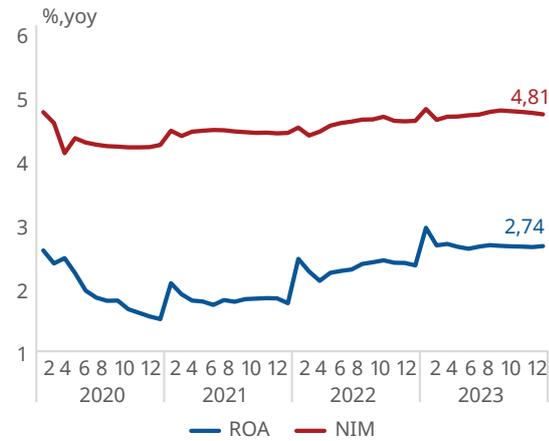
Sumber: Bank Indonesia, diolah

ULN perbankan melambat untuk hampir seluruh kelompok bank



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Profitabilitas bank terus meningkat



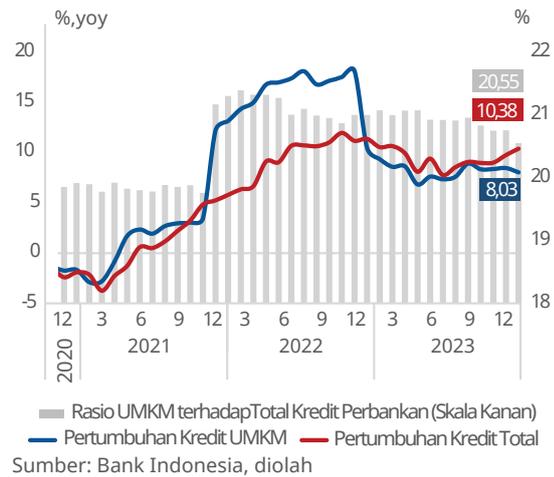
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Appetite perbankan dalam menyalurkan UMKM lebih longgar dibanding Juni 2023



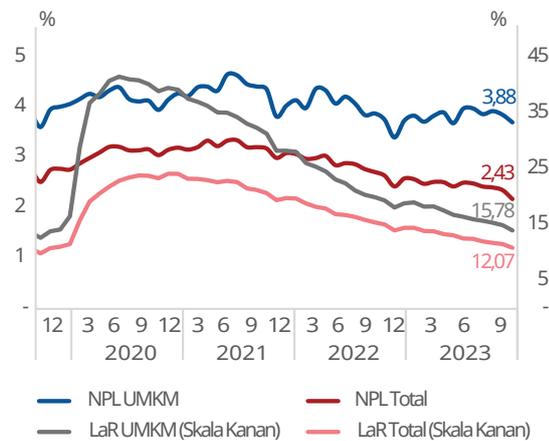
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan kredit UMKM melambat



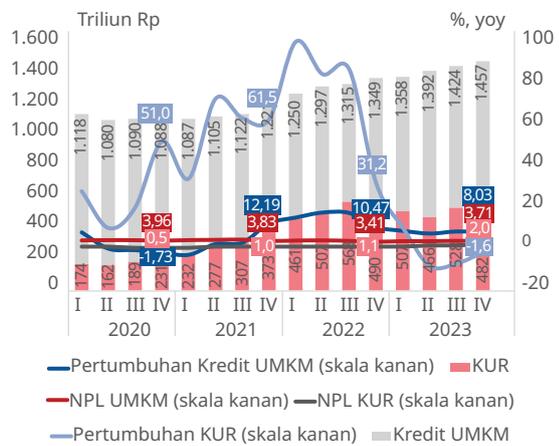
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Risiko kredit UMKM masih terjaga



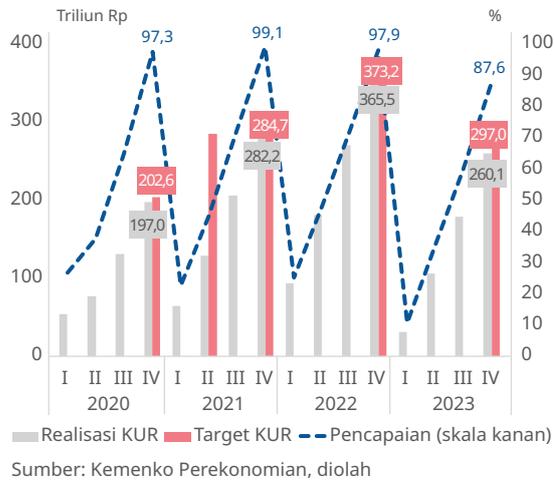
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan KUR tahun 2023 disertai dengan NPL terjaga

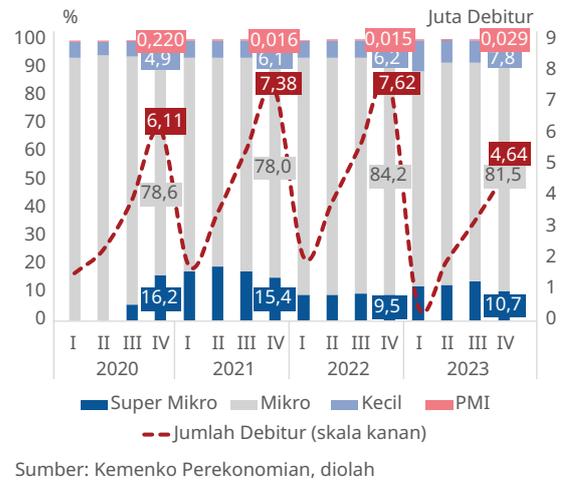


Sumber: Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian, diolah

Realisasi KUR 2023 mencapai 87,6%



Segmen terbesar KUR pada skala mikro



KAJIAN STABILITAS KEUANGAN

No. 42, Maret 2024

PENGARAH

Juda Agung, Solikin M. Juhro, Irman Robinson, Didit Widiana,
Evie Sylviani, Nugroho Joko Prastowo

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Kartina Eka Darmawanti, Heru Rahadyan, Frimayudha Ardyaputra, Lisa Rienelda, Wahyu Widiyanti,
Ali Sakti, Akmaluddin Suangkupon, Rita Harahap, Justina Adamanti

TIM PENYUSUN

Wicaksono Aryo Pradipto, Rukmi Gayatri, Rizki Fitriana, Rani Wijayanti, Anita, Dirwanta Firsta, Friska Zehan Phalupy, Nadhil Auzan Oktaviandhi, Vidi Adyatma Nugraha, Ardhitama Shaumarli, Ayu Aji Putri Setia Utami, Azka Azifah Dienillah, Yulian Zifar Ayustira, Charvin Lim, Hendro Wicaksono, Suhardina Dwi Putrisari, Syekhan Adesia Ramadhan, Dewa Ayu Widia Lestari, Ramdani, Irman Ramdani, Muhammad Iqbal Pratama, Grace Priscilla Siahaan, Luthfiana Rahma, Muhammad Farhan Perdana, Soraefi Oktafihani, Nadira Firinda, Fransiskus Xaverius Tyas Prasaja, Rinorsa Duane Agusta, Yudi Agung Nugroho, Jarot Ureawan Widya Susanto, One Yusril Fikar, Fyona Dhillasari Putri I., Ragil Misas Fu'Adi, Astrika Erlin N. S., Aboeryzal Ahmed Koesyairy

PRODUKSI DAN KOORDINASI STRATEGIS

Ina Nurmalia Kurniati, Ida Ari Kusumawaty, Dwi Oktaviyanti, Nia Nirmala Sari Ambarita, Tri Agustina

KONTRIBUTOR

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP)
Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK)
Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen (DUPK)
Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK)
Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital (DPID)

INFORMASI DAN ORDER

KSK ini terbit pada Maret 2024, didasarkan pada data dan informasi per Desember 2023, kecuali dinyatakan lain

DOKUMEN KSK LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA *WEBSITE* BANK INDONESIA

<http://www.bi.go.id>

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain

PERMINTAAN, KOMENTAR, DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA

Bank Indonesia Departemen Kebijakan Makroprudensial

Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia

Email : DKMP-K2MK@bi.go.id